

Refleksi Pendidikan Indonesia

Mendayung Antara Ke-Indonesiaan
dan Instrumen Neo-Liberalisasi

Tim Editor :

Danu Eko Agustinova, M.Pd

Agustina Tri Wijayanti, M.Pd



REFLEKSI PENDIDIKAN INDONESIA

MENDAYUNG ANTARA KE-
INDONESIAAN DAN INSTRUMEN
NEO-LIBERALISASI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

REFLEKSI PENDIDIKAN INDONESIA

MENDAYUNG ANTARA KE-
INDONESIAAN DAN INSTRUMEN NEO-
LIBERALISASI

Tim Editor :

Danu EkoAgustinova, M.Pd
Agustina Tri Wijayanti, M.Pd

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA TAHUN 2014



PUSTAKA CENDEKIA
www.pustaka.cendekia.com

2014

REFLEKSI PENDIDIKAN INDONESIA
MendayungAntaraKe-IndonesiaandanInstrumen Neo-Liberalisasi
Copyright©Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

Diterbitkan oleh
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2014
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
website: www.penerbitombak.com

PO.*.07.'14**

Tim Editor :
Danu EkoAgustinova, M.Pd
Agustina Tri Wijayanti, M.Pd

Tata letak: ombak
Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
EFLEKSI PENDIDIKAN INDONESIA
MendayungAntaraKe-IndonesiaandanInstrumen Neo-Liberalisasi
Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
*** + *** hlm.; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-258-***-*



DAFTAR ISI

PENGANTAR

SAMBUTAN DEKAN FIS UNY

KUMPULAN ORASI ILMIAH

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2004

PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS MORAL BANGSA ☐

Oleh : Prof. SyafiiMa'arif

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2005

MEMBANGUN SUMBER DAYA INSANI YANG CERDAS, ARIF
DAN BERMORAL

Oleh : Prof. DochakLatief

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2006

BUDAYA DEMOKRASI DAN MASA DEPAN BANGSA

Oleh : PROF. ZAMRONI, Ph.D

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2007

MENGUGAT PUDARNYA NILAI-NILAI KEINDONESIAAN

Oleh :Prof. Dr. Suminto A. Sayuti

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2008

PENDIDIKAN SEBAGAI REKAYASA STRUKTURAL MASYARAKAT

Oleh : AnisBaswedan, Ph.D

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2009

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNTUK
MEMBANGUN DAN MENGOKOHKAN KOMITMEN
KEBANGSAAN PESERTA DIDIK

Oleh : Prof. Dr. UdinSaripudinWinataputra, M.A

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2010

MEMBANGUN EKONOMI INDONESIA:
PENGEMBANGAN KARAKTER DAN PATRIOTISME

Oleh: Prof. Sri-Edi Swasono

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FISE TAHUN 2011

PENGUATAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA MELALUI
PENDIDIKAN ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF

Oleh: Prof. Drs. PurwoSantoso, MA., Ph.D.

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FIS TAHUN 2012

PEMANTAPAN JATI DIRI IPS MENGANTISIPASI
PERUBAHAN KURIKULUM PERSEKOLAHAN

Oleh: Sardiman AM, M.Pd

ORASI ILMIAH DIES NATALIS FIS TAHUN 2013

PENDEKATAN ILMIAH DALAM PEMBELAJARAN ILMU-
ILMU SOSIAL

Oleh: Prof. Abdul Gafur, M.Sc



PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS MORAL BANGSA

Oleh :

Prof. Syafii Ma'arif

Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (alHadis).

Sesungguhnya, bangsa itu jaya selama mereka masih mempunyai akhlak yang mulia; maka apabila akhlak telah hilang dari kehidupan suatu bangsa, maka hancur binasalah bangsa itu (Syauqi Bek).

Negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan; dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara adalah kelumpuhan (Al-Gazali).

Pendidikan dan moral adalah dua pilar yang sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Dua pilar ini menuntut

untuk dicerna dan dicermati dengan arif oleh segenap anak bangsa. Dalam suatu negara yang sedang berusaha lepas dari badai krisis, sangatlah tepat apabila kita mencoba untuk melihat kembali posisi dan interrelasi dua pilar ini bagi bangsa Indonesia.

Uraian berikut akan mencoba menelusuri posisi pendidikan dan moral dalam bingkai kehidupan kebangsaan kita. Dengan menempatkannya pada posisi yang tepat, diharapkan bisa mengantarkan kita untuk menemukan jalan yang lurus, *shirat al-mustaqim*. Jalan yang akan dapat membuka mata hati dan kesadaran kemanusiaan kita sebagai anak-anak bangsa. Sehingga krisis yang hampir saja menghempaskan kita ke jurang kebangkrutan dan kehancuran, dengan segera dapat dilalui dan cepat berlalu.

Negara dan Masalah Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Hal ini menjadi suatu garis pokok dalam setiap proses didik yang dijalani seseorang.¹

Sejalan dengan pernyataan tersebut, pendidikan, demikian dikatakan Al-Gazali, pada hakekatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya ilmu pengetahuan dan

¹ A. Syafii Maarif, dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan (ed.), *Pendidikan dalam Islam dalam Peradaban Industrial*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hal. 63

memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan zamannya itu nanti. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang terpenting untuk membina suatu masyarakat.²

Dilihat dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berumur sangat tua. Dalam bentuk yang sederhana dapat dipahami bahwa pendidikan telah dijalankan sejak dimulainya kehidupan manusia di muka bumi. Untuk era generasi manusia abad 21, pendidikan yang berlangsung telah demikian modern, sehingga sangat membedakannya dengan proses pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya.

Realita ini tentu tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan manusia dengan perubahan-perubahan atas dasar pengalaman-pengalaman yang dilaluinya.

Oleh karena itu, siapapun tidak akan pernah bisa membantah tentang pentingnya posisi pendidikan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa yang bersangkutan. Tingkat pendidikan yang dicapai suatu bangsa akan menempatkan bangsa itu pada suatu posisi tertentu dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat yang bersamaan, pendidikan akan mengantarkan para pemiliknya pada suatu peradaban tertentu. Bukankah tahap-tahap perkembangan peradaban manusia dari satu waktu ke waktu yang lain berkorelasi signifikan dengan tingkat pengetahuan manusianya.

Kesadaran yang demikian, sesungguhnya juga telah dimiliki bangsa Indonesia sejak awal kelahirannya. Ini terbukti dengan

² Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hal. 13.

adanya pernyataan yang tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Indonesia...".³

Lebih jauh, tentang pendidikan ini dinyatakan dalam pasal 31 UUD 1945, dan diturunkan kemudian dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*.⁴ Sejalan dengan tema ini, Hardiknas tahun 2004 menekankan unsur kecerdasan, produktivitas, dan *akhlak mulia*, sebagai hasil sistem pendidikan.

Tak kurang sesungguhnya undang-undang dan aturan yang menempatkan pentingnya posisi pendidikan pada bangsa ini. Namun entah mengapa, dari waktu ke waktu, sejak republik ini lahir, baik pada periode saat politik jadi panglima maupun pada

³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hal. 161.

⁴ *Undang-Undang NO. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Penjelasannya*, Jakarta: Media Wacana, 2003, hal. 12

saat pembangunan ekonomi jadi panglima, nasib pendidikan pada bangsa ini selalu ada di wilayah pinggiran. Pendidikan tidak pernah menjadi prioritas utama sebagai pilar yang akan mengantarkan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Saya katakan, bahwa kondisi pendidikan Indonesia selama ini mengidap penyakit yang kronis yang akut.

Belum lagi kesadaran ini pulih sepenuhnya, tiba-tiba kita dihadapkan dengan keanehan yang kita temukan dalam tubuh bangsa ini. Sekarang ini, Amandemen atas UUD 1945 di bidang pendidikan mengamanatkan adanya alokasi 20 % dari APBN. Akan tetapi ketika Undang-Undang Dasar mengamanatkan 20 % APBN untuk bidang pendidikan, pemerintah lalu berdalih, dengan alasan kondisi ekonomi, pemenuhan alokasi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Sesungguhnya telah terjadi pelanggaran atas UUD 1945 kita, tetapi alasan pemerintah yang demikian dapat saja diterima dan segera dimaafkan. Namun demikian, logika di balik penetapan angka 20% mencerminkan demikian penting dan mendesaknyadilakukan reformasi di bidang pendidikan ini. Tak kurang dari itu, Rektor UNY, rektor kita, yang juga anggota civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial, menjadi ketuanya.

Namun apa daya, sampai saat ini anggaran untuk bidang pendidikan baru dalam kisaran 7-8 % saja. Atau ada kekhawatiran, apabila anggaran ini dipenuhi sesuai tuntutan undang-undang, maka akan terjadi korupsi besar-besaran di depatemen ini. Kekhawatiran yang demikian bisa saja dimunculkan, karena dalam situasi sekarang, problem korupsi telah mewabah dan menjadi penyakit kronis yang menghinggapi bangsa ini.

Negara dan Masalah Moral

Sudah sejak dari zaman purba, para ahli membicarakan soal negara dan soal moral, dan bagaimana hubungan antara keduanya. Para filosof Yunani, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, telah membicarakan tentang moral dan moralitas dalam hubungannya dengan kehidupan manusia pada umumnya. Menurut mereka, moralitas bersifat naturalistik, rasionalistik, dan objektivistik.

Moralitas bersifat naturalistik, dalam arti bahwa moralitas dipandang sebagai bagian dari dunia alami dan umat manusia dipandang sebagai sangat peduli akan pencapaian hidup yang baik, di dunia ini maupun di dunia kelak. Moralitas juga bersifat rasionalistik dan objektivistik, dalam arti bahwa mereka percaya dan meyakini akan adanya wujud Kebenaran yang objektif, dan bahwa akal budi merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dari Kebenaran itu.⁵

Berabad kemudian, pemikiran para filosof Yunani disintesisasikan dengan pemikiran tokoh-tokoh Abad Pertengahan. Sosok Augustinus dan Thomas Aquinas, menandai alam pikiran tentang moral Abad Pertengahan yang berorientasi rohaniah dan objektivistik.

Karya-karya Aurelius Augustinus (354-430 M) dipandang memiliki otoritas yang hampir sebanding dengan kitab suci sepanjang Abad pertengahan. Melalui bukunya yang berjudul *Civitate Dei*, di samping membicarakan hubungan antara negara dan moral, ia juga bercita-cita untuk mendirikan negara yang

⁵ William M. Kurtines dan Jacob L. Gerwitz, *Moralitas, Perilaku Moral, dan Perkembangan Moral*, Jakarta: IJI Press, 1992, hal.14-15.

berdasarkan moral-agama.

Dikatakan bahwa ceritera terusirnya Adam dari sorga karena pengaruh syaitan, dan terjadinya perkelahian serta pembunuhan antara kedua putera Adam, adalah gambaran dari perjuangan antara negara yang bermoral baik, yang dinamakannya dengan Negara Tuhan (*Civitate Dei*), dengan negara yang bermoral jahat, yang dinamakannya Negara Syaitan (*Civitate Diaboli*).

Prinsip Augustinus inilah yang dipakai oleh golongan Katholik untuk mendirikan Negara Gereja yang dipimpin oleh seorang Sri Paus. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh Thomas Aquinas (122-1274) dengan dua bukunya yang berjudul *Summa Theologiae* dan *Summa Contra Gentiles*. Dunia dalam versi Thomisme merupakan suatu keseluruhan yang harmonis yang dicipta dan dijemakan oleh Tuhan Yang Mahakasih dan Mahabijak. Manusia dan alam, moralitas dan keselamatan, iman dan penalaran, itu semua berada dalam kesatuan ilahi.⁶

Di dunia Islam, antara lain muncul seorang al-Gazali (1058-1111), dengan teorinya yang menggabungkan negara dengan moral yang dinamakannya kemudian dengan *Siyasatul Akhlaq* atau *Negara Moral*. Pendapat Al-Gazali memiliki kemiripan dengan pendapat para tokoh Kristen di atas, namun demikian tidaklah berarti bahwa al-Gazali menghendaki Negara Agama. Al-Gazali hanya menghendaki agar unsur agama harus dipertahankan dalam negara.

Bagi al-Gazali, negara dan moral tidak lagi merupakan dua hal yang terpisah, tetapi keduanya harus disatu-padukan, menjadi satu

⁶ *Ibid.*, hal. 19.

badan yang kompak. Menurutnya, negara yang tidak mempunyai moral berarti keruntuhan; dan sebaliknya moral yang tidak sejalan dengan negara adalah kelumpuhan. Seraya mengutip sabda Nabi Muhammad yang berbunyi: "Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang utama".⁷

Munculnya pendapat dan tulisan yang mengkaitkan antara negara dan moral, tentu saja memiliki latar belakangnya sendiri. Bencana besar akan menimpa suatu bangsa atau umat, demikian dikatakan al-Gazali, kala bangsa atau umat itu dihinggapi oleh suatu penyakit yang berbahaya, yaitu *krisis moral*. Dalam waktu sekejap, penyakit ini akan mengancam keutuhan suatu bangsa atau umat. Krisis moral dengan sendirinya akan menyebabkan terjadinya krisis yang bersifat multi kompleks, yaitu krisis di semua bidang kehidupan.

Untuk ini Al-Gazali menyebut adanya tiga akibat yang disebabkan krisis moral ini:

Dalam bidang politik, ia akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, yang umum dinamakan krisis gezag. Para pejabat negara mempergunakan kekuasaannya secara salah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela. Kekuasaan dipergunakan untuk memenuhi nafsu serakah individu dan kelompoknya. Jika pihak atasan sudah berbuat demikian, maka para pegawai di tingkat bawah mengambil teladan atas perilaku atasannya itu. Apabila demikian, maka pemerintahan merupakan suatu alat pengrusak di tangan orang-orang yang jahat dan rakus.

Tidak pula kurang dahsyatnya, adalah bencana krisis moral

⁷ Zainal Abidin Ahmad, *op, cit.*, hal. 12

dalam bidang ekonomi. Kerusakan dalam bidang ini akibatnya akan mengancam kepentingan hidup orang banyak. Krisis ini lebih dahsyat akibatnya daripada sekedar depresi ekonomi. Wabah korupsi yang sudah demikian kronis, akan berakibat pada kebangkrutan dan kehancuran negara. Dengan demikian, perlu sesegera mungkin untuk mengingatkan dan menyadarkan para pejabat negara dari budaya korup ini.

Akibat dari krisis moral ini secara keseluruhan adalah munculnya budaya rakus. Mereka yang telah mengidap penyakit ini akan menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara; mereka hanya memperturutkan nafsu hewannya, demi tujuan yang diinginkannya. Freud mengatakan bahwa pangkal dari berbagai macam penyakit yang mengganggu manusia berawal dari pertentangan di dalam hawa nafsu (*sexuel conflict*). Dalam bahasa al-Qur'an dikatakan: "sesungguhnya nafsu cenderung selalu mengarahkan pada kesesatan" (Q.S. Yusuf (12):53).

Moral Bangsa dalam Taruhan

Seiring dengan apa yang dikatakan al-Gazali di atas, apabila kita mencermati fenomena sosiologis masyarakat Indonesia, kita akan menemukan adanya dua kecenderungan yang saling berlawanan.

Pertama, bangsa Indonesia menyebut dirinya sebagai bangsa yang religius. Simbolsimbol untuk itu sangat jelas dan kasat mata. Kita semuanya tahu, setiap penduduk negeri ini menyatakan keagamanya dalam KTP. Pembangunan tempat ibadah terus bertambah dari waktu ke waktu. Dari tempat-tempat suci tersebut berkumandang seruan dan ajakan untuk berbuat kebaikan. Jumlah

orang yang naik haji dari tahun ke tahun tidak pernah berkurang. Bahkan apabila kuota untuk jamaah haji Indonesia ditambah sekalipun, yakin dan pasti kuota itu akan terpenuhi. Media massa, baik cetak maupun elektronik, senantiasa memberikan tempat dan ruang untuk dakwah. Bahkan dalam kurun terakhir, buku-buku yang bernuansa keagamaan, kelihatan sangat menggembirakan dan banyak diminati.

Para pengamat tidak akan kesulitan untuk sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang taat beragama. Antusiasme beragama dari waktu ke waktu menunjukkan grafik yang senantiasa naik. Apalagi kalau mereka menyaksikan suasana keagamaan di Indonesia antara bulan Ramadhan sampai Dzul Hijjah. Religiositas di Indonesia *is ok*.

Kedua, kita menyaksikan di sana-sini adanya fenomena yang sungguh bertolak belakang dan berseberangan dengan gambaran suasana dan nuansa keagamaan di atas. Dengan mudahnya kita bisa menyaksikan perilaku sekelompok orang yang tidak mau tahu dengan segala bingkai moral. Pelanggaran moral baginya dirasakan enteng saja, sekalipun pesan-pesan agama yang sering didengarnya mengecam perilaku itu, sejak dari ancaman yang ringan sampai ke tingkat yang sangat keras dan mengerikan. Bagaimanapun kecilnya pelanggaran moral, kalau hal itu menggejala dan sampai menjadi budaya, maka ia akan dapat merapuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Contoh yang sangat memuakkan dan menggelisahkan dari bangsa ini adalah kecenderungan untuk berbuat skandal korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Sejarah Indonesia modern selama hampir lima dekade ini sarat dengan muatan korupsi

dan penyalahgunaan wewenang. Padahal, sekali lagi, bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang religius dan sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi

Atribut-atribut mulia dan besar ini teramat sering dihancurkan oleh perilaku korup dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada waktu-waktu ini, ketika para anggota legislatif di tingkat daerah akan mengakhiri masa jabatannya, kita dipertontonkan dengan deretan kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat yang terhormat ini. Meskipun demikian masih saja ada pembelaan dari sementara pihak, bahwa korupsi tersebut bukanlah satu kesengajaan, melainkan sebagai kesalahan penafsiran dari satu undang-undang yang tidak jelas.

Selama hampir lima dekade kita berkubang dalam budaya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, apakah belum cukup? Sila kedua dari Pancasila sungguh merana! Kita punya sila *kemanusiaan yang adil dan beradab*, tetapi perilaku sebagian kita justru menghinai nilai moral dari sila kedua ini. Nilai adil dan beradab sebegitu jauh lebih merupakan hiasan bibir dalam upacara-upacara bendera dan kenegaraan. Perbuatan korup adalah perbuatan biadab yang tidak layak dilakukan oleh warga negara dari bangsa yang beradab.

Kita memang sedang berada pada batas sejarah yang sangat kritis. Sebenarnya yang mengalami keguncangan tidak saja bidang ekonomi, dunia politik kita pun sejak Dekrit 5 Juli 1959 sudah mengalami kemacetan. Sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1966) yang dijalankan Soekarno telah berakhir dengan malapetaka nasional berupa G-30-S/PKI dengan segala akibat buruk yang mengiringinya. Pada tahun 1966 tingkat inflasi kita telah mencapai

angka 650%.

Kemudian datanglah sistem Orde Baru (1966-1998) yang menjadikan ekonomi sebagai panglima demi mengimbangi Orde Lama dengan politik sebagai panglimanya. Pertumbuhan ekonomi kabarnya bergerak antara 5 s.d. 8 % dengan pendapatan per kepala sebelum krisis sekitar US\$1,185. Akan tetapi, mengapa tiba-tiba terpuruk begitu saja setelah didahului oleh krisis yang dialami *bath* Thailand pada Juni 1997. Sampai hari ini belum ada satu teori ekonomi yang dapat menjelaskan secara memuaskan tentang krisis ini.

Selama kurun 59 tahun setelah kemerdekaan, paling tidak kita mengenal dua tipe dan dua orientasi kepemimpinan nasional: orientasi kekuasaan dan orientasi moral. Tipe pertama melingkar di sekitar Bung Karno dan Soeharto, sedangkan tipe kedua melingkar di sekitar Bung Hatta dan A.H. Nasution. Bung Karno dan Bung Hatta mewakili sipil, sementara Nasution dan Soeharto mewakili militer. Secara kebetulan, apabila dilihat dari latar belakang kulturalnya, Soekarno dan Soeharto berasal dari Jawa, sedangkan Hatta dan Nasution berasal dari luar Jawa.

Pada saat Hatta masih setia bersama Bung karno, moral bangsa masih berada dalam kendali, tidak sampai meluncur ke dalam jurang malapetaka. Akan tetapi, demi Hatta melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden pada Desember 1956, Soekarno mulai ringan tangan dan main kayu. Atas nama UUD 1945, Soekarno telah tampil sebagai penguasa tunggal sampai sistem Demokrasi Terpimpin yang diciptakannya hancur berantakan pada tahun 1965/1966.

Soeharto yang tampil atas nama Demokrasi Pancasila persis

mengikuti Bung Karno sebagai penguasa tunggal. Pancasila, UUD 1945, dan segala perundang-undangan umumnya ditafsirkan secara monolitik. Proyek P4 nya pun tidak membuahkan hasil. Kelebihan Soeharto adalah karena dapat bertahan selama 32 tahun.

Semula diharapkan A.H. Nasution dengan kekuatan moralnya akan dapat mengimbangi Soeharto dengan orientasi kekuasaannya yang luar biasa. Akan tetapi, sejak tahun 1968, bekas Ketua MPRS ini, secara sistematis disingkirkan oleh mesin kekuasaan yang dibangun aliansi Soeharto-Ali Moertopo beserta kroninya. Suatu kali Nasution pernah mengatakan bahwa teman-temannya telah mengidap penyakit rakus, baik dalam politik maupun ekonomi.

Sayang, tokoh-tokoh moralis seperti Hatta-Nasution dan para pendukungnya tidak berdaya menghadapi mesin kekuasaan yang dibangun Soekarno-Soeharto. Secara kebetulan, dua orang yang disebut terakhir, membangun kekuasaannya di atas landasan kultur yang feodalistik. Kini, kedua mesin kekuasaan itu telah berantakan dengan menyisakan sederet masalah yang sangat rumit dan pelik. Hampir-hampir bangsa ini meluncur ke tubir jurang kehancuran total, baik politik maupun ekonomi.

Pertanyaan yang mendesak kemudian adalah, *how to save the future of this nation politically, economically, and morally?* Jawaban sederhana yang dapat saya kemukakan adalah bahwa sistem kekuasaan wajib ditegakkan di atas landasan moral yang kukuh. Tanpa moral, kekuasaan pasti akan destruktif. Dalam perspektif ini, kekuatan moral bangsa tidak boleh menyerah pada mesin kekuasaan yang a moral. Untuk menguatkan fondasi moral, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan memberi

penguatan pada bidang pendidikan.

Pendidikan, Pencerdasan Otak dan Pencerahan Moral Bangsa

Harapan yang masih tersisa dari bangsa ini, sehingga bisa lepas dari berbagai krisis, mungkin juga adab, adalah dengan memperbaiki sistem pendidikan. Karena melalui pendidikan, anak-anak pemilik masa depan bangsa ini, diharapkan dapat belajar dari kesalahan yang diperbuat bapak-bapak mereka. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tentu saja seperti yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi *manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*.

Lagi-lagi, untuk melihat masalah pendidikan, moral, dan bangsa ini, saya ingin mengemukakan apa yang dikatakan beberapa pemikir Muslim. Al-Farabi misalnya, ia berpendapat, bahwa untuk suatu Negara Utama (*Madinah al-Fadhilah*), bentuk negara yang dicita-citakannya, ia mengharuskan adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dengan agama, perpaduan antara kecerdasan akal dengan keluhuran sifat-sifat kenabian (*al- 'Aqlu wa al-Nubuwwah*). Dikatakannya bahwa setiap warga negara harus memiliki kecerdasan akal yang dituntun oleh jiwa keagamaan.

Sementara itu Ibnu Sina menekankan pendidikan anak-anak dengan akhlak yang utama, supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi pemuda dan menjadi dewasa dengan sifat-sifat yang terpuji. Adapun Ibn Khaldun menginginkan

pertumbuhan individu yang cerdas dan bertanggung jawab, baik terhadap diri dan Tuhannya, terhadap keluarganya, dan terhadap masyarakat dan negaranya

Seirama dengan pemikir lain, al-Gazali mengatakan, betapa besarnya bencana yang akan menimpa dan mengancam hidup manusia apabila ilmu pengetahuan tidak memiliki moral. Ilmu pengetahuan tanpa moral inilah yang ia katakan sebagai *ethical-nihilism* atau *value-nihilism*. Pada hakekatnya, segala ilmu adalah terpuji (*mahmud*), demikian dikatakan al-Gazali. Tetapi, ilmu pengetahuan itu berubah sifatnya menjadi tercela (*mazmum*), kalau penggunaannya tidak lagi mengenal batas-batas moral dan peri kemanusiaan.

Sebuah kiasan yang menarik mengenai hubungan antara ilmu dan moral (akhlak) dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman, Schopenhauer. Menurutnyanya antara ilmu dan moral laksana seorang buta dan seorang lumpuh. Moral adalah seorang buta yang mempunyai tenaga tetapi tidak dapat melihat, sedang ilmu adalah seorang lumpuh yang dapat melihat tetapi tidak dapat berjalan. Jika keduanya hidup saling membantu, saling mengisi kekurangan masing-masing, maka dapat tercapai segala maksud yang diinginkan. Si buta yang kuat (moral) dapat berjalan dengan petunjuk si lumpuh (ilmu) yang berada di atas gendongannya.

Jalan untuk menghindari bencana-bencana kehidupan di atas, seperti dikatakan al-Gazali adalah melalui pendidikan. Mustafa Amien, dalam bukunya *Tarikh al-Tarbiyah*, mengutip kata bersayap yang disampaikan al-Gazali mengenai pendidikan: "Jikalau ibubapak mendidik anak-anaknya supaya terpelihara dari neraka dunia, maka memeliharanya dari neraka akhirat adalah

lebih perlu lagi, yaitu dengan mendidik, melatih, dan mengajarnya akan akhlak yang mulia”.

Pendidikan harus ditanamkan semenjak dini, dengan memperhatikan kepentingan jasmaniyah, aqliyah, dan khuluqiyahnya. Pendidikan harus mengarahkan pada tercapainya kesehatan jasmani, kecerdasan akal, dan pembentukan karakter dan moral. Dengan teori pendidikannya, al-Gazali mencita-citakan manusia-baru yang utama, manusia yang sehat jasmaninya, cerdas akalnya, dan anggun dalam perilaku moralnya.

Seiring dengan konsep di atas, akhir-akhir ini, pada dunia pendidikan kita telah dan sedang diperkenalkan gagasan tentang kurikulum yang berbasis kompetensi (*CompetencyBased Curriculum*). Kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Gordon, beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah aspek pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skills*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), dan minat (*interest*).⁸

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di atas mempertimbangkan prinsip-prinsip: (1) peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya, (2) keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika, (3) penguatan integrasi nasional, (4) perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi, (5) pengembangan kecakapan hidup (*life skills: personal skills*,

⁸ E. Mulyana, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, hal.38-39.

thinking skills, social skills, academic skills, dan vocational skills), (6) pilar pendidikan (*learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*), (7) komprehensif dan berkesinambungan, (8) belajar sepanjang hayat, dan (9) diversifikasi kurikulum.⁹

Gagasan ini bukanlah kreasi asli bangsa kita, melainkan disadap dari Barat yang diperkenalkan sejak 20 tahun lalu.

Tidak ada yang salah dalam penyadapan ini, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dengan tidak mengabaikan kondisi lingkungan setempat yang telah lama rusak. Penyiapan guru/dosen untuk merealisasikan gagasan ini harus dilakukan melalui perencanaan yang baik dan terukur.

Filosofi pendidikan kita dan kurikulum 2004 ini, jelas memberi porsi yang berimbang bagi konsumsi otak dan hati. Keberimbangan ini harus menjadi acuan dan referensi dalam proses pembelajaran dalam pendidikan kita. Karena yang diperlukan untuk pembangunan manusia pada masa-masa yang akan datang adalah agar filosofi ini menyatu dengan seluruh sistem pendidikan kita hingga dapat membentuk kepribadian bangsa yang utuh. Betapa mulianya apabila pendidikan kita betul-betul diarahkan untuk membangun manusia seutuhnya. Karena dimensi ini menyangkut proses pencerdasan otak dan pencerahan kalbu.

Kelemahan selama ini adalah karena kita sering berhenti pada tahap verbal, tidak menghujam ke lubuk hati yang terdalam. Akibatnya, kita tetap saja menjadi bangsa yang serbasuperfisial

⁹ Draft Kurikulum 2004: Kerangka Dasar, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2004, hal.2-3.

dan gagap. Di sinilah tantangan terbesar bagi dunia pendidikan kita, yaitu agar verbalisme tidak lagi menipu kita, hingga kita kehilangan sesuatu yang mendasar, yaitu kecerdasan dan kepekaan hati nurani.

Di samping itu, pencerdasan otak sebagai dimensi kognitif sudah lama tercemar oleh budaya politik yang serbahegemonik dan otoritarian. Akibatnya teramat parah, otak manusia Indonesia telah menjadi tawanan kepentingan politik sesaat melalui berbagai bentuk indoktrinasi yang melelahkan, jika bukan melumpuhkan.

Jika proses pencerdasan otak telah lama terbelenggu, proses pencerahan kalbu juga tidak kurang merananya. Ditemukan adanya sumbatan-sumbatan kuat yang menyebabkan tidak lancarnya aliran energi yang dapat memberikan pencerahan atas kalbu anak bangsa ini. Di satu pihak, pendidikan formal dan non-formal berusaha keras menjaga keberimbangan antara konsumsi otak dan hati. Mereka berusaha keras untuk menjadi panjaga-penjaga moralitas. Tetapi di lain pihak, tontonan yang disuguhkan setiap hari di panggung politik dan sinema elektronik kita, menyajikan tontonan yang dipenuhi kemunafikan, kerakusan, keserakahan, kekerasan, keseronokan dan takhayul.

Kalau saja kita punya kesempatan untuk duduk sejenak melihat sinetron yang menggambarkan dan melibatkan bidang pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, dan tinggi, sebagai seorang pendidik, kita akan sangat prihatin dengan gambaran-gambaran yang disajikannya. Di antaranya, kita akan menyaksikan profil guru atau dosen dengan penggambaran yang buruk. Belum lagi profil siswa dan mahasiswanya. Wajar saja kalau keadaan yang seperti ini mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Protes yang dilakukan terhadap beredarnya film layar lebar BCG (Buruan Cium

Gue), barangkali sebagai bagian dari puncak kegalauan ini.

Para pendidik haruslah menunjukkan kemampuan yang prima untuk melihat realitas moral bangsa yang gelap ini secara tajam. Para pendidik harus turut serta mencari solusi-solusi yang realistis dan arif agar dapat keluar secepatnya dari suasana kepengapan dan kegelapan ini. Departemen Pendidikan Nasional sebagai pengawal proses pencerdasan bangsa hendaknya lebih tanggap terhadap tuntutan bangsa ke depan. Pada saat yang sama Departemen Agama yang seharusnya berfungsi sebagai pengawal moral dan proses pencerahan bangsa, tidak malah menjadi pusat intrik politik golongan.

Menurut al-Gazali, sifat-sifat buruk yang melekat dalam diri seseorang harus dilawan dengan ilmu dan amal. Unsur pengetahuan ('ilm) sangat komprehensif. Ini menyangkut sifat dari tabiat buruk, penyebabnya, dan akibat yang merugikannya. Pengetahuan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh tabiat buruk ini harus demikian pasti. Pengetahuan seperti ini akan menimbulkan kebencian yang kuat pada sifat-sifat buruk tersebut. Melawan keburukan dengan pengetahuan ini, oleh al-Gazali disebut 'ilaj 'ilmi (obat kognitif).

Menurutnya, pengetahuan ini, akan punya efek pula terhadap muncul dan timbulnya keinginan untuk melawan penyebab tersebut dengan langkah-langkah amal. Beramal dengan tekun harus dilakukan untuk membuang pengaruh sifat-sifat buruk, sehingga akibat amal tersebut akan mengimbangi penyebab sifat-sifat buruk itu. Amalan ini juga harus berlawanan dengan perbuatan yang timbul dari sifat-sifat buruk itu. Penghapusan sifat-sifat buruk dengan bantuan perbuatan amal ini dinamakan al-Gazali sebagai 'ilaj 'amali (obat praktis).

Karena amal yang dilakukan bertentangan dengan kehendak nafsu seseorang, maka diperlukan kesabaran (shabr) yang tinggi. Memang tanpa kesabaran tidak mungkin ada penyembuhan. Kombinasi tiga unsur (arkan), yaitu ilmu, amal, dan sabar inilah yang akan dapat menghapuskan sifat-sifat buruk dalam diri manusia¹⁰

Ilmu inilah yang harus menjadi perhatian para guru dan dosen. Para guru dan dosen mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang masuk akal dan rasional tentang implikasi setiap perbuatan. Apakah perbuatan itu berimplikasi buruk atau baik, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Bagi Al-Gazali, rasio merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan di dunia ini dan dunia yang akan datang.¹¹ Melalui pendekatan yang ilmiah ini, seseorang diharapkan akan sampai dan mencapai kesadaran moralnya. Pendekatan semacam ini dapat dikatakan sebagai pengembangan moral yang bersifat kognitif. Ketika pikiran logis ini menyertai perbuatan setiap orang, insyaallah ia akan dapat mengontrol setiap perbuatannya. Karena itulah misalnya, ajaran Islam sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Niat, dengan sendirinya berarti adanya kesadaran atas perbuatan itu dan sekaligus menempatkan perbuatan itu di bawah kontrol Allah. Melalui niat, seseorang dengan demikian membangun kesadaran ketuhanan dalam setiap perbuatannya. Niat karena itu akan menjaga moralitas seseorang, itulah fungsi niat dalam setiap perbuatan.

¹⁰ M. Abul Quasem, *Etika Al-Ghazali*, Bandung: Pustaka, 1988, hal. 99.

¹¹ M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002, hal.114.

Akhirnya, tugas untuk melakukan pencerdasan otak dan pencerahan moral adalah tanggung jawab semua pihak. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama memang memiliki tanggung jawab untuk memikul amanat ini. Tetapi lebih dari itu, perilaku para elit politik dan juga karya para pekerja seni, harus mendukung bagi berkembangnya moral baik. Karena bagaimanapun, perilaku dan hasil kerja seni mereka merupakan pendidikan yang langsung ditatap, diserap, dan bahkan ditiru. Di akhir kata, kita tidak boleh menyerah pada kepengapan dan kebobrokan ini. *We must do something strategic and decisive now, or never!*.



MEMBANGUN SUMBER DAYA INSANI YANG CERDAS, ARIF DAN BERMORAL

Oleh: Dochak Latief

Pendahuluan

Sutan Sahrir pada tanggal 14 Agustus 1947 di PBB berpidato yang terkenal bagus, sehingga dikenal sebagai: *a. masterpiece of the art of noble diplomacy*. Padahal Sutan Sahrir hanya tamatan SMA, tanpa bekal Akademi Dinas Luar Negeri, atau seminar sekalipun (jangan lupa waktu itu di Indonesia sudah banyak juga sarjana-sarjana, priyayi atau dari rakyat). Mengapa Soekarno-Hatta dan sebagainya yang waktu itu masih sangat muda sudah cemerlang penuh keyakinan diri dan mampu meyakinkan para penguasa dalam pentas operasional perjuangan membela rakyat? Bila dibandingkan dengan mahasiswa sekarang yang seusia dengan mereka? Padahal dulu mereka hidup dalam iklim

masyarakat terjajah dan produk sekolah penjajah? Mahasiswa sekarang korban sistem pendidikan?

Dulu para perintis kemerdekaan dididik oleh penjajah, tetapi digenangi oleh jiwa humaniora dan dilandasi oleh penguasaan bahasa. Mengapa seluruh mutu pendidikan di Indonesia merosot dan murid-murid hanya dapat membeo dan sulit diajak berfikir, berjiwa eksploratif dan kreatif dalam keseimbangan yang integral? Mendiang YB. Mangunwijaya, memberikan beberapa alasan yaitu: bahasa dinomor duakan, dan jurusan bahasa hanya dianggap pantas untuk murid-murid bodoh. Hanya calon beo-beo siap pakai? Siap dipakai oleh... (YB. Mangunwijaya, Pendidikan Manusia Indonesia; Kompas 11 Agustus 1992). Demikianlah, sekedar ilustrasi mengawali tulisan ini. Beberapa nama tokoh yang disebutkan di atas, tentu saja belum bisa dianggap mewakili generasinya, karena mereka adalah tokoh pilihan. Namun secara sederhana mungkin bisa diakui, bahwa tamatan sekolah jaman dulu, sangat mementingkan bahasa Belanda, sebagai bahasa yang turut menentukan dapat bekerja atau tidaknya pada pemerintah Belanda. Selain bahasa, produk sekolah zaman dulu, pada umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi, sekalipun mungkin diartikan taat dan takut pada atasan. Perubahan masyarakat yang semakin cepat, akan selalu menimbulkan *problem*, diantaranya karena para guru adalah produk waktu kemarin, kemudian mereka mengajar dan mendidik anak didik masa kini, yang produk pendidikannya menjadi persiapan anak didik untuk hidup di masa datang. Karena itulah, manakala dunia pendidikan tidak mempunyai visi masa depan dengan proyeksi yang relatif tepat, kemungkinan produk pendidikan kita tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan

gagal mempersiapkan mereka untuk hidup dimasa datang.

Joel Arthur Barker mengingatkan kita agar mempunyai paradigma baru menghadapi realita. Model berfikir lama, orang baru berbuat sesuatu, berusaha memecahkan problem yang telah ada, tetapi sekarang orang harus mampu merencanakan dan berbuat sesuatu menghadapi problem yang mungkin terjadi diwaktu yang akan datang, berdasarkan prediksi, yang semakin tepat. Selanjutnya, Arthur Barker berpendapat, agar kita mampu berkiprah di tengah kehidupan abad 21, perlu memiliki tiga sifat penting yaitu: *anticipation, innovation, dan excellence*. Tanpa sifat-sifat tersebut dapat membawa kehancuran akibat terjadinya *paradigm shift* (Joel Arthur Barker:1993;11-30). Karena itu usaha membangun SDI yang cerdas, arif, dan bermoral bagi negara kita menjadi kewajiban kita bersama, khususnya keluarga, dan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan mutusaya kira sudah banyak disadari. Namun apa saja yang menjadi penyebab utama, penulis tidak mempunyai kompetensi untuk membahasnya secara tuntas, sehingga dalam pembahasan ini lebih diarahkan untuk membahas pentingnya Sumber Daya Insani (SDI) yang makin bermutu dalam masyarakat yang semakin yang maju, dan dunia yang sedang berubah semakin cepat dengan arah yang belum jelas. Diantara indikator tertinggalnya pendidikan kita, ialah terlihat pada penurunan angka HDI (*Humandevlopment Index*).

HDI Indonesia tahun 2002, masih di bawah HDI tahun 1996. Padahal sebenarnya HDI Indonesia antara tahun 1985-1990, lebih baik dari HDI Malaysia, Thailand dan Pilipina. Untuk perbaikan

HDI perlu anggaran mencapai Rp 50 trilyun (M. Chatib Basri, *Indonesia dalam Ceritera HDI 2002*, Kompas 27 Juli 2004). HDI Indonesia tahun 2003 menurut laporan UNDP, berada di urutan bawah, yaitu 112 dari total negara sebanyak 175. Urutan ini jauh di bawah Malaysia (58), Thailand (74), Pilipina (85), dan Vietnam (109). Dengan demikian, berdasar angka HDI ini, Indonesia lebih terbelakang diban dingkan dengan Vietnam. Dilihat dari urutan kualitas Perguruan Tingginya, menurut kriteria Majalah Asiaweek, antara tahun 1997-2000, dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut. Rangking Perguruan Tinggi Indonesia, diantara Perguruan Tinggi di Asia :

Perguruan Tinggi	Tahun			
	1997	1998	1999	2000
ITB	19	14	15	21
UI	32	59	70	61
UGM	37	49	67	68
UNAIR	38	61	79	75
UNDIP	42	64	77	73

Sumber : Asiaweek : The Best Universities In Asia. Mei 1998: 56-49; Asiaweek 23 April 1999: 60-62, dan Asiaweek edisi 30 Juni 2000.

Dari dua indikator tersebut, saya kita cukup untuk mengevaluasi situasi pendidikan di Indonesia, dibandingkan dengan beberapa negara Asia yang lain. Oleh karena itu persoalan yang kita hadapi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, memang sangat berat.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Insani (SDI)?

Penulis lebih condong menggunakan konsep Sumber Daya Insani (SDI) dibandingkan dengan konsep Sumber Daya Manusia

(SDM). Alasannya, karena SDM sebagai sebuah konsep berarti mereduksi konsep *insan / human*, yang menggambarkan manusia secara utuh sebagai makhluk Allah swt yang termulia (QS.17:70), sebagai ciptaan Allah yang terbaik (QS.95:4), mempunyai kemampuan yang hampir-hampir tidak terbatas (Qs.2:30) yang mampu melakukan berbagai pilihan dalam menimbang mana yang baik dan yang buruk (QS.91:8), dan Allah rnenundukkan segala ciptaan-Nya bagi manusia, yang mendapat amanah sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di bumi dan membawa kesejahteraan bersama. Kalau kita menggunakan konsep SDI, yang tergambar bukan sekedar manusia sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pengusaha, maupun sebagai konsumen yang bermartabat. Sedangkan SDM, menggambarkan manusia sebagai sumber ekonomi, atau faktor produksi, disamping alam dan modal. SDM merupakan konsep ekonomi liberal, dimana manusia menawarkan jasa, tenaga dan kemampuannya untuk dimanfaatkan oleh majikan, sedangkan sebagai imbalannya diberi upah. Itulah yang kemudian banyak menimbulkan eksploitasi SDM oleh majikan. Kalau perlu, demi efisiensi, SDM kedudukannya diganti dengan mesin teknologi.

Ternyata kesadaran akan pentingnya kedudukan SDI, telah secara jelas menjadi salah satu rumusan hasil Seminar Wakil-wakil Perguruan Tinggi se-Asia Pasifik di Manila 23-25 Juni 1997, yang dikenal dengan Deklarasi Manila, antara lain berbunyi: *"Higher education, we are convinced IS a key element indevelopment of the human power needed for the next millennium. For us, human resource development is first and at heart the development of the human person totally, socially, holistically (Manila Declaration,*

June 23-25, 1997). Sehingga manakala terjadi *problem* tenaga kerja, pendekatannya tidak semata dari segi ekonomis, melainkan pendekatan bersifat *integrative*: segi ekonomi, sosial, politik dan kemanusiaan pada umumnya. Eli Ginzberg, termasuk penulis yang berusaha melihat manusia sebagai tenaga kerja, bukan sekedar sebagai komoditi, tetapi melihat manusia dengan seluruh dimensi kehidupannya, termasuk keluarganya, latar belakang hidupnya, dan perilakunya.

Dikatakan bahwa manusia adalah partisipan yang aktif (berbeda dengan mesin, computer dan peralatan lain, perlu dihidupkan dan dimatikan) yang terlibat dalam berbagai peran: sebagai pekerja, sebagai warga negara, sebagai orang tua, sebagai seorang individu yang ingin mewujudkan tujuan pribadinya. Sekalipun upah dinaikkan, tetapi harus pindah ke tempat lain, belum tentu bersedia. Manusia tidak dapat diseragamkan keahliannya, seperti halnya mesin yang diproduksi secara massal, juga respon manusia terhadap suatu perlakuan tidak selalu sama, bahkan sulit diprediksi. Sebagian besar pekerjaan yang tergabung dalam suatu organisasi, tidak semata tertarik karena upah, tetapi terkait dengan keamanan pekerjaan, perkembangan ketrampilan, promosi, pensiun dsb. (Eli Ginzberg, 1976: 3-5).

SDI yang diidealkan dalam makalah ini ialah: Sumber Daya Insani yang cerdas, arif dan bermoral. *Cerdas* dalam bahasa kamus, berarti kemampuan berfikir secara tajam. Cerdas berarti sempurna perkembangan akal budi, cepat mengerti tentang sesuatu, dapat memecahkan masalah. *Arif*, berarti bijaksana, selalu menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan. Sebagai contoh, dalam memecahkan suatu perkara,

seorang hakim harus bertindak bijaksana, tanpa menyimpang dari hukum yang berlaku. Kearifan seseorang dibutuhkan untuk mengajar dan mendidikan anak. Kearifan berarti kecendekiawanan. Demikianlah beberapa pengertian dan contoh pemanfaatannya yang dapat kita lihat pada Kamus Bahasa Indonesia Populer, yang disunting oleh Dr. Anton Mulyono. Jadi kecerdasan banyak terkait dengan kemampuan berfikir, dan mernanfaatkannya untuk mengatasi problem dalam segala situasi yang dihadapinya, sedangkan *kearifan* lebih terkait dengan kebijakan menyelesaikan permasalahan secara tepat, berdasar ilmu yang luas, disertai hasil penelitian yang seksama, dilakukan dengan penuh empati dan ikhlas, sehingga bisa lebih tepat dalam penerapannya. *Bermoral*, berarti orang yang memiliki moral atau etika. Pengertian moral dan etika kerap kali dipakai secara bergantian dalam pengertian yang sama, karena pengertiannya sulit dipisahkan. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral berasal dari kata Latin *moralis*. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Namun kemudian berkembang menjadi banyak pengertian. Franz Magnis Suseno memberikan arti etika secara luas, yaitu keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan hidupnya, jadi dimana mereka menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana saya harus membawakan diri, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan mana yang harus saya kembangkan agar hidup saya sebagai manusia berhasil (Franz Magnis Suseno, 1984: 6). Ada yang berpendapat bahwa norma moral bersifat relatif, ada yang berpendapat bersifat universal. Saya mengikuti pendapat kedua, bahwa ukuran

baik buruk bersifat universal. Secara pribadi, selain mengikuti kebenaran universal, juga mendasarkan keyakinan agama Islam. Suatu perbuatan termasuk bermoral, berakhlak/*virtue*, syaratnya: niatnya benar, ikhlas karena Allah, dengan cara yang diperkenankan agama (halal), wujudnya bersikap yang baik, tutur kata, dan perbuatan yang bermanfaat, tujuannya mendapat ridha Allah SWT, sehingga selain bermanfaat bagi kehidupan, juga mendapat pahala dari Allah swt.

Beberapa karakter utama yaitu cerdas, arif, dan bermoral dalam wujud perilaku yang terintegrasi, dapat juga dirumuskan dengan caralain yang menggambarkan kualitas manusia Indonesia yang ideal, dengan ciri-ciri utama: kreatif-inovatif-adaptif dan fleksibel, tanpa kehilangan kepribadian Indonesia. Kualitas manusia Indonesia sebagai pewaris masa depan yang diharapkan mampu menghadapi kehidupan yang semakin rumit dan tidak menentu, meliputi:

- a. Memiliki kemampuan berfikir kreatif dan berfikir analitis. Berfikir kreatif dimaksudkan sebagai kemampuan menemukan ide-ide baru, atau mengkombinasikan ide-ide yang telah ada untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau yang lebih baik. Sedangkan ciri-ciri berfikir analitis, ialah berfikir imajinatif, logis, konsisten, serta berpandangan luas. Kedua kemampuan berfikir tersebut amat diperlukan secara serempak. Berfikir kreatif untuk memecahkan problem, sedangkan berfikir analitis untuk memutuskan macammacam kemampuan kreatif yang mana yang paling tepat dan baik (Colin Rose dan Nicholl, 1997: 191-192). Namun dalam masyarakat yang cenderung berorientasi kebersamaan, dapat merintang berfikir kreatif, dan menjurus pada sikap menyesuaikan diri.

Mereka umumnya takut berfikir sebelum menemukan bahwa temannya juga sedang berfikir hal yang sama. (E. Paul Torrance, 1963: 16-18). Seperti halnya Dr. Soedjatmoko berpendapat bahwa konformisme sebagai salah satu perusak kreativitas terbesar, oleh karena itu harus dihilangkan (Soedjatmoko, 1991: 99). Penyakit yang serumpun dengan kedua pendapat tersebut, oleh Larry Johnson disebut sebagai *The Kumbaya 5, vndrome*, yaitu suatu penyakit tidak terealisirnya kejujuran, akibat sistem pengambilan keputusan oleh sebuah *team management* yang memerlukan kesepakatan kolektif, hingga perlu saling menenggang. Oleh sebab itu mereka yang sebenarnya berkeberatan bila bersikap manis tidak konfrontatif, diartikan sebagai sikap kerjasama, dan sepakat atas keputusan yang diambil, yang mungkin tidak etis (Larry Johnson dan Bob Phillips, 2003: 4 dan 256-257).

- b. Mampu meningkatkan produktivitas kerja dalam arti *labor productivity*, maupun *multifactor productivity*. Hal itu diperlukan, karena akan dapat meningkatkan daya saing, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan menghemat sumber alam.
- c. Memiliki ilmu dasar yang luas serta ketrampilan kerja yang tinggi, sehingga dimungkinkan terciptanya ketrampilan baru menggantikan ketrampilan yang sudah tidak terpakai.
- d. Kesiapan belajar sepanjang hidup (*life long learning*) agar meningkatkan secara berkelanjutan.
- e. Fleksibel dan adaptif, yang keduanya diperlukan untuk menghadapi berbagai perubahan yang cepat.
- f. Moralitas yang baik bersumber pada agama yang diyakini sekaligus yang bersumber pada sistem nilai yang bersifat universal, yang dikenal dengan *The Golden Rule* yang

berintikan sikap hidup yang tidak menghendaki kerusakan atau kerugian orang lain dan mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Diyakini pula bahwa Sekolah berada digaris terdepan untuk mewujudkannya (Marianne Frostig, 1976: 182).

- g. Dari segi orientasi hidup, generasi muda diharapkan memiliki keseimbangan antara orientasi keberhasilan individual dan orientasi kebersamaan, sehingga selain mendorong seseorang mempersiapkan diri dan memiliki motivasi sukses hidup bagi diri sendiri diimbangi dengan sifat kekeluargaan atau kegotong-royongan masyarakat religius (Dochak Latief, 1997: 16-18). Mengenai kearifan, diharapkan tumbuh dari buah sifat-sifat tersebut, dengan pengalaman hidup yang lebih matang, selama sifat empati, siap melayani dengan penuh keikhlasan tetap ada pada diri seseorang.

2. Perlu Perubahan Budaya

Sebelum dilakukan reformasi fokus pengajaran hanya pada hafalan, siswa belajar hanya agar bisa menjawab soal saat ujian, yang oleh orang Cina disebutnya sebagai *gayatianya*, yang berarti: "mencekoki bebek". Kemudian Universitas Shantou, menawarkan cetak biru reformasi pendidikan, agar mahasiswanya "benar-benar termotivasi menjadi mahasiswa yang kreatif dan penuh rasa ingin tahu". Untuk itu mereka melakukan perubahan yang bersifat menyeluruh, dengan memperkenalkan metode pengajaran baru memperbaiki kurikulum, mendesain ulang kampusnya dengan biaya yang sangat besar, dan hal itu dapat terwujud karena mendapat bantuan besar dari salah seorang terkaya di dunia, Li Kashing, miliuner Hong Kong. Jadi masalah dana, termasuk

yang sangat berperan (Bruce Einhorn, *Reformasi Pendidikan*, Business Week, 7 September 2005: 53). Singapura mengusahakan terwujudnya semboyan "*I think therefore I earn*", hampir sepuluh tahun lalu, memerlukan anggaran lebih dari \$ 1 milyar selama 5 tahun, dalam rangka memajukan pemikiran yang inovatif dan berpikir *problem solving* di kalangan rakyatnya. Sebagian uangnya digunakan membuat *pilot* proyek di beberapa SMA di sana.

Bagaimana perubahan pendidikan di Indonesia, agar mampu merombak budaya sebagai bangsa yang lembek, atau semangat ongol-ongol istilah Prof. Dr. T.Yacob, setelah beliau melihat reaksi kita terhadap pencurian kayu, pencurian ikan oleh Muangthai, penyelundupan ke Singapura, serta perlakuan terhadap TKW di Saudi Arabia, baru beliau mengatakan bahwa semangat ketahanan nasional kita adalah semangat ongol-ongol. Kemudian menurut Prof. Dr. Kuntowijoyo, bangsa Indonesia adalah bangsa bermental "klien". Melalui modal dan produk, kita menjadi klien AS, Eropa, Jepang, Taiwan, Korsel, Singapura dan RRC. Melalui TKI dan TKW, kita menjadi klien Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Melalui TV, kita menjadi klien AS, Jepang, Amerika Latin, Taiwan dan India. Melalui utang, kita menjadi klien IMF, Bank Dunia, ADB, CGI, dan IDB. Presiden RI Tahun 2004-2009, harus bisa merubah bangsa klien menjadi bangsa mandiri.

Kalau salah urus, bisa menjadi bangsa kuli, menjadi bangsa gelandangan di rumah sendiri. Pak Kunto memberikan 4 ciri mentalitas bangsa klien: (1) Kompleks inferioritas. Belum merasa bangga, kalau belum membeli barang import, bergaya seperti orang Barat. (2) *Sindrom selebrity*, penyakit ingin serba terkenal. Dalam tayangan TV kita meniru Amerika, misalnya dengan American

Idol, tidak ingat bahwa kita masih termasuk bangsa yang melarat. (3) Mistifikasi (menganggap sesuatu sebagai misteri), seperti pedukunan, penggandaan uang dan sebagainya. (4) *Xenomania* / kegandrungan pada produk asing, sebagai pasangan inferioritas. Menurutnya ada persamaan antara bangsa terjajah dan bangsa klien. Keduanya mempunyai ketergantungan. Bangsa terjajah tergantung pada penjajah, mental klien tergantung pada patron. Bagi bangsa terjajah, secara nyata bisa melihat si penjajah. Bangsa klien tidak secara nyata melihat patronnya. Misalnya kapitalisme Amerika, kita hanya bisa ngebom Kedutaan Amerika, kantor IMF dan seterusnya, tetapi sebagai bangsa klien, tak bisa ngebom kapitalisme, sebab abstrak. Keduanya, penjajah maupun patron mempunyai kesatuan motif sendiri-sendiri, yang oleh Michel Foucault disebut *unities of discourse*, semua demi kemajuan (Prof. Dr. Kutowijoyo, *Kompas*, 23 Nopember 2004: "Mentalitas Bangsa Klien"). Dalam pidato Dies UNY yang disampaikan oleh Dr (HC) Taufiq Ismail tentang citra manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis, ciri-ciri mental negatif bangsa Indonesia menurut Prof. Dr. Kuntjaraningrat yang sekarang masih banyak melekat dalam diri kita.

Atas dasar penilaian itu semuanya, sebenarnya sekedar pengingat bagi kita semua, agar kita melakukan evaluasi diri tentang keadaan kita sebagai bangsa, yang kualitas dan harga dirinya telah terpuruk, lebih lagi kalau menyadari bangsa kita sebagai bangsa yang peringkat korupsinya sangat parah. Dalam catatan *Transparency International* (TI) selama 6 tahun tidak pernah merangkak naik dari urutan ketiga sampai kelima dari bawah, diantara negara yang paling korup, kecuali tahun 2003. Hal ini dapat kita lihat dari daftar sebagai berikut :

Peringkat Korupsi Indonesia

Tahun	Skor	Peringkat
1998	2.0	80 dari 85 negara *
1999	1.7	96 dari 99 negara *
2000	1.7	85 dari 90 negara *
2001	1.9	88 dari 91 negara
2002	1.9	96 dari 102 negara*
2003	1.9	122 dari 133 negara**

* Sumber Forum Keadilan, No.30, 17 Nopember 2002, hal. 50 ** Jawa Pos, 8 Oktober 2003

3. Usaha —usaha Membangun SDI Yang Diidealkan

Dengan gambaran kualitas SDI di Indonesia yang sedemikian parah, baik dilihat dari segi kecerdasan, kearifan, maupun moralitas sebagai individu, keluarga maupun sebagai bangsa, sehingga memerlukan usaha yang bersifat drastis dan menyeluruh, untuk memperbaikinya .

Dalam kesempatan ini hanya akan disampaikan usaha-usaha penting, namun bersifat makro dan secara garis besar.

- a. Untuk mengawali setiap perubahan, diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya ada kesadaran keadaan did kita sekarang ini, diarahkan kemana perubahan tersebut, siapa penanggungjawab utamanya, konsekwensi prasarana dan sarana minimal yang diperlukan, sumber potensial biaya, kemungkinan hambatannya, dan bila mungkin ada yang menjadi modelnya. Di segala bidang, negara kita memerlukan

perombakan secara cepat dan menyeluruh, mengingat hampir semua negara juga mengalami perubahan sangat cepat. Jason Jenning berpendapat: *it's not the Big that eat the small ...it's the Fast that eat the Slow*. Selanjutnya dia mengatakan, kemampuan berfikir cepat dan bertindak cepat akan memperoleh keuntungan yang bersifat komparatif. Bukan bertindak cepat akibat keterkejutan atau tergepoh-gopoh (Jason Jenning & Laurence Harighton; 2002: xiii-xiv). Karena itu, suatu hal yang wajar, bila Indonesia dengan penduduk mencapai sekira 215 juta, dengan kekayaan alam, dan tanah yang subur tetap tertinggal, dengan negara yang kecil seperti Singapura. Sedangkan Cina dengan jumlah penduduk sekitar 1.300 juta orang, dengan SDM yang semakin baik, pemerintahan yang semakin bersih, mampu tumbuh sekitar 10 % per tahun, selama lebih 10 tahun terakhir ini. India dengan penduduk sekitar 1 milyar orang, sedang berlomba dengan Cina mengembangkan negara mereka masing-masing. Saya kira tidak ada salahnya, kita mencontoh Cina yang telah mampu merubah situasi korupsi yang parah, menjadi semakin terkikis, dan dorongan kuat untuk mampu menggeser peran negara yang lebih maju. Zhu Rongji ketika dipilih menjadi Perdana Menteri menggantikan Li Peng 17 Maret 1989, dia menyodorkan 9 butir kebijakan, dengan ambisi ingin menggeser Jepang yang lebih maju sebagai berikut :

- (1) Mengakhiri ekonomi pasar sosialis menuju ekonomi pasar bebas.
- (2) Merestrukturisasi BUMN agar lebih efisien.
- (3) Merampingkan struktur dan sistem pemerintahan.
- (4) Membangun konglomerat terinspirasi Chaebol di Korea Selatan.
- (5) Merombak sektor keuangan untuk memperkokoh dan menghilangkan kredit macet.
- (6) Mereformasi bank sentral

dengan melakukan merger dan mengurangi campur tangan pemerintah daerah. (7) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi (pertumbuhan ekonomi tetap tinggi). (8) Mengendalikan nilai tukar dan tidak akan mengevaluasi Yuan. (9) Membawa Cina bergabung dengan Organisasi Dunia (WTO). (Kompas, 18 Maret 1998: Cina Berambisi Menggeser Jepang). Ternyata, sebagian besar ambisinya bisa tercapai. Prof. Dr. T. Jacob mengingatkan, siapa bekerja lambat dan bereaksi lamban akan melahirkan keterbelakangan yang permanen, dan ini adalah gejala awal kepunahan sebagai bangsa. (T. Jacob, Memajukan Perguruan Tinggi di Abad XXI, makalah di UMS, 9 Agustus 2003). Untuk melakukan perubahan, lebih-lebih bila ingin cepat dan menyeluruh, diperlukan kepemimpinan yang transformatif, yang berwibawa dan berani melakukan *creative distruction*, menghancurkan nilai-nilai hidup dan praktek-praktek perilaku yang merusak, seperti penyelenggaraan pemerintahan yang lamban, boros, korupsi meraja lela di hampir semua sektor kehidupan, dan menggantinya dengan nilai-nilai baru yang diidealkan. Keberhasilannya memerlukan dukungan para elit baik mereka yang termasuk para cendekiawan, birokrat dan orang-orang yang kaya, agar dalam melancarkan perubahan dapat berhasil. Perubahan ini bersifat structural, dalam arti perlu otoritas serta prasarana dan sarana yang diperlukan, namun proses pelaksanaannya demokratis, sehingga diwujudkan atas dasar kesadaran bersama. (Philip Kotler & Hermawan Kartajaya, 2000: 48-49). Bila ingin merubah budaya korupsi menjadi budaya bersih, budaya jujur dan amanah, tentu saja diperlukan proses pembelajaran, yang hasilnya bersifat jangka panjang melalui jalur pendidikan, yang melibatkan seluruh masyarakat.

- b. Menurut Philip Comb, pada hakekatnya belajar bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Artinya bisa terjadi di lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Bahkan menurut saya, pengaruh pendidikan di luar jalur pendidikan formal mempunyai pengaruh lebih besar dari pendidikan formal. Sebagai contoh, betapa besarnya pengaruh TV bagi pendidikan anak maupun masyarakat pada umumnya. Ternyata Indonesia, termasuk bangsa yang TV "*Clutter*" nya paling tinggi di dunia. Yang dimaksudkan dengan TV *Clutter*, ialah banyaknya rata-rata jumlah iklan TV yang dilihat oleh rata-rata orang per minggu. Pada tahun 2003, Indonesia TV *clutter* (852), baru diikuti AS (617), Meksiko dan Cina masing-masing 686, dan 671. Padahal TV *clutter* dunia rata-rata hanya 561. (Kompas, 28 September 2004, Iklan di media massa, dibenci dan dicintai). Karena itu, tidak salah apa yang disampaikan Prof. Dr. Kuntowijoyo, bahwa bangsa Indonesia bermental klien. Mampukah kita memperbaikinya?. Mampukah kita memberikan saran pengelola TV untuk memperbaiki isi tayangannya, agar lebih bersifat mendidik? Mutu pendidikan harus mampu ditingkatkan, mulai tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. SD merupakan persemaian anak didik, untuk dikembangkan seluruh potensinya menghadapi tingkat pendidikan lebih lanjut. Untuk itu diperlukan perubahan yang menyeluruh. Sejak anak-anak tamat SD, perlu memperhatikan benar mutu tiap komponen dalam pendidikan, sejak dari anak didiknya, prasarana dan sarannya, termasuk guru/dosen, proses belajarmengajarnya, model evaluasinya, penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Tiga hal yang ingin ditekankan dalam kesempatan ini, yaitu faktor siswa/mahasiswa, guru/dosen dan proses belajar

mengajarnya. Para pendidik umumnya mengetahui bahwa yang namanya belajar, pada hakekatnya apapun usaha yang mampu membawa perubahan tingkah laku anak didik yang relatif bersifat permanen, pengetahuan, pengalaman, pemahaman, ketrampilan yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan sekitar.¹) Variable anak didik, siswa/mahasiswa jangan dibiarkan pasif, seperti kita mencekoki bebek. Untuk itu perhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan belajar mereka.

- c. Menurut A. Endang Tatiana, potensi internal anak didik meliputi: (1) Potensi kecerdasan/potensi akademik. (2) Motivasi berprestasi. (3) Minat/kecenderungan perasaan suka atau tidak suka, terhadap hal-hal tertentu. (4) Kebiasaan belajar, mencakup keteraturan dan strategi belajar, memanfaatkan waktu yang efektif dan efisien. (5) Keadaan emosi, rasa takut dan cemas dalam keadaan tertentu dapat mendorong prestasi akademik. (6) Faktor fisik (rasa lelah, kondisi ruangan, pencahayaan dsb).

Adapun yang termasuk faktor-faktor eksternal, meliputi: (1) Faktor sosial ekonomi, dan sosial *cultural*, seperti pendidikan orang tua, pekerjaannya, taraf hidupnya. (2) Faktor yang terkait dengan proses belajar mengajar, seperti kurikulumnya, gurunya, fasilitas belajarnya, interaksi antara guru-siswa, dan antar siswa, serta metoda mengajarnya. (3) Faktor sosial di lingkungan sosial, terutama hubungan antar warga dalam lingkungan sekolah. (4) Faktor situasi yang lain, misalnya tempat tinggal siswa, pergaulannya dan sebagainya. Oleh sebab itu, bila suatu lembaga pendidikan ingin sukses meningkatkan kualitas akademiknya, perlu semuanya itu diperbaiki. Dalam kenyataan sekarang, saya

melihat gejala semangat belajar siswa/mahasiswa yang relatif rendah. Saya kira salah satu penyebabnya, di kalangan siswa dari SD sampai SLTA, karena ada kesan semuanya akan lulus. Kalaupun mereka belajar baik, terutama bagi mereka yang ingin berprestasi/lulus dengan baik. Sedangkan di kalangan mahasiswa, umumnya mereka frustrasi. Mereka telah melihat realita, sekalipun mereka lulus cepat dan IP nya baik, toh akan sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan tidak jarang mahasiswa MM/S2 hanya sekedar belajar, dari pada lulus S1 tetapi masih menganggur. Jadi mereka belajar sambil mencari pekerjaan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Bagaimana dorongan mereka meningkatkan kualitas akademiknya? Penulis belum mampu membuat perkiraan.

- 2). **Kualitas dan nasib guru/ dosen, saya kira kita telah banyak diketahui.**
- 3) **Yang terakhir terkait dengan proses belajar mengajar, tentu perlu mendapatkan perhatian yang semakin serius.**

Adapun usaha memperbaiki kearifan moralitas, terkait dengan kurikulum dan proses belajar mengajarnya, karena terkait dengan penanaman nilai-nilai hidup. Menurut Dr. J. Reberu, pendidikan nilai memerlukan pertahapan sebagai berikut : (1) Mula-mula diupayakan pemilikan pengalaman nilai/pengalaman suatu peristiwa kongkrit, atau nilai-nilai yang memukau para peserta didik. (2) Peserta didik mulai tertarik, kemudian mulai berfikir/ merenungkan peristiwa-peristiwa yang bermuatan nilai. (3) Barulah kemudian mereka menghargai dan menerima nilai-nilai sesuatu yang penuh makna dalam hidupnya. (4) Peserta didik bertekad menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Barulah peserta didik akan dapat mengendalikan

perilakunya berdasarkan nilai-nilai hidup yang diyakini. (DR. J. Riberu, 1982).

Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, setidaknya mengharapkan apa yang saya sampaikan menjadi salah satu bahan awal usaha memperbaiki kualitas SDI Indonesia, yang masih sangat meprihatinkan.

Sekian, Wassalamu Alaikum w.w.

Yogyakarta 14 September 2005

Penyusun Dochak Latief

Daftar Kepustakaan

- Barker Joel Arthur, 1992. *Paradigms*. New York: Harper Business A Division of Harper Collins Publishers.
- Chatib Basri. M , 2004. "*Indonesia da/am Ceritera HOT* .Kompas 27 Juli.
- Dochak Latief, Prof. Drs., 1997. " *Pendidikan Ekonomi dan Kua/itas Manusia Indonesia Pada Era Persaingan G/oba/"* Pidato Pengukuhan Guru Besar, Senat terbuka IKIP Yogyakarta, 4 Oktober.
- Endang Tatiana A dan Budi W. Soetjipto, 2005. "*Model Prestasi Akademik Mahasiswa: Potensi Akademik dan Gaya Belajar.*" Manajemen Perusahaan Indonesia, NO.03/Th.)00.IV April.
- Ginzberg Eli, 1976. *The Human Economy*. New York: McGraw-Hill Book Company Jacob.T. Prof. Dr. 2003 : Memajukan Pendidikan Tinggi Di Abad XXI". Makalah di UMS 9 Agustus
- Johnson Larry & Bob Phillips, 2003. *Absolute Honesty* .New York: AMACOM American Management Association
- Kompas, 18 Maret 1998. "*Cina Berambisi Menggeser Jepang*".
- Kompas, 28 September 2004. "*Iklan di Media Massa Dibenci dan Dicinta*

- Kotler Philip & Hermawan Kartajaya, 2000: *Repositioning Asia*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.
- Kuntowijoyo Prof.Dr., 2004. " *Mentalitas Bangsa* Klllevf.Mompas 23 Desember.
- Marriane Frostig, 1971. *Education for Dignity*. New York: Grune & Straton.
- Riberu. J. DR, 1982. *Dasar-dasar Kepemimpinan*. Jogjakarta: LEPPENAS.
- Rose, Colin & Malcolm Nicholl. J, 1997. *Accelerated Learning for The 21 st. Century*. New York: Delacorte Press.



BUDAYA DEMOKRASI DAN MASA DEPAN BANGSA *

Oleh: Zamroni **)

Perkenankanlah terlebih dahulu saya menyampaikan terimakasih kepada bapak Sardiman MPd, dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi beserta segenap jajarannya yang memberikan kesempatan pada diri saya untuk menyampaikan orasi ilmiah berkaitan dengan kultur demokrasi dan masa depan bangsa pada pagi hari ini. Sungguh ini merupakan kehormatan bagi diri saya.

Hadirin Hadirot yang terhormat,

Demokrasi seringkali dikaitkan dengan masyarakat Barat yang memiliki budaya demokrasi. Masyarakat Baratlah yang lebih mudah dan berhasil menapak jalan demokrasi. Lihatlah

*Disampaikan dalam kegiatan Dies Natalis FISE yang ke-41 Tahun 2006

**Direktur Profesi Pendidik Depdiknas

keberhasilan Jerman Timur yang pindah jalur dari sistem politik otoriter ke jalan demokrasi dalam waktu yang amat cepat. Bahkan bangsa-bangsa yang ada di pinggiran masyarakat Barat, seperti Hungaria dan Polandia yang juga menapak jalan demokrasi sejalan dengan tumbanganya Soviet Uni berhasil dan tengah melakukan konsolidasi demokarsi mereka. Sebaliknya Negaranegara di lain bagian dunia ini, negara-negara di Amerika Latin, Asia dan Afrika banyak mengalami kegagalan dalam pengembangan sistem politik yang demokratis. Keberhasilan bangsa-bangsa di Eropa ini merupakan bukti yang mendukung tesis pentingnya budaya dalam membangun kehidupan politik suatu bangsa yang demokratis. Tesis peran budaya demokrasi dalam demokratisasi telah dikemukakan oleh para tokoh pemikir politik, mulai dari Max Weber sampai tokoh masa kini, Robert Putnam, Lawrence Harrison, Francis Fukuyama, dan Samuel Huntington. Kini tesis ini merasuk kesemua aspek kehidupan masyarakat, sehingga mulai dari konsultan bisnis sampai ahli strategi militer senantiasa menjelaskan persoalan yang dihadapi dengan “budaya bangsa” sebagai landasan analisis: Mengapa bangsa-bangsa di Afrika terjebak dalam kehidupan panjang yang penuh dengan kemiskinan? Jawabnya karena budaya mereka yang menekankan pada kekerasan sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan. Mengapa ekonomi bangsa Amerika mengalami pertumbuhan yang menakjubkan? Jawabnya adalah karena munculnya kultur wiraswasta yang khas Amerika. Mengapa Rusia gagal mengetrapkan sistem kapitalis? Jawabnya karena masyarakat Rusia adalah feodal dan memiliki kultur anti pasar bebas. Mengapa PSSI tidak juga menangmenang? Jawabnya

karena masyarakat Indonesia terjebak kultur yang penuh kecurigaan satu dengan yang lain, tidak memiliki *trust* saling percaya mempercayai, termasuk diantara para pemain dalam menjebol gawang lawan. Theses budaya ini juga bisa untuk menjelaskan keberhasilan dalam kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Simaklah pomeo berikut: “Jika ingin berhasil dalam kehidupan dunia ini jadilah: Yahudi atau India, apalagi Cina”. Sebagian besar kaum industrialis Amerika adalah Yahudi, sehingga meski jumlahnya kecil kaum Yahudi menguasai kehidupan politik Amerika Serikat. Kecuali Presiden Carter, hampir semua presiden AS bisa menjadi presiden terkait dengan dukungan lobby Yahudi. Orang-orang India menguasai perkenomian di banyak Negara di Asia dan Afrika. Demikian pula Cina, di Pilipina penduduk Cina hanya sekitar 1 % tetapi menguasai 60 % dari kekuatan ekonomi swasta termasuk memiliki empat maskapai penerbangan dan menguasai hampir semua bank, hotel dan pusat perbelanjaan, serta konglomerasi industri. Di Indonesia, penduduk Cina hanya sekitar 3 % tetapi menguasai sekitar 70% kekuatan ekonomi swasta. Di Burma (Myanmar) ekonomi dikuasai oleh etnis Cina yang juga minoritas di negeri ini. Hampir seluruh kehidupan ekonomi dikendalikan oleh etnis ini (Chua, 2004). Hal ini barangkali yang menyebabkan meski diboykot oleh dunia bebas, ekonomi Myanmar tetap bisa tumbuh, termasuk Yunta Militer (*The State Law and Order Restoration Council*), bisa bertahan meski mendapatkan tekanan baik dari dalam maupun dari dunia internasional.

Saudara-saudara yang berbahagia,

Benarkah thesis tersebut, bahwa kultur suatu masyarakat atau bangsa menentukan keberhasilan bangsa atau masyarakat

tersebut? Jawaban atas berbagai persoalan yang dipusatkan pada kultur suatu bangsa atau masyarakat atau kelompok tersebut diatas merupakan jawaban yang amat disederhanakan. Kultur Cina yang menguasai ekonomi di banyak negara, mengapa ekonomi RRC sendiri belum juga mencapai tingkat sebagaimana yang diinginkan. Baru beberapa tahun terakhir setelah Cina membuka ekonominya, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau kultur Yahudi mendorong kemajuan, mengapa negara Israel sendiri tetap miskin, hanya dapat tetap hidup karena topangan ekonomi Amerika Serikat? Kalau kultur India menentukan kemajuan, mengapa sebagian besar rakyat India sendiri masih terjerat dalam kemiskinan? Kalau kultur wiraswasta yang dimiliki bangsa Amerika menyebabkan ekonomi tumbuh menakjubkan, mengapa terjadi bencana *stagflation* dan *great depression* tahun 1930-an? Kalau kultur feodal menghalang-halangi pelaksanaan ekonomi pasar bebas, mengapa Jepang yang memiliki kultur feodal yang amat kental berhasil mengambil alih sistem ekonomi kapitalis? Sudah barang tentu ada sesuatu dibalik kultur bangsa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bangsa tersebut dalam menapak ke jalan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat dan bangsanya.

Hadirin dan hadirot yang terhormat,

Cultur memegang peran penting bagi proses demokratisasi dan pembangunan suatu bangsa. Namun kultur bukan sesuatu yang sederhana bersifat hitam putih dan linier. Melainkan, kultur, sesuatu yang kompleks, sehingga seseorang dapat menemukan apa yang memang diinginkan. Sebagai contoh seratus tahun yang lalu Max Weber menyatakan bahwa negara-negara Asia Timur

tertinggal dalam pembangunan, karena kultur yang bersumberkan Konfusioneisme tidak mendorong kerja keras sebagaimana diperlukan dalam system kapitalis. Tahun 1990-an, manakala banyak “macam” bangkit di Asia Timur, dikatakan karena pengaruh kultur yang bersumberkan Konfusioneisme, karena nilai-nilai Asia yang cocok dengan semangat kapitalisme.

Hadirin hadiroth yg berbahagia,

Pada dasarnya, setiap masyarakat atau bangsa menginginkan suatu kehidupan yang demokratis. Persoalannya adalah bagaimana mengembangkan kehidupan yang bersifat demokratis tersebut. Teori tentang bagaimana demokrasi atau demokratisasi sangat terkait dengan “nuansa idiologi atau pengalaman lokal”, sehingga aplikasi dalam proses demokratisasi yang berhasil di suatu negara apabila diaplikasikan di negara lain cenderung menimbulkan teori demokratisasi yang tidak cocok dengan kondisi realitas suatu bangsa yang memiliki kultur berbeda. Akibatnya, resep demokratisasi memberikan arah jalan yang salah. Lebih jauh, hasilnya, bangsa tersebut terjebak dalam krisis yang bekepanjangan. Oleh karena itulah dikatakan jalan demokrasi adalah kompleks, panjang dan bersifat dinamis sehingga hasil akhir bersifat terbuka tidak dapat diprediksi (Whitehead, 2002).

Marilah secara sepintas kita lihat bagaimana proses demokratisasi yang terjadi di berbagai negara di Eropa, sebelum kita lihat bagaimana proses di Indonesia. Demokratisasi di Inggris berlangsung relatif lancar dengan fondasi kultur masyarakat yang bersifat aristokrat. Para bangsawan yang sudah muncul diperbagai daerah dengan wilayah kekuasaan masing-masing menarik pajak dari penduduk dan sekaligus memberikan perlindungan kepada

mereka. Hubungan antara penguasa aristocrat dan rakyat muncul secara harmonis. Revolusi yang terjadi di Inggris tahun 1688 memperkuat kedudukan dan peran kaum aristocrat. Kekuatan kelompok aristokrat ini justru menghindarkan kekuasaan mutlak dari kalangan agamawan ataupun kemudian dari pihak monarki. Oleh karena itu, pemerintahan di Inggris kala itu muncul dalam bentuk, kekuasaan raja, kekuasaan agamawan, kekuasaan kaum aristokrat (*House of Lords*) dan kekuasaan rakyat (*House of Commons*). Semenjak pertentangan dengan Gereja Katolik Roma, Inggris menjadi negara agama, dimana raja sekaligus merangkap sebagai pemimpin agama.

Pertentangan antara Protestan dan Katholik Roma membuka jalan lahirnya kebebasan individu. Jalan kebebasan hak-hak individu ini diperkeras dengan munculnya kapitalisme, yang menyebabkan berbagai tembok perbedaan yang muncul diantara agama dan negara, berikut kekuasaan raja, aristokrat, dan rakyat runtuh. Gerakan kapitalis mulai menghancurkan feodalisme dan monarki yang mendasarkan segala sesuatu dari hubungan darah. Sebagai hasil gerakan ini munculah kelas baru kelas usahawan yang memiliki dinamika, inovasi, dan menjunjung kebebasan. Kekuatan inilah yang mengantarkan Inggris sebagai bangsa yang modern dan demokratis, tanpa harus meninggalkan masa lampau mereka. Para aristokrat penguasa tanah melakukan industrialisasi atas tanah pertanian mereka menjadi kekuatan ekonomi kelas menengah. Para aristokrat ini, oleh karena itu menjelma menjadi kelas burjuis, yang memiliki peran menggerakkan ekonomi bangsa. Kaum borguis inilah yang sesungguhnya menggerakkan demokratisasi di Inggris, mereka masuk dan menguasai *House of Commons*.

Berdasarkan pengalaman demokratisasi di Inggris inilah, Political scientist dari Harvard University, Barrington Moore, Jr., suatu ketika mengatakan: *“No bourgeoisie, no democracy”*.

Hadirin hadiroth yang berbahagia,

Amerika Serikat merupakan bangsa yang memegang teguh semangat dan yakin betul terhadap demokrasi. Hal ini tidak aneh karena bangsa Amerika merupakan bangsa pendatang yang datang dari berbagai bagian daratan Eropa dengan segala perbedaan yang menyertainya. Mereka memiliki berbagai perbedaan yang menyebabkan diantara mereka berusaha saling memahami, menerima dan memberi. Sistem dan semangat demokrasi cocok untuk menjaga kehidupan bersama diantara mereka. Kedatangan mereka ke Amerika, diperingati dengan Thank Givings, kegiatan yang “berbau keagamaan” khas AS dimulai sebulan sebelum Natal, yakni 25 November, sebagai tanda rasa bersyukur kepada Tuhan yang telah mengantarkan mereka mendarat di tanah harapan masa depan ini. Namun tidak demikian, bagi penduduk pribumi Amerika yakni Indian. Kedatangan pendatang penduduk dari Eropa, ini justru menjadi malapetaka bagi mereka, terusir atau terbunuh dari tanah air mereka.

Sejarah perkembangan demokrasi di AS, tidak dapat dilepaskan dari sejarah ini, yang melahirkan kecenderungan membangun demokrasi dengan mengabaikan kebebasan. Lihatlah, bagaimana demokrasi di AS disertai dengan perbudakan dan *racialist* terhadap kulit hitam, khususnya. Amerika Serikat di bagian Selatan mereka berdemokrasi tetapi sekaligus juga mengesahkan hak-hak pemilikan atas budak. Perbudakan akhirnya hilang di bagian selatan, bukan karena undangundang

tetapi karena serbuan pasukan AS bagian Utara. Pada era modern ini, meski di AS sudah ada *Civil Right Act* tahun 1964, tetapi tetap saja masih ada segregasi antara orang hitam dan putih. Pada tahun 1970 di Florida, kalau orang hitam minum dari pancuran atau kran minum umum, tidak boleh langsung melainkan harus ditampung dulu melalui cangkir atau gelas. Sebaliknya, untuk orang kulit putih bisa langsung minum air tersebut dari kran langsung ke mulut. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi di AS bercampur dengan tragedi dan anti demokrasi. Dan, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau pada perkembangan berikutnya, demokratisasi yang digerakan oleh AS ke berbagai negara yang dianggap terbelakang, tidak jarang diikuti dengan berbagai penyerbuan, terakhir di Irak. Kebijakan *Pre-emptive Strike* yang disahkan oleh lembaga legislative AS merupakan contoh yang mendukung kecenderungan ini.

Di Jerman terdapat persaingan antara dua sistem politik yang kuat mengakar di masyarakat: *Liberalism* dan *Populist Authoritarianism*. Di bawah Otto Van Bismarck Jerman sudah dikendalikan dengan sistem politik liberal dengan semangat yang sangat progresif, nasionalistik, patriotik. Bismarck memiliki pendirian bahwa masyarakat akar rumput akan pro dengan Monarchi, sebaliknya kaum elit perkotaan akan anti monarchi.

Peristiwa kehancuran ekonomi berupa *stagflation and great depression* yang melanda Amerika Serikat menjalur sampai benua Eropa, termasuk Jerman mengalami goncangan yang menimbulkan kebingungan, frustasi keputusan di kalangan warga masyarakat. Order politik akhirnya runtuh kehilangan legitimasi. Dalam kondisi sedemikian ini, dimana kebingungan, frustrasi dan keputusan

melanda masyarakat luas, demokratisasi politik di Jerman mengantar Hitler ke tampuk penguasa Jerman. Hitler menjadi penguasa bukan karena *kup de e tat* atau “pemilu buatan”, melainkan lewat pemilu yang bersih. Hanya dalam waktu 11 tahun, partai Nazi pada pemilu tahun 1930 menjadi pemegang ke dua dengan suara 18 %. Pada tahun 1932 Jerman mengadakan dua kali Pemilu, dan Partai Nazi berada pada urutan pertama dengan meraup suara 37 % dan 33 %. Partai Sosial demokrat berada pada posisi ke 2 dengan suara 21 % dan 20 %. Pada Pemilu tahun 1933 partai Nazi mendulang suara sebesar 44 %, sama dengan jumlah suara urutan ke 2, 3 dan ke 4 digabung. Partai Nazi diminta untuk menyusun pemerintahan. Sebagai pelajaran perlu dicatat, kemenangan partai Nazi sebagai partai nasionalis dan progresif tidak lepas dari kondisi bangsa Jerman setelah ditimpa krisis ekonomi tahun 20-an dengan depresi dan hiperinflasi yang luar biasa menyebabkan lembaga tradisional pemerintah kehilangan kredibilitas. Kampanye partai Nazi yang menyuarakan retorika yang ekstrem *ultra nasionalist* dan diorganisir menyebar ke seluruh daerah, berhasil menarik kalangan masyarakat khususnya para golongan menengah. Muncul dikalangan masyarakat harapan bahwa Hitler dengan partai Nazi nya akan mampu melahirkan kepemimpinan yang lugas dan negara menjadi kuat kembali.

Jerman tidak memiliki sejarah panjang dalam menegakan demokrasi sebagaimana dialami oleh Inggris. Inggris banyak dipengaruhi oleh perilaku kaum burjuis yang lahir dari revolusi industri dan berkembang baik pada era perdagangan bebas dan pemilikan hak-hak pribadi serta perang terhadap kekuasaan feodal. Akhirnya kaum burjuis memenangkan

pergulatan ini dan mengembangkan negara sebagaimana meraka impikan: memiliki watak komersial, semangat untuk memiliki sesuatu sangat tinggi, mobilitas sosial tinggi dan dinamis. Sebaliknya Jerman, industrialisasi tumbuh karena peran pemerintah dalam ujud regulasi, subsidi dan tarif. Akibatnya kelas burguis amat lemah, terpecah belah, dan memiliki mental untuk menghambakan diri para penguasa. Mereka para wiraswasta Jerman cenderung lebih bangga memperoleh penghargaan dari pemerintah dari pada memiliki prestasi business. Hal ini juga akhirnya menimbulkan tradisi bangsa Jerman sangat kuat terhadap birokrasi. Mereka memiliki kebanggaan untuk menjadi birokrat. Tetapi tradisi ini ternyata menguntungkan bagi bangsa Jerman. Karena kekuatan birokrasi, maka tanggung jawab negara yang menyangkut keperluan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana sosial dapat di laksanakan dengan baik sampai masa kini. Bangsa Jerman telah berhasil mengubah arogansi birokrasi menjadi instrumen untuk melayani masyarakat, dan Jerman menjadi *Welfare State* yang pertama.

Jalan menuju pemerintahan demokratis bangsa Perancis lain lagi. Berbeda dengan negara-negara Eropa pada umumnya, Perancis tidak memiliki karakteristik pemerintahan kaum burguis, seperti *rule of law*, kesamaan derajat di depan hukum, hak-hak kepemilikan pribadi, perdagangan bebas, dan dan hak-hak dan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, bangsa Perancis mengambil jalan demokrasi dengan sama sekali tidak memiliki tradisi konstitusi liberalisme. Kemerdekaan diproklamkan lebih banyak bersifat teoritis dari pada implementatif, seperti suatu pemisahan

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan mengembangkan kekuatan di luar negara, seperti kalangan *business*, gereja yang bebas dan masyarakat sipil.

Revolusi Perancis telah berhasil mentransfer kekuasaan absolut raja ke tangan rakyat dalam bentuk Majelis Nasional. Dalam pelaksanaannya, atas nama rakyat Majelis telah melakukan penangkapan, pembunuhan ribuan penduduk, pensitaan harta kekayaan, dan menghukum rakyat karena kepercayaan agama. Akibatnya, bagi bangsa Perancis peralihan dari monarki ke pemerintahan demokrasi terlebih dahulu melewati tahap rezim demokrasi totaliter.

Pengalaman ini menunjukkan bangsa Perancis suatu masa pernah mengedepankan negara atas masyarakat, konstitusi di atas demokrasi, kesetaraan di atas kemerdekaan. Hasilnya, bangsa Perancis pada abad ke sembilan belas adalah melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, dengan ditandai pelaksanaan Pemilu, tetapi warga bangsa tidak memiliki kemerdekaan. Baru setelah Perang Dunia II, 150 tahun kemudian setelah revolusi dengan melewati dua monarki, dua kerajaan, lima republik salah satunya republik fasis, Perancis berhasil memiliki demokrasi liberal. Namun perlu dicatat, sampai saat ini pemerintah Perancis masih tetap mengendalikan siaran TV dengan jalan memonopoli pemilikan siaran TV dan sistem pendidikan yang sentralistis.

Hadirin hadiroh yang saya hormati,

Dari pengalaman proses demokratisasi sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pada esensinya demokrasi menjamin dilaksanakannya hak-hak rakyat untuk menentukan kebijakan dasar negara dan memilih pemimpin bangsa. Namun, tidak

jarang menghasilkan dan memilih pemimpin yang mengabaikan batas-batas kekuasaan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan melecehkan hak-hak dasar rakyat. Contoh ekstrem adalah kemunculan Hitler di Jerman sebagai hasil Pemilu tahun 1933. Demikian pula, fenomena yang melenceng dari proses demokratisasi terjadi juga mulai dari Peru sampai Palestina, dari Ghana sampai Venuzeula.

Bagaimana dengan demokratisasi di Indonesia? Bangsa Indonesia memasuki era demokratisasi pada masa setelah perang kemerdekaan tanpa memiliki tradisi dan budaya demokrasi. Layaknya masyarakat yang dibawah suatu kerajaan tidak memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya. Hak milik pribadi juga dianggap sekedar mengelola tanah milik kerajaan. Hubungan interaksi komunikasi untuk negosiasi tidak pernah dialami oleh masyarakat dibawah kekuasaan raja.

I Tanpa disadari cendikiawan Eropa kalau menilai kejadian di negara lain diasosiasikan dengan pengalaman revolusi perancis. Seperti bagaimana kalangan akademisi di Eropa menilai peristiwa G-30-S/PKI.

Hal ini berkaitan erat bahwa masyarakat Indonesia tidak (memiliki bangsawan sebagai satu klas yang berfungsi menjembatani antara raja dengan rakyat, baik dalam masalah pemerintahan maupun masalah ekonomi, khususnya pajak. Tiga ratus tahun dibawah penjajahan Belanda memperkuat sifat ketergantungan dan ketertundukan rakyat kepada penguasa. Tidak ada kata negosiasi dengan penguasa, kecuali patuh atau berontak. Pemberontakan baik dalam arti demo maupun angkat senjata berakibat fatal. Oleh karena sifat kepatuhan dan ketertundukan

merupakan alternatif yang dipilih. Tidak ada daulat rakyat, yang ada adalah daulat penguasa.

Eksperimen dengan demokrasi liberal berumur sangat singkat, hanya sekitar 9 tahun, dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Waktu amat pendek bagi suatu proses demokratisasi. Kepemimpinan dan pemerintahan otoriter lahir di bawah Presiden Sang Pemimpin Besar Revolusi Soekarno. Ego untuk menjadi pemimpin besar atau visi kedepan yang mendahului masanya menceburkan bangsa dalam berbagai konfrontasi yang melelahkan dan menyedot anggaran besar. Pembangunan di segala bidang macet. Orde baru tampil dalam sejarah politik Indonesia memberikan secercah harapan untuk munculnya kehidupan yang demokratis, dalam sosok demokrasi Pancasila. Namun, akhirnya nampak jelas bahwa orde baru merupakan bentuk lain dari Monarchi absolut, yang berpusat pada Suharto. Semua keputusan bisa muncul dari kemaunnya. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, namun hasil Pemilu sudah diketahui sebelum pemilu berlangsung. Korupsi, kolusi dan nepotisme menjalar kesegenap lapisan masyarakat dan segenap jenjang birokrasi. Tidak aneh Mochtar Lubis mengatakan korupsi merupakan budaya Indonesia. Lepas dan pro atau kontra, tetapi kenyataan adalah pegawai Indonesia dengan gaji hanya bisa untuk hidup setengah bulan, nyatanya bisa hidup selama sebulan penuh. Pemerintahan monarchi orde baru berhasil merusak moral bangsa menjadi bangsa bermental :”budak” tidak memiliki inisiatif dan kreatifitas, serta senantiasa memiliki kecurigaan yang tinggi kepada orang lain.

Dengan kondisi semacam inilah, dengan mendadak bangsa

Indonesia menapak ke jalan demokrasi liberal pada akhir tahun 1990-an, tepatnya 1998. Masyarakat dihadapkan dengan berbagai kebebasan yang dapat dimiliki dalam berbagai aspek kehidupan: ekonomi, politik, sosial dan budaya. Keterkejutan, ketidaksiapan dan kepongahan menghadapi perubahan sebagai dampak memasuki proses demokratisasi liberal secara mendadak menyebabkan demokratisasi justru menimbulkan dan memperbesar konflik, disamping korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak juga dapat dikontrol. Berbagai konflik baik bersifat politik seperti Papua dan Aceh maupun konflik horizontal seperti Sampit, Pontianak, Poso dan Maluku muncul secara cepat dan tak dapat lagi dikontrol dalam waktu yang pendek. Korban harta dan nyawa berjatuh dalam suasana dimana harkat martabat manusia sudah tidak dihargai lagi. Demikian pula semangat pemekaran sudah melewati batas batas efisiensi yang mengakibatkan beban anggaran pemerintah semakin berat.

Demokrasi, sebagaimana telah disinggung diatas, amat terkait dengan kondisi dan tingkat kehidupan suatu bangsa, baik sosial, ekonomi dan budaya. Pada hakikatnya demokrasi, dalam bahasa sederhana sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln: *“government of the people, by the people, for the people”*. Secara lebih rinci, seorang ilmuwan politik Amerika menjabarkan definisi demokrasi sebagai: *“a political system in which the whole people, positively or negatively, make, and entitled to make, the basic determining decisions on important matters of public policy”*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti demokrasi adalah rakyat memiliki hak untuk menentukan kebijakan bagi jalannya suatu negara, termasuk di dalamnya memilih

pemimpinnya. Untuk dapat menentukan kebijakan tersebut diperlukan tingkat kecerdasan tertentu yang biasanya muncul seiring dengan tingkat social ekonomi bangsa yang bersangkutan. Kondisi bangsa yang terbelakang, ditandai dengan keberadaan sebagian kecil warga beangsa yang terdidik dan relatif kaya ditengah-tengah samudra keterbelakangan dan kemiskinan, baik kemiskinan intelektual maupun kemiskinan sosial ekonomi. Tentu saja demokrasi merupakan sesuatu yang dengan mudah dapat dilaksanakan, tetapi tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan demokrasi tersebut akan dapat dilaksanakan sesuai dengan semangat demokrasi dan dapat menghasilkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Demokrasi yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma tertentu tidak dirancang untuk dilaksanakan hanya oleh komitmen sebagian kecil warga terdidik dari suatu bangsa, sebagaimana yang terjadi di negara-negara sedang berkembang. Demokrasi mengandung nilai-nilai politik, norma-norma, struktur politik dan proses politik yang dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memungkinkan sebagian besar masyarakat terlibat secara sadar dan menggunakan "akal". Hanya apabila sebagian besar warga bangsa terlibat secara sadar dan dengan menggunakan akal maka hasil demokrasi akan dapat dinikmati dan mensejahterahkan sebagian besar warga bangsa.

Di negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, lembaga dan proses demokrasi dimanipulasi dan didegradasi, sebagai instrumen untuk memegang kekuasaan lewat janji-janji kosong, retorika, charisma kosong dan pembohongan serta pembodohan masyarakat. Pemenang dan pemegang

kekuasaan tidak perlu risau apabila apa yang dilaksanakan ketika menjadi penguasa bertolak belakang dengan janji-janji kampanyenya. Demikian juga demokrasi dimanipulasi sebagai kebebasan berserikat guna dijadikan kendaraan untuk meraih kekuasaan personal, bukan kekuasaan kelompok atau bersama. Akibatnya, manakala kekuasaan personal tidak tercapai muncullah perselisihan dan konflik dalam kelompok itu. Maka dalam kondisi sedemikian ini, tidak mengherankan konflik internal suatu partai menjadi suatu hal yang umum, dan berakhir dengan munculnya partai baru.

Dalam kaitan inilah sesungguhnya demokratisasi, sekali lagi perlu ditekankan, harus sejalan dengan kondisi, situasi, termasuk kultur bangsa itu sendiri. Arah dan jalan demokratisasi tidak bisa begitu saja diambil alih, dijiplak dan difotokopi dari negara lain. Pengalaman proses demokratisasi liberal semenjak 1998 telah memberikan pelajaran berharga kepada kita. Sudah sewindu reformasi politik dilaksanakan dengan fondasi demokrasi liberal, namun kemiskinan juga belum berkurang, keamanan belum juga dirasakan nyaman bagi warga masyarakat, hukum juga belum dapat ditegakkan, kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat atas aturan masih rendah dan pars pemimpin dan politisi belum juga dapat dijadikan tauladan, serta birokrasi pemerintah belum berfungsi sebagai pelayanan masyarakat. Berapa tahun lagi demokrasi liberal akan memberikan hasil kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga bangsa? Berapa tahun lagi transisi demokrasi liberal bisa dilewati dengan sukses? Seberapa kuat daya tahan bangsa untuk melihat dan mengalami realitas demokratisasi liberal ini? Haruskan kita mengikuti jalan demokrasi

liberal sebagaimana yang dialami Amerika Serikat yang memakan waktu ratusan tahun? Apakah tidak terlalu mahal dan naif mempertaruhkan masa depan bangsa pada demokrasi liberal?

Hadirin hadiroth yang terhormat,

Banyak kritik ditujukan pada demokrasi liberal. Pandangan dan kritik Jose Ortega (dalam Capaldi, 2004) atas krisis peradaban barat yang relevan dengan situasi politik di tanah air dewasa ini, tidak terlalu jauh meleset kalau dikatakan bahwa dunia politik dewasa ini dijangkiti demoralisasi politik yang parah, hal ini antara lain ditunjukkan dengan 1) adanya konflik internal partai politik yang banyak terjadi dan berakhir dengan lahirnya partai politik baru, 2) masing partai politik tidak memiliki *platform visioner* perjuangan yang jelas, 3) perjuangan politik lebih diwarnai perjuangan untuk mendapatkan posisi pribadi dari pada untuk memperjuangkan suatu ideologi atau tujuan partai. Hal ini ditandai dengan begitu gampang aktivis politik menjadi kutu loncat untuk mengejar ambisi pribadi, yang akibatnya begitu mudah dan cepat meninggalkan suatu partai politik sebagaimana mudah dan cepatnya menjadi tokoh partai politik, tanpa proses kaderisasi yang bertahap. Proses politisi yang merangkak dari bawah sehingga sampai puncak pimpinan partai amat sangat sulit diketemukan pada dewasa ini.

Menggunakan kritik yang pernah dikemukakan oleh Jose Ortega, maka penyebab persoalan bangsa yang berkepanjangan dewasa ini justru pada demokrasi liberal itu sendiri. Mengapa? Pertama, titik kritis pada demokrasi liberal adalah prinsip bahwa mayoritas menghormati hak-hak minoritas untuk hidup dan untuk berpikir yang berbeda dengan mayoritas. Doktrin ini sungguh mulia, tetapi juga mengandung kegagalan, tidak alami, dan

tidak mungkin dapat dipertahankan. Karena kalau tidak ada tirani mayoritas apa guna pemilihan? Apa justru sebaliknya dibenarkan munculnya tirani minoritas? Kedua, demokrasi liberal memiliki kecenderungan menyamaratakan hak dan tanggung jawab yang sama bagi semua warga masyarakat. Kaum post modernist (Rosenau, 1992) juga mempertanyakan logika hak dan tanggung jawab yang sama dalam memberikan suara misalnya, antara remaja yang baru pertama kali ikut memberikan suara dan orang dewasa yang sudah matang dan penuh pertimbangan dalam memberikan suara. Ketiga, demokrasi liberal memiliki paradoks yakni menghancurkan fondasi dimana demokrasi ditegakkan. Tanda seseorang yang memegang teguh ekselensi adalah pemanfaatan hidup untuk sesuatu yang transedental. Sebaliknya, ekselensi menolak mengakui standard moral opini yang vulgar yang merupakan ciri dari massa akar rumput. Bahaya yang muncul di masyarakat adalah munculnya barbarisme karena tidak adanya standard yang dapat dijadikan dasar memecahkan persoalan yang muncul bagi massa akar rumput tersebut.

Kempat, menggunakan kritik Ortega diatas maka proses demokratisasi yang berlangsung telah melahirkan "massa", yakni orang-orang yang tidak lagi berpikir dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang penuh dengan tanggung jawab, dan selalu menganggap apa yang dipikirkan merupakan kebenaran yang layak untuk dipaksakan pada orang atau pihak lain. Karena "massa" tidak mengenal makna tanggung jawab pribadi dan tidak hati-hati membedakan antara apa yang dikehendaki dan apa yang riil dilakukan dengan segala konkwensinya maka "massa" menganggap bahwa diri merekalah yang berhak untuk menentukan segalanya. Maka pemaksaan yang menjurus kekerasan tidak dapat dihindari.

Kelima, Ortega mengakhiri kritik atas demokrasi liberal dengan menyatakan “semangat yang mulia tetapi ditopang oleh teori yang keropos” Dengan singkat perlu ada penyempurnaan demokrasi liberal. Kritik atas demokrasi liberal juga dikemukakan oleh lembaga nongovernmental yang prestigious, *international think tank*, “*The Trilateral Commission*” yang menerbitkan laporan *The Crisis of Democracy* (Cunningham, 2002) yang menegaskan bahwa demokrasi di Amerika Utara, Jepang dan Eropa Barat telah kehilangan kemampuan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Laporan ini menekankan dengan garis bawah yang tebal bahwa masyarakat demokratis telah menjadi “anomie”, yakni mereka telah kehilangan sama sekali kemampuan untuk memformulasikan dan mewujudkan tujuan bersama, dan demokrasi liberal tinggal menjadi ajang perebutan interest. Berkaitan dengan *leadership*, demokrasi liberal cenderung melahirkan “*mediocre leader*” yang merupakan budak atas slogan, dan sekaligus melahirkan kultur yang rendah. Kelemahan juga muncul, dalam bentuk ketidakmampuan partai yang berkuasa mengambil keputusan yang signifikan, karena pertimbangan yang terlalu kompromistis.

Hadirin hadiroth yang berbahagia,

Dalam kaitan inilah menarik untuk direnungkan apa yang dinyatakan oleh Dewey (Cunningham, 2002) bahwa demokrasi memiliki spektrum yang amat luas dan variatif yang amat sensitive terhadap lingkungan. Demokrasi tidak dapat diimplementasikan tanpa mempertimbangkan setting *social histories* bangsa yang bersangkutan. Apabila dipaksakan maka makna demokrasi akan hilang dan fungsi demokrasi akan musnah. Dalam kaitan inilah

muncul konsep demokrasi pragmatisme, bahwa demokrasi sebagai “*a social idea*”, yang mencakup warga yang memiliki suatu tanggung jawab bersama sesuai dengan kapasitas kemampuannya dalam membentuk dan mengarahkan aktivitas dari berbagai kelompok yang masing-masing memiliki tujuan. Keberhasilan melaksanakan demokrasi ditunjukkan oleh kemampuan masyarakat mengontrol secara efektif apa yang dilakukan dan membangun kerjasama untuk mewujudkan tujuan bersama. Dengan singkat Dewey menegaskan bahwa demokrasi adalah “*the idea of community life itself*”.

Hadirin hadirat yang terhormat,

Demokrasi harus diperlakukan sebagai instrument, sarana, piranti dan metoda untuk memformulasikan tujuan bersama dan melakukan aktivitas untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk itulah apabila membicarakan kemajuan dalam berdemokrasi kita tidak perlu bangga dengan keberhasilan demokrasi politik dalam hal kebebasan pers, misalnya. Tetapi pertanyakan untuk apa kebebasan pers? Apa kebebasan pers untuk bebasan itu sendiri? apa yang mau dicapai dan diwujudkan dengan kebebasan pers tersebut? Disinilah demokrasi menekankan perlunya suatu rekayasa perlu dikembangkan agar kebebasan pers menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Demikian pula, dengan adanya kebebasan penuh untuk berpendapat dan berserikat. Tapi tidak pernah dipertanyakan untuk apa dan kemana arah kebebasan berpendapat dan berserikat itu sendiri? Apa tujuan yang mau dicapai dengan kebebasan tersebut? Bagaimana dampak kebebasan berserikat terhadap kehidupan ekonomi? Dewey menekankan perlu rekayasa agar kebebasan berpendapat dan berserikat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Dengan demikian, sesungguhnya menurut Dewey dalam konteks bangsa kita, demokrasi tidak lagi diberlakukan sebagai ideologi, melainkan sebagai piranti untuk mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, moden, makmur dan sejahtera. Bangsa Indonesia tidak perlu malu belajar berdemokrasi dari bangsa Singapore dan Malaysia. Bagaimana mereka menjadikan demokrasi sebagai alat bukan sebagai ideologi. Untuk itu perlu ada visi masa depan bangsa, dan bagaimana karakteristik masa depan bangsa yang diinginkan.

Hadirin hadirot yang berbahagia,

Perkenankalah saya mengakhiri orasi ini dengan mengemukakan bahwa berbagai kajian dan penelitian menunjukkan bahwa bahwa yang maju, bangsa-bangsa yang maju dan modern memiliki karakteristik sebagai berikut (Ohmae, 2005; Bailey, 2004; Plotkin, 2002; Harrison, 2000;):

1. Dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat memiliki etika yang dipegang teguh
2. Warga masyarakat memiliki tanggung jawab
3. Masyarakat memiliki memiliki trust, yang didasarkan pada kejujuran
4. Warga masyarakat saling menghormati hak orang lain
5. Warga masyarakat patuh kepada hukum dan aturan
6. Warga masyarakat memegang teguh tepat waktu
7. Masyarakat memiliki ethos kerja

Bagaimana demokrasi bisa diarahkan untuk mengembangkan karakteristik bangsa sebagaimana disebutkan diatas? Sehingga demokrasi bukan untuk demokrasi itu sendiri Dengan demikian jelas apa tujuan dan arah kita berdemokrasi. Di sinilah

diperlukan ijhtihad politik dari warga bangsa khususnya para cerdas cendikia. Kita memiliki pengalaman yang pahit dengan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tetapi bukan berarti kita haram untuk berusaha mengembangkan demokrasi yang sesuai dengan setting historis dan sosio budaya bangsa. Barangkali demi masa depan bangsa bangsa Indonesia perlu merumuskan Demokrasi Kebangsaan yang menekankan bahwa proses demokratisasi merupakan proses untuk memperbaharui dan proses untuk mengoptimalkan kemampuan individu warga bangsa serta memperkuat identitas sebagai suatu bangsa, proses untuk mematangkan diri kultur dan watak bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Identitas bangsa inilah yang merupakan penjabaran dari Bhineka Tunggal Eka, suatu kultur bangsa yang dapat mengatasi kelompok-kiompok baik suku maupun agama. Dengan demokrasi kebangsaan adalah demokrasi yang lebih menekankan pada pengabdian maju. Dalam penjabarannya maka demokrasi ke bangsaan akan mewujudkan ke tuju karakter bangsa sebagaimana disebutkan diatas. Sebab, ke tuju karakter itulah yang merupakan fondasi bagi setiap bangsa untuk menjadi bangsa yang maju, modern, makmur dan sejahtera.

SUMBER:

- Chua, Amy (2004) **World on fire**. London, England: Arrow books.
- Bailley, Dennis (2004) **The Open society paradox. Why the 21' century calls for more openness-not less**. Washington, DC: Potomac Books. Ltd.
- Capaldi, Nicholas (2004) Ortega on the Crisis of Western Civilization, in **World and I**

- Cunningham, F. (2002) **Theories of democracy. A critical introduction.** London, UK: Routledge.
- Daniell, M.H. (2000) **World of risk. Next generation strategy for volatile era.** New York, NY: John Wiley & Sons, Ltd.
- Dixon, Patrick (2002) **Future wise. Six faces of global change.** London, UK: Harper Colloin Publisher.
- Fukuyama, F. (2002) **Our posthuman future.** New York, NY: Farrar, Starus and Giroux.
- Harrison, Lawrence, E. (2000) **Culture matters. How value shape human progress.** New York, NY: Basic bookd.
- Kaplan, Robert, D. (2001) **The Coming anarchy.** New York, NY: Vintage Books.
- Ohmae, Kenichi (2005) **The Next global stage.** Upper Sadler River, NJ: Wharton School Publishing.
- Plotkin, Henry (2002) **The Imagined world made real.** Towards natural science of culture. London, UK: Allen lane the penguin press.
- Rosenau, P.M. (1992) **Post-Modernism and the social sciences.** Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Roy, Oliver, (2004) **Globalised Islam. The search for a new ummah.** London, UK: C. Hurst & Co Pub. Ltd.
- Schaebler, Bright & Stenberg, Leif (eds) (2004) **Globalization and the muslim world.** Syracus, NY: Syracus University Press.
- Whitehead, Laurence (2002) **Democratization: Theory and experience.** New York: Oxford University Press, Inc.
- Zakaria, Fareed (2003) **The future of freedom.** New York, NY: W.W. Norton & freedom Company.



MENGGUGAT PUDARNYA NILAI-NILAI KEINDONESIAAN

Oleh: Suminto A. Sayuti

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt.

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam lantaran berat bebanyakemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya.

Hari depan Indonesia adalah duaratus juta mulut menganga, dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt, sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian.

Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang sambil main ping pong di alas pulau Jawa yang tenggelam dan membawa seratus juta bola lampu 15 watt & dasar lautan.

(Taufiq Ismail, "Kembalikan Indonesia Padaku")

Hadirin yang saya muliakan,

Saya sengaja memulai pidato kebudayaan ini dengan penggalan sajak Taufiq Ismail yang diciptakan pada tahun tujuh puluhan itu. Alasannya, pertama, sajak atau karya seni umumnya, secara sosiologis hakikatnya merupakan tanggapan evaluatif penyair/seniman terhadap realitas yang mengepungnya. Oleh karena itu, selalu terdapat homologi struktural antara teks artistik dan teks-teks sosial-budaya. Kedua, ketikamemasukidan terlibat dalam proses kreatif, seniman selalu mengedepankan kejujurannurani kemanusiaan. Oleh karena itu, teks artistik di samping sebagai *sosial stock of knowledge*, juga merupakan cara komunikasi, cara pemahaman, dan cara penciptaan apabiladikaitkan dengan peristiwa sejarah. Teks-teks artistik merupakan catatan dan kesaksian reflektif yang ditulis secara estetis dengan kejujuran sikap, dan karenanya apabila dihayati secara seksama, teks-teks itu mampu mempertinggi derajat kesadaran kita terhadap *historical construct* dan *historical being* kita.

Penggalan sajak Taufiq yang berjudul "**Kembalikan Indonesia Padaku**" yang menjadi entri pidato ini, diciptakan pada tahun 70-an, tahun ketika kita sedang "galak-galaknya" melakukan tahapan "pembangunan," beberapa tahun setelah lepas dari kekuasaan Orde Lama. Di dalam kutipan tersebut terbayangbagaimana nasib dan masa depan bangsa kita.

Disampaikan dalam kegiatan Dies Natalis FISE UNY ke-42, 14 September 2007.

1. Penyair dan Dosen FBS UNY
2. Dikutip dari *Sajak-sajak Ladang Jagung* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1973)
3. Lihat Kuntowijoyo, 1981. "Peristiwa Sejarah dan Karya Sastra." Makalah Seminar di UGM .

Orang boleh berbeda pendapat terhadap persoalan yang diisyaratkan dalam dan lewat penggalan teks sajak Taufik tersebut. Tetapi, orang juga tidak dapat menyangkal, bahwa apa yang dibayangkan Taufik waktu itu ternyata memiliki kedekatan dengan realitas, yang mungkin masih juga terjadi hingga kini. Bangunan imaji di dalamnya, baik yang visual, kinestetik, maupun yang lain, merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan hal itu. Sajak yang baik, imajinya memang sudah seharusnya didasarkan pada realitas empiris, terutama sekali jika komunikabilitas puitik sejak semula disadari oleh penyair, bahwa sajaknya memang akan dibaca khalayak. Sekali lagi, terdapat homologi struktural antara realitas estetisliterer dan realitas formal.

Hadirin yang saya muliakan,

Salah satu kecenderungan yang tampak dengan jelas dari dinamika kehidupan manusia dewasa ini ialah perubahan-perubahan yang disebabkan oleh upaya-upaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung kian cepat. Perubahan-perubahan tersebut terasa besar sekali pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah pengaruhnya yang tak terhindarkan pada kehidupan bangsa dalam berbagai seginya. Pada sisi lain, persemukaan kita dengan budaya asing melalui media cetak dan elektronik, sebagai akibat yang tak terhindarkan dari proses tersebut, telah memberi warna dan corak tersendiri pada sendi-sendi kehidupan budaya kita yang tengah berada dalam proses transformasi. Akibatnya, kita pun dihadapkan pada berbagai keniscayaan: penetrasi nilai-nilai baru yang *avant garde* yang acapkali bertentangan dengan nilai lama yang konvensional; kecenderungan pragmatik, materialistik, dan

hedonik yang menjadi dominan di tengah masyarakat yang makin konsumeristik yang ujungujungnya sampai pada pemiskinan spiritual; dan sederet panjang fenomena lainnya, termasuk di dalamnya, dalam perspektif politis, makin memudarnya nilai-nilai keindonesiaan. Kita dihadapkan pada beragam persoalan, yakni bagaimana mengatasi munculnya pergeseran yang terus-menerus, yang menyebabkan pecah dan bercabangnya pandangan dunia (masyarakat dan sub-submasyarakat), dan dislokasi termasuk memudarnya penghayatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan berbarengan dengan robeknya berbagai format spiritual yang ada.

Persoalannya yang kemudian adalah, ketika nilai-nilai keindonesiaan (baca selanjutnya: identitas nasional) dirasa mulai pudar, cukupkah diatasi dengan cara menginjeksikan kepadanya prinsip-prinsip etika dan kebenaran moral yang ditimbari sumur-sumur peradaban yang berakar kultur jelas?

Hadirin yang sayamuliakan,

Makalah ini tidak menggunakan istilah nasionalisme karena dirasa terlampau luas dan ideologis. Kata nasionalisme adalah serapan dari bahasa Inggris *nationalism*, yang berasal dari kata *nation*, yang berarti bangsa. Menurut Benedict Anderson (1999: 7-8) bangsa di definisikan sebagai 'komunitas' politis dan 'dibayangkan' sebagai sesuatu yang bersifat 'terbatas' secara inheren sekaligus 'berkedaulatan'. Dikatakan 'imajiner' (dibayangkan) karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak akan tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula mendengar tentang mereka. Meskipun demikian, dibenak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Dibayangkan sebagai 'terbatas' karena bangsa-bangsa memiliki garis-garis perbatasan yang pasti meski elastis. Di luar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain. Dibayangkan sebagai 'berdaulat' karena bangsa memiliki otoritas untuk menaksir sendiri kebebasannya dalam hubungannya dengan bangsa lain. Dibayangkan sebagai 'komunitas' karena tak peduli akan ketidaksetaraannya dan eksplorasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, bangsa itu sendiri dipahami sebagai

Fenomena apapun, termasuk identitas nasional posisinya bersifat tidak stabil. Ketidak stabilannya dengan demikian menuntut kita untuk tidak memikirkannya sebagai sesuatu yang bersifat tetap. Ia selalu dalam posisi berubah dan berubah terus. Apalagi jika hal ini diletakkan dalam perspektif perjalanan *nation-state* ketika bersemuka dan masuk dalam proses global.

Karena, sebagai sebuah proses, globalisasi menyediakan ruang yang begitu luas bagi siapapun untuk melakukan apa yang disebut konstruksi identitas. Dikatakan demikian karena lewat proses itu peristiwa pertukaran benda dan atau simbol menjadi amat mudah. Demikian juga halnya dengan perpindahan dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Belum lagi dengan pencanggihan teknologi komunikasi yang membuat fertilisasi silang antarbudaya juga semakin mudah. Itulah sebabnya, dalam globalisasi sifat translokal menjadi sifat kebudayaan dan identitas.

Situasi kehidupan kita kini mengisyaratkan bahwa terminologi tempat sebagai sandaran bagi pemahaman terhadap kebudayaan dan identitas tidaklah cukup. Pencapaian pemahaman yang baik terhadapnya akan terlaksana jika diposisikan dalam terminologi

kesetiakawanan yang mendalam dan mendarat. Di samping itu, nasionalisme juga sering kali dipahami sebagai wawasan kebangsaan suatu bangsa yang merupakan jawaban atas pertanyaan paling mendasar yang dihadapi suatu bangsa ketika memutuskan untuk bersatu menjadi bangsa. Nasionalisme itu sendiri memiliki cakupan dan dimensi yang sangat luas, yang tidak hanya mencakup kesadaran warga Negara akan pentingnya ketunggalan bangsa, *nation state* (Refly, 1993:1), tetapi juga merupakan sebuah pandangan dunia (*world view*) yang mendasari dan sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita bangsa. Sementara itu, gagasan nasionalisme bisa berupa: a) perlawanan terhadap hegemoni (ipoleksosbud), b) cinta tanah air dan budayanya, c) ketidakpercayaan terhadap persahabatan yang tidak egaliter, d) bersatu dalam organisasi pergerakan untuk melawan hegemoni.

"pelancongan." Terminologi ini mencakupi budaya dan manusia yang selalu dalam pengembaraan dari, satu terminal ke terminal lainnya. Akibatnya, ruang-ruang budaya juga merupakan "medan" tempat para pelancong menjadi pengembara pulang-balik.

Mengapa gagasan tentang ketidakstabilan kebudayaan dan identitas dalam wacana global harus diperhitungkan tatkala kita memperbincangkan identitas nasional. Karena, situasi itu membawa kita pada pemahaman bahwa kebudayaan dan identitas, seperti dinyatakan para ahli di bidangnya, selalu merupakan pertemuan dan percampuran dari berbagai kebudayaan dan identitas yang berbeda-beda melalui proses hibridasi, yang berakibat kabur dan labilnya batas-batas kebudayaan yang mapan. Inilah tantangan sekaligus peluang yang kini terbentang dan mengepung kita, yang berpotensi besar mencabik-cabik format keindonesiaan dan bisa mengantarkan bangsa ini pada gerbang kerapuhan peradaban bangsa.

Ketika identitas dipahami sebagai sebuah konsep kultural yang berpusat pada pembagian norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol, dan praktik-praktik kultural, maka "medan-ekspresi" yang tersedia akan diperebutkan, dari medan ekspresi yang terhampar sebagai seni dan ideologi, hingga ekonomi dan politik. Bukankah identitas teraktualisasikan juga dalam "cara kita berbicara" melalui medan dan sarana ekspresi pilihan kita. Sementara di dalam identitas itu sendiri juga selalu terandaikan adanya relasi, yakni relasi dengan identifikasi diri dan sangkan-paran sosial. Dalam konteks inilah menyasati kembali (baca: menggugat) identitas nasional (yakni nilai-nilai keindonesiaan) dalam perspektif lokal dan global akan menemukan signifikansi dan relevansinya.

Hadirin yang saya muliakan,

Ketika muncul kesadaran bahwa yang lokal selalu menjadi korban marginalisasi sehingga terpinggirkan, seluruh masyarakat (etnik) yang ada memang perlu meredefinisi diri sendiri dan budayanya. Persoalan kembali memasuki "kandang" budaya lokal, disatu sisi, dapat diperhitungkan sebagai dasar bagi upaya membangun kesadaran budaya, hanya saja ia bisa memunculkan paradoks disisi lainnya, yakni ketika ia ditafsirkan secara linear bahwa kita akan hidup di masa depan, bukan di masa lalu. Yang jelas, orientasinya harus diarahkan pada kesejatian fitrah manusia sebagai pelaku yang sadar untuk bertindak mengatasi dunia dan realitas yang (mungkin) memusuhi dan menindasnya. Dalam konteks ini, terminologi identitas bisa bermakna kekhawatiran dan sekaligus pertanyaan, yakni ketika berada pada posisi defensif (misalnya identitas lokal dalam konstelasi nasional, atau yang nasional dalam konstelasi global). Karenanya, harus disadari pula bahwa identitas bukan sebuah entitas yang final. Ruang bagi reaktualisasi dan revitalisasi terhadapnya selalu terbuka lebar.

Dalam sejarahnya, nilai-nilai keindonesiaan telah berperan sebagai spirit terkuat dalam mempersatukan keanekaragaman etnik dan budaya lokal dalam wadah negara-bangsa. Akan tetapi, seperti dikemukakan diatas, menguatnya etnisitas dan agama kini bisa berubah menjadi tantangan tersendiri bagi spirit itu. Dalam kaitan ini, kita semua niscaya tidak menghendaki, atau paling tidak belum siap menghadapi ramalan dan tesis Daniel Bell dalam *The End of Ideology* bahwa "nasionalisme sebagai ideologi telah berakhir" bakal menjadi kenyataan bagi bangsa ini. Kita juga belum bisa sepenuhnya menerima tesis Francis Fukuyama dalam *The*

End of History and the Last Man: "nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan dalam sejarah dunia."

Ilustrasi di atas mengantarkan kita pada persoalan ini, sebagai negara bangsa (*nation state*), dimanakah posisi kita kini, dan sedang menuju ke mana, mengapa nilai-nilai keindonesiaan kita memudar, bagaimanakah cara mengatasinya, adakah strategi yang jitu untuk itu? Judul tulisan ini sudah mengisyaratkan bahwa kini kita berada dalam suatu situasi yang menuntut kita untuk bersikap "waspada" terhadap berbagai situasi yang diliputi "gerhana nurani," yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sikap ini penting demi mencari dan menentukan solusi atas terciptanya situasi tersebut, yakni situasi yang ditimbulkan oleh sebuah perubahan sosial budaya yang memang secara sadar dipilih dan dilakukan bersama menuju semacam *ideal type* masyarakat kita. Persoalannya, apakah ada yang salah dengan desain dan strategi yang kita pilih dan lakukan selama ini hingga kita masuk ke dalam suasana pudarnya nilai-nilai keindonesiaan itu? Atau, benarkah kini, dan ke depan, diperlukan format keindonesiaan yang baru?

Hadirin yang saya muliakan,³

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan kita secara politis tanggal 17 Agustus 1945, sebagai bangsa, kita selalu berupaya agar kehidupan di berbagai bidang seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jika dimungkinkan, kita mendambakan beberapa

³ ⁵ Lihat Budiarto Shambazy, "Gerhana Nurani," dalam *Kompas*, 28 Agustus 2007.

langkah lebih maju daripada bangsa-bangsa lain. Dibalik sejumlah keinginan itu, terbayang juga kehendak untuk menjadi bangsa yang modern. Untuk itu, kita melakukan "pembangunan" demikian secara resmi istilah ini dipergunakan di segala bidang.

Akan tetapi, salah satu pengalaman berharga kita di masa lalu, yakni ketika merambah tahap demi tahap pembangunan itu, ialah bahwa perubahan sosial-budaya dengan "ideologi pembangunan"-nya secara hakiki hampir selalu dikendalikan, digerakkan, atau diarahkan oleh sekelompok manusia yang berkuasa. Wacana kekuasaan menjadi wacana yang mengarahkan perubahan sosial-budaya yang terencana itu. Secara linguistik, kata "pembangunan" dan bukannya kata "perubahan" selalu dianggap sebagai sebuah kata yang meniscayakan nilai-nilai positif. Oleh karena nilai positifnya itu, ia selalu diandaikan mengandung dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Maka, ia boleh jalan terus tak henti. Perubahan yang diarahkan oleh nuansa "pembangunan" hampir tidak pernah diperhitungkan implikasi negatifnya terhadap kehidupan masyarakat yang dibangunnya itu. Apabila timbul dampak negatif, dampak itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar, sebagai dampak pembangunan, pembangunan memang memerlukan pengorbanan, *jerbasuki mawabeya*.

Anggapan semacam itu sebenarnya merupakan kesepihakan. Karena, dalam kenyataannya sebagian besar kepentingan masyarakat hampir selalu terpinggirkan.⁴

⁴ ⁷ lihat: Umar Kayam, *Transformasi Budaya Kita*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 19 Mei 1989.

Berbagai persoalan yang terkait dengan pembangunan hampir tidak pernah dilihat "dari bawah," tetapi dilihat lewat perspektif pemerintah atau segelintir manusia yang memiliki kekuasaan itu, yang dengan mudah dapat pula atau merasa berhak mengatasnamakan rakyat banyak dan merasa dirinya lebih pintar dari pada rakyat itu sendiri. Itulah sebabnya, kepincangan dan atau dampak negatif tidak pernah muncul ke permukaan. Secara hakiki, misalnya saja dipandang dari sudut pandang *human capital theory*, pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang berencana, dan oleh karena itu, pasti bertujuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembangunan adalah tertingkatkan kualitas hidup manusia, baik kualitas yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Perencanaan itu sendiri disusun dan dilaksanakan oleh manusia.⁵

⁵ ⁸Lihat: Heddy Shri Ahimsa-Putra, ***Post-Modernisme dan Perubahan Kebudayaan***. Makalah disampaikan dalam forum diskusi terbatas Lingkaran Studi Ekstase, Fakultas Filsafat UGM, tanggal 18 November 1993. Selanjutnya lihat juga: Heru Nugroho, ***Dialektika Pencerahan dalam Era-Postmodernisme***, sda.; Amich Ahlumami, "*Postmodernisme dan Kebudayaan Kota*" dalam Suyoto dkk, ***Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban*** (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), h. 97-dst.

⁹ Umar Kayam, "*Budaya Harus Bayar*" dalam ***Kompas***, Rabu 17 Maret 1999, h. 4. Menurut Umar Kayam, pepatah Belanda *voor wat hoort wat*, atau pepatah Jawa *Jawajer basuki mawa beya* atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "untuk sesuatu ada sesuatu," atau "sesungguhnya keselamatan atau kebahagiaan mengandung biaya," pada zaman Orde Baru telah ditafsirkan secara harafiah.

¹⁰ HAR Tilaar, "*Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Budaya, Suatu Pemikiran Awal*." dalam ***Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*** (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). h. 273 dst.

¹¹ Heddy Shri Ahimsa-Putra. ***Op. cit.***

Oleh karena itu, manusia itu sendiri adalah pendukung dan penggerak rencana tersebut. Hal itulah yang oleh Tilaar disebut sebagai hakikat semua upaya pengembangan SDM.

Istilah "pembangunan" itu sendiri, setelah sekian lama dipergunakan, akhir-akhirnya lebih menjurus berubah menjadi sebuah "penjara makna" tanpa kita sadari, atau memang kita dibuat tidak sadar terhadap hal itu. Kita harus mengartikannya sebagai perubahan kebudayaan dan selalu bersifat positif. Akibatnya, ia dianggap sebagai kata yang mencerminkan satu-satunya kebenaran karena tidak ada pembangunan yang negatif. Ia menjadi begitu hegemonik karena tidak memberikan peluang buat tawar-menawar. Siapapun yang mencoba "menahan" laju pembangunan, dalam arti tidak sejalan dengan garis pemerintah yang berkuasa dengan cara memberikan alternatif dan tanggapan kritis, akan dituduh sebagai "penghambat pembangunan" dengan berbagai resiko yang harus ditanggungnya, baik yang bersifat sosial, politis, ekonomi maupun kultural.

Hadirin yang sayamuliakan,

Gambaran-gambaran di atas membawa kita pada keyakinan bahwa masyarakat yang merupakan cita-cita bersama adalah masyarakat Indonesia yang menghayati nilai-nilai keindonesiaannya, masyarakat yang berperadaban. Inilah tujuan perubahan sosial-budaya yang kita rancang dan laksanakan, serta harus dimaknai sebagai salah satu imperatif historis yang harus ditunaikan. Masyarakat tersebut adalah sebuah masyarakat yang sikap, perilaku, dan tindakan-tindakannya harus didasarkan atas prinsip-prinsip moral: ketika pemerintahan dijalankan berdasarkan aturan hukum, bukan oleh angan-angan manusia;

ketika pertumbuhan organisasi organisasi kewargaan disemai, bukan ditekan; ketika perbedaan pendapat tidak dibungkam. Masyarakat yang berperadaban selalu mengandaikan pencarian keunggulan dan pengupayaan kebaikan untuk menggantikan sesuatu yang hanya bersifat mediokratis (keadaan yang sedang-sedang saja) dan filistinisme atmosfer yang minatnya melulu kepada benda-benda material, bukan nilai-nilai intelektual dan artistik. Oleh karena itu, perubahan menuju itu sekaligus harus mampu pula menemukan, menghidupkan, dan menyegarkan kembali semangat kebebasan, individualisme, kemanusiaan, dan toleransi dalam jiwa kita. Untuk itu, keutamaan kecendekiawanan dan pengayaan kultural merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Perubahan sosial-budaya menuju masyarakat yang berperadaban pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan sosial-budaya yang pernah terjadi sebelumnya.⁶

Itulah sebabnya, bagi kita, perubahan yang kini tengah berlangsung merupakan bagian dari "panggilan atau tugas historis" yang harus ditunaikan secara sadar. Mengapa demikian?

Hadirin yang saya muliakan,

Perubahan sosial-budaya mana dan apapun hampir dipastikan memunculkan sejumlah akibat. Oleh karena itu, walaupun proses tersebut merupakan bagian dari panggilan sejarah ini juga

⁶ ¹² Anwar Ibrahim, "Demokrasi dan Masyarakat Madani," dalam *Renaissance Asia, Gelombang Reformasi di Ambang Alaf Baru* (terj. Ihsan Ali-Fausi, Bandung: Mizan, 1998), h. 49.

¹³ *Ibid.* h. 50.

merupakan "sebab." Pergeseran yang terus-menerus, pecah dan bercabangnya pandangan dunia (masyarakat dan sub-submasyarakat), dan dislokasi, untuk sekadar menyebut sejumlah contoh kasus, pada hakikatnya juga merupakan akibat yang tak terhindarkan dari dipilihnya proses perubahan. Akhir-akhir ini kita juga menyaksikan bagaimana histeria sosial terjadi, bahkan sementara orang mengatakan bahwa sebagian masyarakat kita sedang mengidap *schizofrenia kultural*, masyarakat manusia yang berwajah garang, berwatak keras, berperilaku keras dan brutal, agresif, saling bermusuhan satu sama lain. Seperti sering diduga, hal itu antara lain disebabkan oleh runtuhnya pilar-pilar hukum. Di dalam masyarakat yang berperadaban memang selalu diandaikan adanya harapan bahwa kebebasan dan hak-hak asasi tertentu tidak boleh dilanggar dan tidak dapat dicabut melalui proses hukum.

Dalam hubungan ini, terdapat sejumlah prasyarat buat memasukinya, di antaranya adalah semakin tumbuh dan kuatnya kelas menengah, semakin terampilnya kaum sipil, dan yang lebih penting lagi adalah terwujudnya keterbukaan. Menurut Majid, masyarakat semacam itu bakal terwujud jika terdapat cukup semangat keterbukaan. Keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara positif dan optimis.

Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang adil dan egaliter. Masyarakat yang penuh keterbukaan hanya dapat berjalan manakala demokrasi juga tidak dipasung dan kekuasaan yang hegemonik dikembalikan kepada rakyat. Jika benar bahwa kita kini sedang melakukan demokratisasi, maka demokrasi harusnya diluruskan dengan cara antara lain, menanamkan ke

dalam dirinya prinsip-prinsip etika dan kebenaran moral yang berasal dari cita-cita peradaban dan warisan intelektual yang benar-benar berakar pada kultur keindonesiaan itu sendiri, yang hakikatnya tidak pernah bersifat singular.

Akar nilai-nilai kebangsaan kita sebenarnya tertanam dalam bumi keberagaman etnik lokal dengan filosofi *bhinneka tunggal ika-nya*. Akan tetapi, dalam perjalanannya hingga kini, berbagai sandungan menghadang. Sejumlah daerah, bahkan, mencoba memisahkan diri dari "keluarga" Indonesia setelah Timor Timur lepas. Kita pun menjadi paham bahwa nilai-nilai kebangsaan atau identitas keindonesiaan itu ternyata sekeping uang logam: tidak ada identitas tanpa aspek politik di satu sisi, tetapi substansi dasarnya adalah sentimen etnik. Dengan kata lain, kesadaran kita terhadap situasi bahwa "ruh politik menumbuhkan diri dalam etnisitas" harus selalu dijaga. Maknanya, etnisitas adalah greget baru dalam upaya pencahayaan nilai keindonesiaan yang memudar itu.

Hadirin yang saya muliakan,⁷

Sejarah telah mencatat bahwa hegemoni penguasa selalu tumbang di tangan rakyat. Peristiwa bulan Mei 1998, di samping peristiwa 1966, merupakan bukti yang lebih dari cukup untuk itu. Oleh karena itu, jika selama ini kita rasakan begitu kuatnya hegemoni "daulat tuanku", berbagai upaya buat mewujudkan "daulat rakyat," dengan demikian, merupakan imperatif yang

7 ¹⁴ *Ibid.* h. 52.

¹⁵NurcholisMadjid."Menuju Masyarakat Madani," (ed). Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal(Bandung: Pustaka Hidayah), hh. 321- 350

tak terhindarkan dalam rangka mencahayakan kembali pudarnya nilai-nilai keindonesiaan. Retorika-retorika yang cenderung membodohi rakyat, seperti kenyataan bahwa MPR/DPR sebagai lembaga tertinggi telah dikooptasi penguasa, harus segera diganti dengan upaya-upaya yang realistik.⁸

Yang namanya "merdeka" tentulah bukan hanya terbatas pada pengertian merdeka politik (dalam batasan negara dan bangsa), tetapi juga merdeka dalam hal pemikiran dan jiwa (dalam batasan sebagai manusia-manusia hamba Tuhan). Cita-cita ini mengandaikan pula kemerdekaan dari semua bentuk dominasi "umat/manusia" lain. Keterbukaan penanganan berbagai hal merupakan salah satu jalan menuju cita-cita bersama itu. Ketika politik dihayati dalam sejarah riil kebudayaan, di mana pun politik amat biasa memakai medan ekspresi sebagai alat atau kendaraan demi mencapai tujuan politik itu dalam mewujudkan kepentingannya. Akan tetapi, politik dalam artinya yang positif sering diabaikan. Seharusnya, "ruang batin cipta," terutama sekali bagi politik (dalam arti positif) menjadi jembatan dialog yang secara bersama memperjuangkan kemanusiaan. Itulah sebabnya, politik juga harus dimaknai sebagai sehimpunan teknik untuk memadukan dan menyatukan berbagai perbedaan dan

⁸ ¹⁶ Deliar Noer, "Pelajaran Tiga Peristiwa Peralihan," dalam Maula (ed.) *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah), hh. 163-220.

¹⁷ Selanjutnya baca: pandangan-pandangan Taufik Abdullah, Umar Kayam, Selo Soemardjan, dan Koentjaraningrat pada bagian II buku *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal* (Bandung: Pustaka Hidayah), hh. 93-172

¹⁸ Mudji Sutrisno, "Ruang Batin Cipta," dalam *Kompas*, Minggu 14 Maret 1999, h.

keberagaman yang ada di kawasan masyarakat sipil. Sekali lagi, bukankah sebagai bangsa kita memang terdiri atas banyak etnik yang beragam? Akan tetapi, dalam kenyataannya, politik kita hanya sering memanfaatkan medan-medan ekspresi (termasuk didalamnya: seni), bahkan jika diperlukan memanipulasikannya dengan beragam cara bukan demi tujuan kemanusiaan.

Rekayasa ulang masyarakat, menciptakan masyarakat yang lebih terbuka, transparan, dan toleran demi mencahayakan kembali nilai-nilai keindonesiaan, dengan demikian juga sangat bergantung pada tersedianya iklim intelektual yang sehat. Dalam kaitan ini, perguruan tinggi sebagai "kawah candradimuka" para cendekiawan dan calon cendekiawan, harus berdiri di depan.

Adalah sebuah ironi jika para mahasiswa perguruan tinggi berjuang habis-habisan untuk membongkar praktik-praktik yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara jajaran birokratis lainnya masih begitu kuat dililit kepentingan-kepentingan ambisius personal.

Hadirin yang saya muliakan,

Masyarakat memang harus dipersiapkan, secara keseluruhan dan tidak dimonopoli oleh sebagian kecil golongan, untuk melakukan transformasi diri dan melepaskan diri dari pengalaman buruk masa lampau, yang dalam bahasa Anwar Ibrahim disebut sebagai tribalisme, feodalisme, kepicikan wawasan, dan fanatisme berlebihan. Hal ini bukanlah berarti mereka harus menghapuskan identitas mereka yang asli, melainkan mereka perlu memperbaharui komitmen kepada nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebajikan, dan kasih sayang, tidak hanya sebagai nilai-nilai keindonesiaan, bahkan sebagai nilai-nilai universal.

Penyataan di atas mengisyaratkan bahwa masyarakat yang menghayati nilai-nilai kebangsaan sesungguhnya merupakan masyarakat tanpa sekat-sekat etnis. Persoalan ini sesungguhnya merupakan kehendak kita bersama. Akan tetapi, masyarakat terbuka semacam yang dicita-citakan itu tidak mungkin terwujud tatkala sebuah rezim menolak pluralisme, polifoni, dan menghendaki kekuasaan berpusat di satu tangan serta bersifat monofoni. Untuk menerjemahkan persoalan tersebut ke dalam realitas, ke dalam kehidupan keseharian dibutuhkan kreativitas, imajinasi, dan keberanian. Dalam konteks inilah medan-medan ekspresi di luar politik dapat diberdayakan demi penghayatan nilai-nilai keindonesiaan yang memudar itu. Medan-medan itu hendaknya dipilih dan berupa medan ekspresi yang mampu menampilkan manusia sebagai *sovereign individual*, tetapi bisa juga sebagai pribadi yang tak pernah selesai: manusia yang selalu berada dalam kerangka komitmen, sekaligus: melarat dan kaya, terjajah dan merdeka, manusia yang membutuhkan sejumlah kepastian yang tak disediakan oleh masyarakat dan jiwanya sendiri.⁹

Penciptaan medan-medan ekspresi demi pencapaian hal tersebut sudah seharusnya bertolak dari kehidupan keseharian. Dengan demikian, realitas pada sisi-sisinya yang paling musykil, yang tak tergapai oleh kaidah-kaidah konvensional akan mampu terjelajahi, yang semuanya diarahkan pada format keindonesiaanitu. Jelaslah bahwa mencahayakan kembali pudarnya nilai-nilai keindonesiaan sesungguhnya hanya dapat

9 ¹⁹Nirwan Dewanto. *Ibid.*

²⁰ Anwar Ibrahim. *Op. cit.*

dilakukan dalam sebuah habitat budaya kewargaan atau *civic culture* yang sehat, suatu habitat yang meniscayakan lingkungan politik membuka kemungkinan bagi partisipasi penuh dan interaksi terbuka semua unsur masyarakat yang beragam. Tidak satu kelompok atau sektor khusus pun diperlakukan tidak adil sehingga merasa teralienasikan, ditelantarkan, atau ditindas. Oleh karena itu, terkooptasinya berbagai ragam dan bentuk medan ekspresi demi kepentingan *status quo*, sebagai corong penguasa, dengan alasan demi tercapainya pembangunan nasional harus dihindari. Jika benar pendidikan di berbagai tingkatan juga merupakan sebuah medan ekspresi, dalam konteks ini, pendidikan yang memerdekakan menjadi agenda yang mendesak untuk dirancang dan dilaksanakan.

Hadirin yang saya muliakan,

Kita nikmati penggalan sajak berikut ini.

Matahari terbit Fajar tiba

Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak

tanpa pendidikan

Aku bertanya,

tetapi pertanyaan-pertanyaanku

membentur meja kekuasaan yang macet dan papantulis-papantulis pars pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan

(Rendra. "**Sajak Sebatang Lisong**" dalam *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. 1980)

Secara tersirat sudah dikemukakan bahwa memudarnya

nilai-nilai keindonesiaan juga disebabkan oleh munculnya histeria sosial dan *sawan* budaya di kalangan masyarakat kita. Bahkan, sementara orang mengatakan bahwa sebagian masyarakat kita mengidap *schizofrenia kultural*. Akibatnya, mereka menjadi manusia-manusia yang berwajah garang. Perilakunya keras, brutal, dan agresif.¹⁰

Salah satu kehendak besarnya adalah memusuhi yang lain, yang satu ingin menguasai dan menindas yang lain. Harkat kemanusiaan dinafikan karena hak-hak azasi dinistakan.

Aku melihat darah di langit.

Ya! Ya!

Kekerasan mulai mempesona orang.

Yang kuasa serba menekan.

Yang marah mulai mengeluarkan senjata.

Bajingan dilawan secara bajingan.

Ya! Inilah kemungkinan yang mulai menggoda orang

(Rendra, "**Sajak Seorang Tua di Bawah Pohon**")

Manusia-manusia telah menjadi pendusta bagi hati nurani diri mereka sendiri. Sebagai sebuah medan ekspresi, dalam sejumlah hal pendidikan kita telah gagal.

Cukup lama pendidikan "hanya" menjadi perpanjangan tangan kekuasaan dan birokrasi. Bahkan, situasi itu mungkin masih terjadi hingga hari ini, disadari atau tidak. Pendidikan telah kehilangan hakikatnya sebagai proses pembudayaan, dan berubah

¹⁰ ²¹Nirwan Dewanto. "*Pengalaman dan Penciptaan: Kasus Budi Darma dan Gabriel Garcia Marquez*," dalam *Senjakala Kebudayaan* (Yogyakarta: Yayasan bentang Budaya. 1996), h. 130

menjadi "pembuayaan."

Menghisap udara

yang disemprot deodorant,

aku melihatsarjana-sarjanamenganggur berpeluh dijalan raya;

...

Bunga-bunga bangsa tahun depan

berkunang-kunang pandang matanya,

di bawah iklan berlampu neon.

Berjuta-juta harapan ibu dan bapa

menjadi gebalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samodra.

...

(Rendra. "Sajak Sebatang Lisong" dalam *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. 1980)

"Situasi pembuayaan" itu, salah satu ujungnya hanya akan melahirkan ketidakberdayaan dan ketakutan buat mengekspresikan pikiran dan perasaan sendiri, sehingga sikap "memilih diam" sering dianggap sebagai sikap dan perilaku santun, dan bahkan sakral. Budaya bisu tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga menjadi situasi khas di kelas-kelas pengajaran dan perkuliahan. Situasi semacam itu hanya mengantarkan manusia-didik terperangkap dalam situasi *disinherited-masses*, yakni manusia yang terasing dari realitas dirinya, yang "menjadi ada" dalam pengertian "menjadi seperti (orang lain) dan bukannya dirinya sendiri." Sekali lagi, pendidikan dalam sejumlah hal telah gagal menempatkan dirinya dalam konteks pemerdekaan karena yang banyak terjadi lebih merupakan domestikasi atau penjinakkan

sosial budaya. Akibatnya, pengenalan diri dan lingkungan yang seharusnya menjadi kapasitas yang dimiliki manusia-didik tidak sepenuhnya tercapai: bagaimana mungkin generasi penerus bangsa ini mampu menghayati nilai-nilai keindonesiaan!

Gunung-gunung menjulang
Langit pesta warna di dalam senjakala
Dan aku melihat
protes-protes terpendam,
terhimpit di bawah tilam.

....

(Rendra. "**Sajak Sebatang Lisong**" dalam **Potret Pembangunan dalam Puisi**. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. 1980)

Kita memang tidak menolak adanya sistem pendidikan yang menekankan hukum logika dan sistematika berpikir. Akan tetapi, pendidikan semacam ini tentu saja merupakan awal untuk mencapai tujuan lebih jauh ke depan. Memberikan ruang bagi dorongan-dorongan kemanusiaan, dorongan hati nurani, perlu kita lakukan dalam proses pendidikan itu. Dengan demikian, kita pun tidak berada dalam kotak yang terbelah-belah. Berpikir sistematis dan logis memang perlu, tetapi hendaknya disertai dengan getar-getar kehidupan yang seringkali bersifat intuitif. Bukanlah dalam kehidupan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan otak? Inilah pentingnya sentuhan kemanusiaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas bagi kita dewasa ini. Pendidikan dan berbagai pengajaran bidang studi sebagai wujud operasionalisasinya, bagi kita, meniscayakan menjadi saiah satu sarana untuk meng-Indonesia.

Perspektif memerdekakan harus selalu menjadi "khitah" dalam

pelaksanaannya agar manusia-didik mencapai kepribadiannya.

Dengancara demikian, pendidikan tetaplah merupakan proses pembudayaan dan karenanya, harus berorientasi pada tumbuh-kembangnya kesadaran budaya.

Ujung akhir yang dicapai lewat upaya semacam itu bukanlah situasi *necrophily*, yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang wujudiah yang tidak berjiwa kehidupan, melainkan situasi *biophily*, yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang maknawiah yang berjiwa kehidupan, termasuk jiwa keindonesiaan. Pendidikan sebagai proses pembudayaan mengandaikan adanya visi dan misi sebagai *subversive-force*, yakni berfungsi mengubah dan memperbaharui keadaan, sekaligus menyadarkan dan membebaskan manusia yang terlibat di dalamnya.

Pada sisi lain, pendidikan yang memerdekakan berarti menempatkan subjek yang terdapat di dalamnya dalam situasi dan kondisinya yang berada dan hidup bersama dengan subjek-subjek lain, baik di dalam sifatnya yang internal maupun eksternal. Dengan cara demikian, subjek pun diharapkan memiliki kesadaran terhadap keperi-adaannya sendiri.

Karenanya, subjek-subjek tersebut harus mampu menjadi pencipta bagisejarahannya sendiri, sebagai salah satu imperatif yang muncul dari keperiadaan semacam itu. Sebagai konsekuensinya, mereka juga diharapkan mampu mengatasi situasi-situasi batas yang mengekangnya yang berpeluang muncul akibat "ada bersama." Dengan demikian, tindakan "*praxis*"-nya dalam proses "menjadi" (*becoming*) akan terasa sebagai upaya yang "tak pernah selesai," yang di dalamnya tidak hanya terbayang adanya proses penyesuaian terus-menerus, tetapi sekaligus juga proses integrasi

untuk menuju dan menjadi pribadi yang utuh. Pada gilirannya, pendidikan semacam inilah yang diharapkan mampu menjaga tetap terhayatnya nilai-nilai keindonesiaan.

Semoga.

Balong-Pakembinangun: 5 September 2007



PENDIDIKAN SEBAGAI REKAYASA STRUKTURAL MASYARAKAT

Oleh Anies Baswedan

(Pidato Ilmiah Disampaikan pada Dies Natalis Ke-43
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta 2008)

Permintaan itu datang mengagetkan: memberikan pidato Dies? Tertegun dan gundah. Saya masih berfikir, dan tidak langsung saya jawab. Saya mencoba memahami mengapa saya dibebani tugas yang teramat berat ini. Universitas Negeri Yogyakarta adalah bagian besar dari memori sejak masa kecil. Aneh rasanya bila anak yang dahulu bermain di kampus UNY ini lalu harus pulang kampung untuk memberikan pidato Dies Natalis di hadapan para orang-tuanya, generasi guru besar dan sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan.

Ada pertanyaan, kenapa saya? Bukankah, pidato Dies itu porsinya para guru besar? Padahal saya ini baru mulai belajar ingin jadi intelektual, itupun masih belum kesampaian. Jawaban awal saya saat mendengar permintaan itu adalah saya tidak bisa menulis karena kendala waktu yang luar biasa. Pekerjaan dan kegiatan yang sedang menggunung saat ini tidak menyisakan cukup waktu untuk melakukan riset dan menulis dengan tenang dan baik. Apalagi untuk menulis sebuah karya ilmiah yang serius bagi sebuah pidato Dies. Tapi alasan itu dijawab dengan tangkas oleh Pak Sardiman: tidak perlu makalah ilmiah dan gunakan paper yang sudah ada. Tumbang seketika alasan saya. Akhirnya, setelah timbang-timbang maka dengan mengucap bismillah saya jawab bersedia. Tetapi harap dimaklumi bila pidato Dies ini lebih terasa seperti esai.

Tantangan kedua saya adalah mencari tema. Dalam surat yang saya terima beberapa hari kemudian, dituliskan bahwa tema Dies Natalis ke 43 ini adalah "Membangun Insan Cendekia atas Dasar Nilai-nilai Keindonesiaan." Sebuah tema besar dan menantang. Lama sekali saya putar-putar tema dan bolak-balik teks, mencari gerangan apa yang kiranya pantas dijadikan sub-bahasan sebagai "kado" dalam Dies Natalis ini. Belum juga bisa menulis. Lalu teringat saya pada sebuah tulisan dari seorang sastrawan tersohor, Taufiq Ismail, tentang sholat yang dimuat di Jurnal Ulumul Qur'an di awal tahun 1990-an, jurnal kebanggaan anak-anak mahasiswa. Harganya mahal dan bacanya sulit. Saya baru kuliah tahun-tahun pertama, dan rasanya kalau sudah baca Ulumul Qur'an itu sudah *top*, sudah mendekati ciri intelektual.

Di artikel itu Taufiq Ismail bercerita tentang Sholat. Katanya dalam sholat dia sering mendapatkan kata-kata luar biasa untuk

puisipuisinya. Saya membayangkan betapa hebat sholatnya, darinya muncul inspirasi yang membukakan kerutan-kerutan otak, lalu memunculkan kata-kata memukau. Saya bayangkan puisi-puisi hebatnya merekah melalui sholat. Ya, memang Allah itu maha pujangga.

Lalu Taufiq Ismail sendiri batalkan bayangan saya itu, katanya itu bukan hembusan para malaikat apalagi ilham. Itu bisikan setan. Menurut tafsir Taufiq Ismail, di alam ghaib itu ada segerombolan setan yang penyair. Mereka itu jago-jago syair dan spesialis mengganggu sholatnya para penyair dengan menyelipkan kata-kata puitis yang memukau, sehingga hilang khusuknya. Konsentrasi buyar, lalu yang diingat hanyalah kata-kata memukau itu. Jadi, jangan *ge-er* dulu, jika dapat inspirasi ketika sholat, itu belum tentu kiriman khusus dari Tuhan tapi bisa jadi sekadar bisikan setan.

Belajar dari cerita Taufiq Ismail itu, saya jadi ingin berkenalan dengan setan-setan yang akademisi bidang pendidikan. Siapa tahu bisa membantu memecahkan kebuntuan. Saya sholat sambil berharap dapat inspirasi, sub-bahasan apa yang pas untuk pidato Dies Natalis ini. Bayangan saya, kalau ternyata inspirasi itu menyelinap saat sholat, maka saya ulang saja sholatnya dengan niat baru. Nekat juga, tapi tak apalah, siapa tahu membantu. Coba-coba beberapa kali dan gagal, tak kunjung datang bisikan yang saya harap-harap itu. Mungkin tidak satupun dari gerombolan setan itu mengganggu saya akademisi ataupun intelektual bidang pendidikan, jadi mereka enggan mampir. Bidang saya memang ilmu politik dan ilmu ekonomi, jadi setan spesialisasi ilmu politik dan ilmu ekonomilah yang mampir, padahal mereka sedang tidak dibutuhkan.

Universitas Negeri Yogyakarta, terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, adalah institusi istimewa bagi saya. Disinilah tempat Ibu saya, Aliyah Rasyid Baswedan mengabdikan hampir 40 tahun. Karena itu dalam semangat "Membangun Insan Cendekia" dan dalam konteks "ke-Indonesiaan" seperti tema Dies Natalis, saya ingin menggunakan potret perjalanan Ibu saya sebagai ilustrasi sebuah transformasi sosial di Indonesia. Mohon dimaafkan bila ini melanggar kelaziman sebuah pidato Dies Natalis.

Ibu dan generasinya merupakan representasi dari anak-anak bangsa yang berselancar diatas gelombang baru kebangkitan bangsa pasca kemerdekaan. Inilah bacaan sederhana tentang anak-anak bangsa, yang dalam kesempatan ini disebut-paksa sebagai pidato Dies Natalis.

Ibu lahir dan besar di Kuningan, Jawa Barat. Ketika lulus SMP tahun 1956, belum ada SMA di kota kecil dan dingin di kaki Gunung Ciremai itu. Waktu itu memang baru beberapa tahun sesudah Republik selesai baku tempur dengan penjajah. Ibu yang bercita-cita jadi guru itu harus hijrah ke Cirebon agar bisa meneruskan masuk SMA. Hingga kemudian melanjutkan pendidikan tinggi Universitas Padjajaran Bandung.

Ibu adalah representasi generasi pertama yang secara tenang mulai bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Anak muda yang menikmati pendidikan sebagaimana bangsa-bangsa merdeka lainnya. Pasca kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an pemerintah melakukan usaha serius untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di semua kabupaten di Indonesia. Minimal satu SMA di setiap kabupaten, terutama di luar Jawa.

Inisiatif itu merupakan Inisiatif revolusioner di jamannya.

Karena pendirian SMA itu bukan masalah pembangunan gedung, tetapi mendirikan sebuah institusi pendidikan lengkap dengan gurugurunya. Sedangkan waktu itu tidak cukup guru. Jika hanya untuk mengajar di SD dan SMP masih ada guru yang memadai, tetapi tidak cukup jumlah guru yang bisa mengajar SMA. Yang terjadi adalah mahasiswa dikerahkan menjadi guru SMA melalui program Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) yang dipelopori oleh Almarhum Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjosoemantri, dimana banyak tokoh-tokoh mahasiswa dikirim mengajar SMA di pelosok negeri.

Di tahun 1950-an inilah untuk pertama kalinya, anak dari semua strata sosial-ekonomi masyarakat Indonesia bisa masuk SMA. Efeknya adalah pada tahun 1960-an terjadi ledakan jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Lalu muncullah mahasiswa yang berasal dari segala lapis di masyarakat. Jika sebelum kemerdekaan para mahasiswa itu hampir bisa dipastikan berasal dari kalangan strata sosio-ekonomi atas; baik aristokrat, pengusaha besar, pegawai Belanda tapi kini di awal tahun 1960-an mulai marak mahasiswa yang "bukan siapa-siapa". Anak orang biasapun bisa jadi mahasiswa.

Setelah mereka lulus pendidikan tinggi, mereka memasuki dunia pasca universitas atau dunia kerja yang relatif masih serba kosong. Bangsa ini belum ada apa-apanya, baru mulai membangun. Sehingga masuk ke sektor apapun, anak-anak generasi baru ini praktis menghadapi *no competitor*. Singkatnya, peluang di sektor apapun masih terbuka luas, seakan semua menawarkan peluang kemajuan. Mereka benar-benar generasi pertama yang merasakan manfaatnya kemerdekaan.

Anak-anak muda kuliah di era 1960-an ini yang di kemudian hari menjadi kelas menengah pertama di republik ini. Anak-anak muda yang "bukan siapa-siapa" menjadi kelas menengah baru di daerah-daerah urban. Mereka ini juga yang turut menjadi penggerak pembangunan dan penarik urbanisasi. Terjadilah pertumbuhan kelas menengah yang memiliki kekuatan ekonomi, tapi karena berada di bawah Orde Baru, mereka tumbuh tanpa kekuatan politik. Mereka ini pula yang setiap tahun menjadi simbol mudik lebaran. Pulang kampung membawa cerita sukses dengan berbagai perangkat materi pembuktiannya, seperti ajarnya kelas menengah di berbagai negeri.

Kita sering tidak sadar bahwa mereka itu adalah produk sebuah rekayasa sosial pada tahun 1950-an. Intervensi pemerintah melalui pendirian SMA di setiap kabupaten di Indonesia merupakan sebuah rekayasa sosial yang jenius. Mungkin saja, yang melakukan rekayasa ini tidak sadar kalau sedang melakukan rekayasa sosial. Mungkin mereka semata-mata menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi, sebenarnya yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah sebuah intervensi struktural terhadap struktur sosio-ekonomi sebuah bangsa.

Apa yang menarik dari transformasi ini? Rekayasa melalui pendidikan dapat menyerap anak-anak muda dari semua level. Di tiap-tiap daerah terdapat variasi penduduk berdasarkan kekuatan ekonomi, politik dan sosial statusnya. Ada yang kaya, miskin, penguasa, dan rakyat biasa. Tetapi anak-anak dari berbagai kalangan ini memasuki ruang pendidikan yang sama. Anak bupati dengan anak orang biasa sekalipun, umumnya masuk ke SD, SMP,

dan SMA yang sama. Yang menentukan posisi mereka berikutnya adalah kinerjanya selama masa sekolah/kuliah dan tentu saja, relasi yang dibangunnya. Jadi, yang menarik dari rekayasa pendidikan di masa itu adalah segala level masyarakat masuk ke dalam jalur pendidikan yang sama.

Tetapi, coba lihat situasi pendidikan sekarang ini? Mulai tahun 1980-an dan menguat di dekade 1990-an, apalagi setelah pasca krisis keuangan, warga kelas menengah baru ini menginginkan anak-anaknya bisa *survive* di dunia masa depan. Impian mereka tentang masa depan anak-anaknya bukan saja domestik, tapi dunia global. Pada saat itu mereka jauh lebih selektif dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya. Sayangnya tidak semua sekolah milik pemerintah memiliki kualitas pendidikan yang tinggi dalam mengantisipasi persaingan global. Maka muncullah pendidikan SD, SMP, dan SMA swasta yang menawarkanantisipasi masa depan di dunia global, menerapkan bahasa asing, atau berkualitas internasional. Dan, itu semua mensyaratkan kekuatan ekonomi untuk bisa memasukinya.

Jika dahulu anak-anak yang berasal dari daerah/perkampungan yang sama cenderung untuk masuk sekolah yang sama. Sehingga ada *diversity* (secara sosio-ekonomi) yang tinggi di sebuah sekolah. Tapi sekarang anak-anak yang berasal dari daerah yang sama, bisa jadi akan masuk sekolah yang berbeda-beda. Yang satu pergi ke sekolah berkualitas, bahkan sebagian menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, sementara yang lainnya berangkat ke sekolah milik pemerintah yang kualitasnya sering minimal. Penyebab beda jalur pendidikan ini cukup sederhana yaitu berbedanya daya beli. Terjadilah perbedaan jalur pendidikan.

Yang satu melalui jalur pendidikan berkualitas (*quality education*). Satunya lagi melalui jalur pendidikan biasa-biasa saja, yang standarnya pun jauh di bawah. Pola seperti ini berlaku bagi SD, SMP, dan SMA.

Perguruan tinggi juga demikian, yang bisa masuk ke perguruan tinggi adalah umumnya orang yang memiliki kekuatan ekonomi cukup baik. Hanya untuk masuk saja, tanpa kekuatan ekonomi sulit masuk ke universitas. Apalagi, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeridengan tingkat kompetisi yang tinggi mensyaratkan modal yang cukup, minimal bimbingan tes yang intensif. Tentu saja ada kasus khusus, satu-dua anak yang betul-betul pintar, bisa belajar otodidak, dan menang berkompetisi. Tetapi, begitu masukpun dia akan berhadapan dengan struktur keuangan yang belum tentu sesuai dengan kekuatan diri dan daya tolong keluarganya. Yang terjadi adalah biaya pendidikan yang tinggi membuat kelas menengah bisa mengirimkan anak-anaknya masuk ke *quality education*, sementara masyarakat yang lemah secara ekonomi tidak bisa mengirimkan anaknya untuk memperbaiki kondisi mereka. Pendidikan kini menjadi penopang status-quo struktur sosio-ekonomi masyarakat Indonesia.

Apa yang berbeda? Dahulu, disparitas ekonomi tidak menghalangi masyarakat untuk mendapatkan model pendidikan yang sejajar dan sama. Bagi masyarakat dengan sosio ekonomi yang lemah, pendidikan itu bukan sekadar mencerdaskan tapi merupakan *vehicle* untuk lompat naik kelas sosial. Sekarang tidak bisa. Mereka yang berlatar belakang kuat secara ekonomi cenderung lebih berpeluang untuk masuk bidang-bidang keilmuan yang dominan dan bisa makin memperkokoh posisi

sosio-ekonominya. Yang bisa masuk ke jurusan-jurusan itu adalah mereka yang memiliki persyaratan ekonomi. Anak-anak muda yang menembus masuk bidang-bidang ilmu ini setelah lulus akan dengan cepat meniti tangga naik dan memperkuat posisi sosio-ekonominya.

Jadi, potret pendidikan masa kini jadi mirip dengan potret pendidikan Indonesia pra-kemerdekaan, dimana orang-orang yang secara struktural berada di papan atas yang bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah bermutu. Bagi kalangan yang lemah secara *financial*, desakan ekonomi yang luar biasa membuat mereka lebih merespon tuntutan jangka pendek yaitu survival, dan mengalahkan tuntutan jangka panjang yaitu pendidikan.

Bagaimana ke masa depan? Efek jangka panjangnya, kita akan melihat kekuatan kelas menengah atas (*upper middle class*) yang makin besar tetapi tidak memperbesar ukuran kelas menengah secara keseluruhan karena tidak ada suplai dari kelas bawah. Masyarakat yang secara sosial ekonomi berada di tingkat yang rendah tidak mendapat peluang untuk masuk menjadi kelas menengah melalui pendidikan.

Jadi, kalau dahulu setelah era kemerdekaan, kelas menengah di Indonesia tipis, kelas atasnya kecil, dan kelas bawah besar. Sebagian dari kelas bawah itu kemudian naik ke kelas menengah. Sehingga kelas menengah itu mengalami pembesaran. Sekarang kelas menengah itu tidak mengalami pembesaran, tetapi relatif stabil dan tetap Ukurannya.

Kalau kondisi seperti ini tidak dilakukan intervensi maka kita akan menyaksikan sebuah lapis generasi baru yang berpotensi untuk frustrasi dan marah karena secara struktural terhambat

untuk bisa maju dan meraih keberhasilan. Ketika pendidikan berkualitas itu terjangkau oleh semua kalangan maka kegagalan itu bukan karena kendala struktural tetapi karena faktor-faktor lain yang lebih bersifat individual/personal. Secara struktural tidak ada kendala.

Dalam kondisi sekarang, berhasil atau gagalnya menggunakan pendidikan sebagai kendaraan naik kelas itu banyak disebabkan oleh kendala struktural. Berbagai kalangan masyarakat sekarang seakan terkunci, tidak bisa memperbaiki kondisi sosial ekonominya karenasecara struktural mereka tidak memiliki peluang. Untuk saat ini mungkin belum terasa sebagai masalah karena sebagian dari mereka masih berusia muda belum masuk usia *mature* (dewasa).

Tetapi dalam hitungan belasan tahun saja, yaitu ketika generasi baru ini menginjak usia 35-50 tahun. Usia dimana mereka mulai menyadari konsekuensi struktural yang menimpa dirinya dan lingkungannya, maka akan muncul kesadaran bahwa generasi anak keturunannya berpotensi akan mengalami problem yang sama sebagaimana dia. Dia pun mulai sadar bahwa ini adalah keterjebakan struktural yang akan menimpa generasi-generasi berikutnya. Keterjebakan struktural seperti ini berpotensi mengakibatkan equilibrium sosial politik jadi semu dan temporer. Selain, tentu saja, absennya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Janji kemerdekaan sebagai jembatan emas itu telah lunas dibayarkan untuk kelas menengah baru Indonesia, tetapi belum dibayar lunas bagi masyarakat yang masih di kelas bawah. Masih ada hutang amanah konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, yang dengan kata lain, membuat akses pendidikan berkualitas untuk

semua agar pendidikan jadi kendaraan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Jadi, negara dan bangsa Indonesia harus melakukan sesuatu untuk melunasinya. Dalam konteks ini rendahnya alokasi APBN (sebelum tahun 2009) untuk bidang pendidikan adalah resep mujarab bagi langgengnya keterjebakan struktural masyarakat tadi. Pendidikan pada dasarnya bukan masalah teknis mikro saja (kebijakan teknis bidang pendidikan) tetapi strategi pendidikan itu sesungguhnya sebuah rekayasa struktural atas format masa depan masyarakat Indonesia. Dan, untuk menghadapi masa depan yang kompleks serta kompetisi lintas negeri, Indonesia harus segera melakukan rekayasa struktural melalui bidang pendidikan ini agar dapat mengangkat derajat masyarakat dan menghasilkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenapa intervensi struktural ini harus segera dilakukan? Suka tidak suka, liberalisasi mobilitas sumber daya manusia akan menjadi fenomena nyata, termasuk di Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integrasi pasar di berbagai belahan dunia termasuk di Asia Tenggara maka mobilitas dan migrasi sumber daya manusia akan makin cepat terjadi. Penetrasi sumber daya manusia dari Indonesia ke luar negeri dan sebaliknya dari berbagai bangsa ke dalam wilayah Indonesia nampak *eminent*.

Apakah kelas menengah Indonesia yang sudah merasakan manfaat kemerdekaan ini akan mampu *survive* ketika menghadapi kompetisi lintas bangsa ini? Belum tentu, dengan konstelasi hasil pendidikan seperti sekarang ini, pola yang mungkin terjadi adalah anak-anak Indonesia bisa kalah pada posisi strategis, yaitu

posisi-posisi menengah ke atas di sektor pasar. Sedangkan dengan keterbatasan lapangan kerja baru (paling tidak dalam jangka pendek) dan peluang *comparative* yang ada di negara-negara tetangga membuat Indonesia cenderung mengeksport tenaga kerja murah. Bisa dipastikan mereka adalah *unskilledlabor*.

Sangat mengerikan jika kondisi itu terus terjadi, kalau tidak ada intervensi struktural maka anak-anak muda bangsa ini akan jadi penonton di pinggiran. Bukan anak-anak muda bangsa yang merebut masa depan, tetapi justru potensi bangsa ini yang dikembangkan oleh bangsa-bangsa lain. Ini akan membuat sebagian anak bangsa yang menurut konstitusi negara wajib dicerdaskan kehidupannya akan termarginalkan bukan hanya ditingkat nasional tetapi tingkat regional. Sesudah mobilitas sumber daya manusia lintas negara yang begitu tinggi itu, maka akan semakin sulitlah bagi mereka untuk merangkak naik kelas sosio-ekonomi.

Memang ada sebagian anak-anak muda Indonesia yang siap menjadi lapis terdepan dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya menduga (sebagian besar) mereka tidak berada dan bukan berasal dari universitas-universitas tersohor di negeri ini tetapi mereka bersekolah di Amerika, Eropa, Australia, India, Jepang dan berbagai negeri lain termasuk Singapura dan Malaysia. Kebanyakan mereka berasal dari kelas menengah atas Indonesia yang orang tuanya merupakan generasi yang telah lunas menerima janji kemerdekaan.

Mereka ini berpotensi menjadi garda terdepan yang siap berkompetisi secara internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka memiliki, sekurang-kurangnya, empat

keunggulan komparatif dibandingkan dengan anak-anak muda yang dididik di dalam negeri. *Pertama*, menguasai bahasa asing. *Kedua*, memiliki ilmu pengetahuan terbaru. *Ketiga*, memiliki *network* internasional. *Keempat*, memiliki *capital* (karena itulah mereka bisa sekolah di luar negeri). Ini semua menumbuhkan kepercayaan diri yang besar. Mereka tidak minder menghadapi mobilitas sumber daya manusia dari luar negeri. Maka pantaslah jika mereka yang kelak (bahkan sudah mulai sekarang) menjadi garda terdepan dalam menghadapi persaingan global.

Apa yang sebenarnya terjadi? pendorong kemajuan bangsa ini akan ada di tangan aktor-aktor terbaik Indonesia. Aktor-aktor ini dihasilkan bukan melalui rekayasa struktural yang menyerap anak-anak muda dari segala strata masyarakat tapi disuplay dari kelas menengah atas. Kondisi seperti ini akan menghasilkan sebuah strata elit nasional yang statis. Dia statis karena tidak mengalami pembesaran akibat minimnya *supply* aktor-aktor baru kedalam strata elit tersebut. Strata elit yang statis ini bisa menjadi potensi *problem* apabila batas-batas pembeda keelitannya juga merupakan pembeda dalam aspek kekuatan ekonomi, pengetahuan dan politik.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sangat sulit dicapai bila secara struktural ada kesenjangan yang luar biasa.

Kini saatnya untuk mulai melakukan perubahan. Harus dibangun kesadaran yang cepat. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat harus dengan serius menangani masalah pendidikan. Fokusnya bukan pada bagaimana membuat pendidikan jadi murah tapi pada membuatnya berkualitas meski itu berarti biaya pendidikan jadi mahal. Kuncinya kemudian adalah

jangan bebankan biaya mahal itu pada siswa, mahasiswa dan orang tua yang secara struktural berada di strata bawah secara sosio-ekonomi. Infrastruktur pendidikan yang bagus tentu mahal dan disinilah peran negara itu perlu dominan. Negara menjadi penjamin bahwa pendidikan berkualitas bisa diakses oleh anak-anak yang miskin sekalipun agar beberapa waktu kemudian mereka menjadi kelas menengah dan sudah tidak perlu lagi berada dalam subsidi negara. Sebuah rekayasa sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mensejahterkannya.

Ikhtiar ini bisa dijalankan melalui institusi pendidikan negeri dan swasta, serta program-program filantropis/beasiswa secara bersama-sama. Ada berbagai gagasan yang pernah muncul dan pantas untuk diperdebatkan lebih jauh. Misalnya, kewajiban sekolah swasta berkualitas untuk mendidik anak-anak tak mampu tapi potensial. Seperti halnya rumah sakit, sehebat apapun rumah sakit, harus punya ruang kelas tiga untuk menampung masyarakat yang tidak mampu. Lalu pemerintah intervensi dengan menanggung biaya pendidikan itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekaligus menjaga jangan sampai pihak swasta yang sudah berperan menghasilkan pendidikan berkualitas justru harus dibebani tanggungjawab yang sesungguhnya merupakan amanah konstitusi pemerintah. Ini adalah salah satu contoh terobosan agar anak-anak muda bangsa berpotensi merasakan masa depan yang sama cerahnya meski mereka ditakdirkan lahir di keluarga yang berkekuatan ekonomi sangat berbeda.

Saat ini juga bermunculan berbagai lembaga filantropis pemberi beasiswa bagi anak-anak ekonomi lemah. Ada terobosan-

terobosan kreatif yang mungkin bisa diadopsi oleh pemerintah dan berbagai institusi pendidikan. Misalnya sebuah skema yang menggunakan tesis bahwa anak ranking 1 sampai 10 di sekolah itu sering berlatar belakang ekonomi yang baik. Fasilitas belajar mereka tersedia, buku lengkap, bahkan bisa ikut kursus-kursus. Sementara anak-anak yang mungkin tidak kalah cerdas tapi karena situasi sosial dan ekonomi mereka tidak bisa memiliki nilai tinggi. Dalam kondisi begini, intervensi perlu dilakukan. Sebuah lembaga filantropis menyadari hal ini dan secara strategis mereka memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, meski rankingnya dibawah 10. Dengan cara itu mungkin akan menyamakan mereka di masa depan.

Singkatnya, kita harus segera menyiapkan sebuah rekayasa masa depan melalui pendidikan, terutama di tingkat pendidikan tinggi. Kita tidak bisa mendiamkan proses terbentuknya struktur yang menghalangi tersedianya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua tentu sepakat bahwa masyarakat kita harus jadi winner di dalam negeri dan sanggup memegang posisi-posisi kunci di republik ini. Jika ikhtiar re-engineering ini bisa segera dilakukan, maka dalam waktu separuh abad struktur baru yang mensejahterakan itu akan bisa dinikmati di Indonesia.

Lima dekade lalu pemerataan pendidikan dilakukan dan kini terbentuk lapis terdidik, berkekuatan ekonomi dan politik serta mampu secara independen menyiapkan generasi mudanya. Dan ditengah-tengah tekanan ekonomi yang luar biasa ini. Saya membayangkan puluhan juta orang tua yang merasa terjepit untuk memilih antara kelangsungan hidup sehari-hari atau penyiapan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Saya

membayangkan para orang tua, di malam hari menatap wajah anak-anaknya yang sedang tidur sambil bertanya pada diri sendiri seperti apakah masa depan anak-anak itu. Jika beban penyiapan masa depan yang lebih baik (untuk anak-anaknya) bisa diambil alih atau ditopang oleh negara atau badan-badan lain, maka beratnya beban ekonomi kekinian, akan terimbangi dengan perasaan optimis akan masa depan yang lebih baik. Ini adalah contoh mikro bagaimana pendidikan berkualitas bagi semua akan menghasilkan hope dan dapat menyingkirkan kefrustasian.

Karena itu di kesempatan Dies Natalis ini, kita jadikan sebagai tanda bahwa dalam dekade-dekade ke depan harus muncul generasi baru dari berbagai kalangan, dan bisa membayar lunas janji kemerdekaan untuk seluruh anak bangsa, muncul generasi baru yang cerdas dan sejahtera.

***



**PENDIDIKAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL
UNTUK MEMBANGUN DAN
MENGOKOHKAN KOMITMEN
KEBANGSAAN PESERTA DIDIK
(Suatu Tinjauan Sosio-pedagogis)**

Oleh:

Prof. Dr Udin Saripudin Winataputra

Guru Besar FKIP dan Direktur PPs Universitas Terbuka

*Yang terhormat, Bapak Ketua beserta seluruh anggota Prosesi
Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta;*

*yang saya hormati para Undangan dari berbagai kalangan,
dan*

yang saya cintai seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta;

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua,...Selamat pagi.

Mengawali orasi ilmiah ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi ruang dan waktu dan melimpahkan taufik hidayah-Nya kepada kita, sehingga memungkinkan kita dapat mengikuti *Sidang Senat Terbuka Fakultas ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;* yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Ketua dan Anggota Senat FISE-UNY, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini kepada saya, untuk mengisi acara *Orasi Ilmiah* dalam forum yang sangat terhormat ini. *Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi dan Universitas Terbuka tempat saya mengabdikan.* Namun demikian, secara jujur harus saya kemukakan bahwa tampil dihadapan Sidang Terbuka Senat, para akademisi, para pejabat, dan para undangan, membuat saya merasa betapa kecilnya saya ini. Hal ini sangat terasa karena memang saya meyakini kebenaran firman Allah S.W.T. di dalam Al Quranul Karim "*wammaa uti'um minal ilmi ilia golilann (Surat 17:Al Ism ayat 85)* yang artinya *tidak aku berikan ilmu melainkan hanya sedikit.* Bidang keilmuan yang selama ini saya geluti adalah *Kurikulum dan Pembelajaran* dengan pedagogik-subjek *Pendidikan IPS dan Kewarganegaraan.* Sungguh merupakan suatu cerminan bahwa yang saya ketahui

itu sesungguhnya hanyalah sedikit, hanya sedikit - *Illa gollilan, illa golilan-bagai setitik air dalam samudra yang maha luas-yakni samudranya ilmu Allah yang tak terhingga luas dan dalamnya.* Kini saya diminta untuk menyampaikan paparan singkat tentang *Pendidikan IPS/PKn untuk Membangun dan Mengokohkan Komitmen Kebangsaan Peserta Didik*, yang secara substantif merupakan suatu dimensi ontologi dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan kewarganegaraan sebagai wahana *nation and character building*.

Hadirin yang saya muliakan,

Apabila kita analisis secara cermat dan mendalam sebenarnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan *mision sacre* atau misi suci seluruh komponen bangsa Indonesia. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini, dan saya yakin pada masa yang akan datang, cita-cita, konsep, nilai, prinsip yang secara konseptual tersurat dan atau tersirat dalam berbagai dokumen resmi mengenai pentingnya pendidikan nasional, termasuk di dalamnya pendidikan guru, merupakan pilar utama pendidikan nasional Indonesia. (Djojonegoro:1996). Pada kalimat pertama teks Proklamasi dengan tegas dinyatakan "*Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia*".

Proklamasi merupakan titik awal memasuki kehidupan bermasyarakat-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Bagi kita kini, dan generasi mendatang. Proklamasi merupakan komitmen kolektif bangsa Indonesia untuk selalu berjuang demi tumbuh dan berkembangnya secara langgeng masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selanjutnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disyahkan oleh dan dalam Rapat Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diaktualisasikan melalui Amandemen I sd IV pada era reformasi, selain ditegaskan kembali tentang pertimbangan pokok dan pernyataan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tersurat dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga, juga dinyatakan tujuan dan dasar negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat. Dalam alinea tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk: *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”* (Republik Indonesia, 1945). Jika dikaji dengan cermat, tujuan yang ketiga, yakni *“...mencerdaskan kehidupan bangsa”*, secara tersirat mengandung arti bahwa kehidupan yang perlu dibangun itu adalah *kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang cerdas*.

Sebagaimana lebih jauh ditegaskan dalam alinea tersebut, kehidupan masyarakat-bangsa tersebut ditata dengan *Undang-Undang Dasar Negara Indonesia*, dalam susunan *Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*. Di situ juga tersirat bahwa negara Republik Indonesia adalah *negara demokrasi yang berdasarkan hukum*. Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa yang menjadi dasar kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia adalah *“Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*.

Dengan kata lain, kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan adalah *masyarakat-bangsa yang cerdas, religius, adil dan beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera*. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka “*Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran*”, dengan “*mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang*” (Pasal 31 UUD 1945). Di dalam pasal tersebut tersirat adanya upaya yang sengaja untuk mengembangkan *warga negara yang cerdas, demokrasi, dan religius*, yang secara programatik merupakan tujuan dan misi dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sangat luas dalam upaya mengembangkan *civic competence*. (NCSS:2000). Penegasan mengenai tujuan dan misi tersebut secara konsisten terus dipertahankan dalam berbagai dokumen resmi yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan, apakah tantangan dan peluang yang terbuka bagi IPS dan PKn saat ini?

Saat ini dan ke depan pembelajaran IPS dan PKn menghadapi berbagai **tantangan yang sekaligus merupakan peluang** bagi pendidik dan pendidik guru IPS dan PKn untuk secara sinergistik membangun kekuatan intelektual dan pedagogis. Marilah sejenak kita cermati berbagai konsepsi dan/atau fenomena paradoksal yang kita rasakan selama ini. Secara makro kita sama-sama menyaksikan begitu kuatnya kecenderungan perubahan masyarakat yang semakin mendunia, yang antara lain sebagai akibat dari perkembangan teknologi Komunikasi dan informasi. Di lain pihak kita juga merasakan meningkatnya kebutuhan pengokohan

negara kebangsaan yang multikultural. Secara nasional kita merasakan adanya kebutuhan akan proses pengokohan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi bersamaan itu pula kita membangun otonomi daerah yang luas pada tingkat kabupaten/kota yang dalam banyak hal cenderung kontraproduktif dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sisi lain kita juga dapat mencatat dinamika upaya pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa yang multikultural disertai instrumentasi dan praksis kehidupan politik dengan sistem multi partai yang dapat saja hal itu menjurus pada polarisasi masyarakat yang tidak menguntungkan.

Menarik pula untuk dicatat perkembangan nilai-nilai kontemporer yang mendorong berkembangnya perilaku materialistik dan hedonistik dalam masyarakat. Di lain itu terasa pula adanya kesadaran perlunya konservasi dan aktualisasi nilai-nilai tradisional dalam konteks modernisasi yang seimbang dan koheren dengan konsepsi watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam konteks dinamika keruangan kita juga menyimak kenyataan yang menunjukkan begitu kuat dan besarnya arus urbanisasi akibat pertumbuhan kota serta arus migrasi temporer pencari kerja ke luar negeri sebagai akibat dari terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Hal itu juga disertai dengan semakin lebarnya gap ketertinggalan masyarakat perdesaan yang hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Tetapi bersamaan itu pula kita menyaksikan pertumbuhan instrumentasi dan praksis ekonomi pasar yang memperluas retail perusahaan besar masuk ke daerah perdesaan. Sementara itu pula dirasakan adanya kebutuhan pengembangan ekonomi kerakyatan yang menuntut konseptualisasi dan instrumentasi yang lebih solid. Pada sisi lainnya

dapat kita catat pula paradoksal antara perwujudan konsepsi dan cara pandang wawasan nusantara yang mempersatukan Indonesia sebagai kesatuan secara geografis, politis, ideaologis, sosial, ekonomi, dan kultural dengan vulnerabilitas infiltrasi asing sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia.

Dalam dunia pendidikan kita menggaris bawahi pentingnya standarisasi pendidikan sebagai instrumentasi pengendalian mutu pendidikan sebagai wahana pembangunan bangsa *versus* desentralisasi pendidikan yang cenderung menimbulkan terbatasnya proses fertilisasi silang (*cross fertilization*) sumber daya pendidikan secara nasional. Sementara itu kita juga masih menyaksikan kuatnya tradisi kurikulum, khususnya pendidikan sosial yang berbasis materi disiplin keilmuan *versus* perlunya kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi kehidupan adaptif terhadap kehidupan yang multikultur.

Pada sisi lain tradisi pembelajaran *ekspositori* berbasis bahan cetakan mulai menghadapi pilihan dengan adanya trend pembelajaran inkuiri berbasis aneka sumber/jaringan. Hal itu juga menuntut terjadinya berbagai perubahan budaya belajar dan pembelajaran, misalnya situasi kelas pendidikan sosial yang lebih dominatif dan berorientasi guru menjadi kelas integratif berorientasi peserta didik; penilaian melalui pengetesan menjadi penilaian berbasis portofolio; figur guru yang banyak berperan sebagai penyembur pengetahuan (*disseminator of knowledge*) menjadi figur guru sebagai pengarah dan fasilitator belajar (*director /facilitator of learning*); sumber belajar berbasis bahan cetakan menjadi sumber belajar berbasis aneka sumber termasuk

jaringan elektronik; dan yang tak kalahnya pentingnya adalah pendidikan guru IPS masih terkotak-kotak menjadi pendidikan guru IPS terpadu, khususnya untuk pendidikan dasar.

Hadirin yang saya hormati, bagaimanakah konsep pendidikan IPS dan PKn mengacu pada UU No. 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas?

Dari consideran UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya akan disebut UU Sisdiknas Baru) dengan jelas dapat dipahami mengapa diperlukan adanya UU Sisdiknas baru itu. Dua pertimbangan yang sangat substansial adalah **pertama**, UUD 1945 yang mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; **kedua, ...mengamanatkan** Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kedua pertimbangan tersebut mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional Indonesia harus bersifat mengembangkan insan Indonesia yang **baik dan cerdas**.

Dalam konteks itu dikonsepsikan bahwa pendidikan itu harus merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara". Sebagai usaha sadar dan terencana maka yang harus diupayakan adalah membangun suasana belajar dan pembelajaran yang mendidik dan mencerdaskan dengan peserta didik sebagai pusatnya.

Dilihat dari dasarnya, Pendidikan Nasional secara konsisten tetap berlandaskan pada "...Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945" (Pasal 2), dengan sendirinya termasuk dengan seluruh Amandemennya. Sementara itu dalam konteks makro, pendidikan nasional berfungsi "... mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa" (Pasal 3). Dengan kata lain hasil akhir dari pendidikan nasional itu adalah berkembangnya kemampuan individu, terbentuknya watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan kehidupan bangsa yang cerdas. Untuk mencapai semua itu maka yang harus dilakukan oleh dan dalam dunia pendidikan adalah membangun proses pendidikan, tentunya termasuk pendidikan IPS/PKn yang memungkinkan "...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" (Pasal 3). Guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, digariskan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan berkeadilan; sistemik, terbuka, dan multi makna; pembudayaan dan pemberdayaan; pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas; pengembangan budaya baca, tulis dan hitung dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 4).

Pada tataran kurikuler, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah ditetapkan pendidikan kewarganegaraan, dan bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, bahasa dan seni serta budaya. Secara substantif dan pedagogis kedua bidang kajian tersebut mempunyai hubungan kontributif terhadap semua aspek tujuan pendidikan nasional dengan titik berat pada pengembangan wawasan keilmuan, kecakapan personal dan sosial-kultural, kreativitas, kemandirian, dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu proses belajar dan pembelajaran secara pedagogis dan sosial kultural menuntut adanya integrasi dari proses pemberdayaan dan pembudayaan dalam bingkai pembelajaran yang mendidik dan mencerdaskan anak bangsa dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa. Dengan demikian maka yang menjadi pilar utama pendidikan IPS dan kewarganegaraan serta humaniora adalah belajar hidup bermasyarakat (*learning to live together*) yang ditopang oleh pilar belajar untuk tahu tentang apa, mengapa, dan bagaimana (*learning to know*) dan pilar belajar untuk berbuat (*learning to do*), yang pada akhirnya dikristalisasikan dalam pilar belajar untuk hidup menjadi manusia yang utuh (*learning to be*).

Dengan substansi dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dan landasan serta substansi kurikuler sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas baru itu, maka paradigma belajar dan pembelajaran pendidikan sosial dan humaniora yang perlu dikembangkan, khususnya, untuk pendidikan dasar dan menengah adalah paradigma "*integrated social studies*" atau "studi sosial kajian sosial terpadu" sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh Hartonian (1992) sebagai "*integrated system of knowledge*".

Secara imperatif karakteristik kurikuler pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Indonesia, dapat dilihat dalam Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (Permen SKL No 23 tahun 2006) dan Peraturan Mendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (Permen SI No 22 tahun 2006) serta Peraturan Mendiknas No. 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permen No. 22 tahun 2006 dan Permen No.23 tahun 2006. (Permen Pelaksanaan SKL dan SI No 24 tahun 2006). Dilihat dari kumpulan butir rumusan kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan tampak ada rumusan kompetensi yang berkenaan dengan *social competence dan civic competence* yang secara programatik merupakan dasar dan muara pendidikan IPS. Misalnya untuk SD/MI/SDLB/Paket A terdapat kompetensi: *Mematuhi aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya (3); Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya (4); dan Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif (5)*. Untuk SMP/MTs/SMPLB/Paket B terdapat rumusan kompetensi:

Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas (4); Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional (5); Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber lain secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif (6); Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (9); Mendeskripsikan gejala alam dan sosial (10); Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

demokrasi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan menghargai karya seni dan budaya nasional (12); Memahami hak dan kewajiban dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat; (17) dan Menghargai adanya perbedaan pendapat (18).

Sementara itu untuk SMA/MAIS/MAK/Paket C terdapat rumusan kompetensi: *Berpartisipasi dalam penegakkan aturan sosial (4); Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global (5); Membangun dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber lain secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif (6); Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan (7); Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial (11); dan Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI (13).*

Untuk SMK/MAK terdapat rumusan kompetensi: *Berpartisipasi dalam penegakkan aturan sosial (4); Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global (5); Membangun dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber lain secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif (6); Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial (11); Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab (12) dan Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI (13).*

Dari semua rumusan kompetensi yang berdimensi *social competence and civic competence* pada masing-masing dan antar

satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tersebut tampak adanya penerapan konsep dan prinsip-prinsip *social studies* yang secara konseptual universal berlaku yakni; koherensi antara *scope, sequence, and continuity* ala Tyler (1954), *spiral of concept developmen* ala Taba (1962), *expanding environment approach* ala Hanna (1972); *basic human activities approach* ala Sugrue and Sweeney (1964); *general thematical approach* ala Kenworthy (1967); dan *civic competence development* ala NCSS (1994) dan CCE (1972). Dengan kata lain model IPS ala Perrmen 23 dan 22 tahun 2006 mengandung paradigma ***eclectic social studies (ESS)***. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana para pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) memahami dan memaknai paradigma *ESS* tersebut dan mewujudkannya dalam silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan proses pembelajaran secara konsisten dan koheren.

Hadirin yang saya hormati, bagaimana masa depan Pendidikan IPS dan PKn?

Paradigma *eclectic social studies (ESS)* yang secara sengaja atau secara coba-coba dimuat dalam SKL, secara filosofis terkait pada kerangka filosofik sebagaimana ditegaskan oleh Hartonian (1992) pendidikan IPS seyogyanya mengacu pada konsep “*integrated knowledge system*” atau sistem pengetahuan yang terpadu. Paradigma ini dilandasi oleh pertimbangan psikososial-pedagogis bahwa hakikat dan kenyataan kehidupan manusia yang bersifat terpadu, dan oleh karenanya pendidikan sosial seyogyanya dirancang demikian rupa seperti keterpaduan manusia dengan seluruh konteks kehidupannya. Bila tidak demikian maka

pendidikan sosial tidak akan mampu membekali dan memfasilitasi peserta didik untuk hidup dengan cerdas dan baik di dalam dan melalui kehidupan masyarakat. Lebih dari itu perlu dipahami bahwa khususnya untuk sekolah dasar yang menurut Piaget (1970) peserta didiknya itu berada pada tahap berpikir kongkrit atau *“concrete operation”* menuju berpikir formal atau *“formal operation”*, maka pembelajaran dengan pendekatan terpadu sangatlah penting.

Secara teoritik terdapat sejumlah model pengembangan pengalaman belajar atau *“learning experiences”* IPS terpadu yang secara umum dapat dikelompokkan kedalam beberapa pendekatan. Pertama, **pendekatan struktural** atau *“structural approach”*. Pendekatan ini berpijak pada konsep atau generalisasi yang diturunkan dari struktur keilmuan disiplin ilmu-ilmu sosial (geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, hukum) dengan tujuan agar peserta didik memahami konsep suatu disiplin dengan cara yang lebih bermakna (*meaningfull*). Termasuk ke dalam pendekatan ini model pembelajaran konsep atau generalisasi secara spiral atau *“spiral development of concept or generalization”* yang dikembangkan oleh Hilda Taba (1967), dan model *“roda kegiatan dasar manusia”* atau *“wheel of basic human activities”* yang dikembangkan oleh Paul R.Hanna (1970). Konsep terpadu yang dikembangkan Taba adalah perubahan budaya, perbedaan, dan saling ketergantungan (*cultural change, difference, interdependence*). Sementara yang dikembangkan oleh Hanna adalah konsep-konsep produksi, perdagangan dan konsumsi; transportasi; komunikasi; pendidikan; rekreasi; proteksi dan konservasi; organisasi dan pemerintahan; ekspresi kebutuhan

estetika dan spiritual; penciptaan alat dan teknik baru. Baik konsep-konsep model Taba maupun model Hanna dikembangkan secara spiral untuk berbagai tingkat atau kelas (1 s/d 6) dengan menyertakan konteks kehidupan dari lingkup keluarga kampung, desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, dan sampai ke lingkup Negara (*expanding community approach*).

Kedua, pendekatan fungsional atau "*functional or problem approach*". Pendekatan ini berorientasi pada pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat dengan tujuan agar peserta didik mampu menggunakan wawasannya secara kritis untuk memecahkan masalah sosial. Model pendekatan fungsional yang sangat terkenal adalah model Bruner's "*Man: A Course of Study*" (Suatu Kajian Tentang Manusia) untuk menjawab antara lain pertanyaan "*Apa yang membuat manusia itu bersifat manusiawi (bermasyarakat, berbudaya, beradab)?*" Masalah lain yang dapat dijadikan pusat kajian adalah masalah sosial kontemporer seperti korupsi, masalah yang paling berarti dalam masyarakat misalnya kemiskinan; dan masalah nilai misalnya kebohongan publik. Ketiga, pendekatan antar bidang atau "*interfield approach*." Pendekatan ini memusatkan perhatian pada isu-isu yang besar yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu sosial dan humaniora dengan tujuan agar peserta didik mampu berpikir secara interdisipliner (*interdisciplinary*). Termasuk ke dalam pendekatan ini adalah model kegiatan inti dalam masyarakat misalnya pembangunan; perubahan kebudayaan misalnya Renaissance (Kebangkitan peradaban); model kajian wilayah misalnya kajian masyarakat di daerah Batu Malang, Puncak Bogor; Riau lautan dll dan kajian suatu peristiwa besar misalnya Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Harus diakui bahwa setiap model pembelajaran IPS terpadu dalam kadarnya yang berbeda mengusung berbagai misi psiko-pedagogis konstruktivisme, ko-konstruktivisme, kontekstualisme, sosialisasi, enkulturasi. Misi tersebut menekankan bahwa proses belajar IPS bertujuan memfasilitasi peserta didik untuk membangun pengetahuan, beradaptasi dengan lingkungan, membudayakan dirinya dan lingkungannya, mendewasakan diri dalam lingkungannya. Oleh karena itu pembelajaran IPS seyogyanya dikembangkan menjadi pembelajaran IPS yang kuat atau “*powerful social studies*” (NCSS: 2000) yang secara konseptual ditandai oleh prinsip-prinsip “bermakna, integratif, berbasis-nilai, menantang, dan mengaktifkan” (*meaningful, integrative, values--based, challenging, active*).

Sementara itu bila kita mau melakukan *brenchmarking* terhadap model lain, model *History-Social Science California* (2001) dapat memberi inspirasi baru dalam mereposisi dan mereorganisasi kurikulum dan pembelajaran PKn dan IPS di Indonesia ke depan. Di dalam model tersebut dikemukakan tiga *strands* (cabang) tujuan, yakni *democratic understanding and civic values, knowledge and cultural understanding, dan skills attainment and social participation* (California Dept of Education, 2001: 1019). Yang termasuk dalam tujuan pengembangan *democratic understanding and civic values* adalah *national identity, constitutional heritage and civic values, rights, and responsibilities*. Sementara itu yang tercakup dalam tujuan pengembangan *knowledge and cultural understanding* adalah *historical literacy, ethical literacy, cultural literacy, geographic literacy, economic literacy, dan sociopolitical literacy*. Sedangkan yang termasuk dalam *skills attainment and*

social participation adalah *basic study skills, critical thinking skills, dan participation skills*.

Situasi paradoksal tersebut mengisyaratkan *bagaimana seharusnya para pakar dan praktisi bersama-sama mereposisi dan selanjutnya merancang dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran PKn dan IPS yang adaptif terhadap berbagai dimensi perubahan kontekstual baik dalam kancah global, nasional, maupun lokal*. Dalam kaitan dengan hal tersebut sekali lagi kita maknai peringatan dari Hartonian (1992) yang dapat kita ungkapkan ketahuilah bahwa kehidupan ini bersifat terpadu satu sama lain saling tergantung tak ada yang sungguh berdiri sendiri. Kecuali kita merancang dan mengembangkan PKn dan IPS seperti hakikat dan realita kehidupan itu begitu rupa, maka sesungguhnya kita sudah mengorbankan peserta didik anak bangsa calon pemimpin di masa depan menghadapi resiko besar. Dengan kata lain paradigma *pembelajaran PKn dan IPS* berbasis kehidupan, khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang seyogyanya kita kembangkan guna meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar PKn dan IPS dalam konteks pendidikan dasar dan menengah.

Secara imperatif dalam Pasal 37 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, mata pelajaran IPS termasuk mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dinyatakan bahwa mata pelajaran IPS mencakup geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lainnya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pengertian, keterampilan analitis sosial yang berguna untuk hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan kedudukan dan karakteristik IPS dalam PP-SNP No. 19 tahun 2005.

Hadirin yang saya hormati apakah peran fungsional kita?

Marilah sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana seyogyanya kita yang berada dalam lembaga pendidikan tenaga kependidikan itu, termasuk di lingkungan FISE Universitas Negeri Yogyakarta, mau dan mampu memberikan kontribusi optimal dan langgeng untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kontribusi yang kita berikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia itu harus dalam koridor perwujudan visi dan misi pendidikan untuk menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang *kompeten, profesional, dan berkarakter*. Bukan pendidikan yang hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang berijazah saja, tetapi sumber daya manusia yang berijazah dan berkemampuan profesional secara nyata. Seperti diingatkan Bung Karno yang mengutip pendapat Pemimpin Perancis kenamaan *Jean Javies* (Suparman, Wardani, dan Winataputra: 2002) yang filosofinya masih tetap relevan “...*men kan niet ondetwijsen wat men will, men kan niet onderwijsen wat men weet, men kan alleen ondetwijsen wat men is..*”. Seseorang tidak bisa mendidik karena ia (sekedar) mau, juga seseorang tidak bisa mendidik karena ia (sekedar) tahu, tetapi seseorang hanya bisa mendidik (dengan baik) apabila ia memang mampu menampilkan dirinya secara utuh sebagai pendidik yang mau dan tahu serta berdedikasi secara nyata. Pendidik dan tenaga kependidikan, yang dihasilkan oleh LPTK termasuk STKIP Satyanagara yang kita cintai dan banggakan, yang potensial untuk memberikan kontribusi terhadap proses kolektif mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia adalah mereka yang *terdidik baik-well educated dan ten baik-well trained*, sehingga mereka menjadi pendidiki PS /PKn yang benar-benar

bevoeg-berkewenangan en bekwaam-berkeahlian. (Suparman, Wardani, dan Winataputra: 2002).

Hadirin yang saya muliakan,

Sampailah saya pada bagian akhir *Orasi Ilmiah* ini. Kepada yang terhormat Bapak Ketua dan seluruh anggota Prosesi Senat FISE Universitas Negeri Yogyakarta dan para undangan dan hadirin, saya sampaikan ucapan terima kasih atas kesabarannya untuk menyimak pemaparan sederhana ini. Selanjutnya rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memungkinkan saya mendapat kesempatan untuk berada di tengah-tengah hadirin yang mulia yang sedang melaksanakan Dies Natalis, dan untuk itu saya ucapkan selamat dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir bathi kepada Anda semua untuk mampu mengemban *mission sacre* sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, berdedikasi dan berkarakter. *Vivat academia, vivat professores....* Akhirul kalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian Orasi Ilmiah ini.

Bilahittaufik walhidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Jakarta, 7 September 2009

Prof. Dr. H. Udin S.Winataputra, M.A. Guru Besar FKIP dan
Direktur PPs Universitas Terbuka, Jakarta

[e-mail: udin@mail.ut.ac.id](mailto:udin@mail.ut.ac.id)

Telp: 0815 871 4481/ 0812 953 6100

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin,A. (2003) *Memahami Pro-Kontra RUU Sisdiknas*, Jakarta: Panja RUU Sisdiknas.
- Banks, J. A. (1977) *Teaching Strategies for the Social Studies : Inguity, Valuing, and Decision Making*, Reading :Addison —Wesley Publishing.
- Banks, J. A. (1990) Citizenship for a Pluralistic Democratic Society in Rauner, M. (1999) *Civic Education :An Annofated Bibliography*, CIVNET.
- Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. (1977) *Defining the Social Studies*, Virginia : National Council for The Social Studies.
- Barr, R. D., Barth, J. L., Shermis, S. S. (1978) *The Nature of the Social Studies*, Palm Spring :An ETS Pablication.
- Beeby, D. (1976) *Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Brameld, T. (1965) *Education as Power*, USA: Holt, Rivehart and Winston, Inc.
- Capra, F. (1998) *Titik Balik Peradaban : Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya.
- Carr, W., Kemmis, S. (1986) *Becoming Critical : Education, Knowledge and Action Research*, Victoria : Deakin University
- Center for Civic Education/CCE (1994) *Civitas: National Standards for Civics and Government*, Calabasas : CCE
- Center for Indonesian Civic Education (1999) *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*, Bandung:CICED
- Civitas International (1998) *International Partnership for Civic Awareness Conference Report*, Strasbourg : Civitas International
- Cheng,Y.C.(1999) *Curriculum and Pedagogy in the New Century: Globalization, Localization and Individualization for Multiples Intelligences*, Bangkok: UNESCO-ACEID

- Cogan, J. J., (1999) *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung; CICED
- Depdiknas (2002) *Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar*, Jakarta: Ditjen Dikti
- Dewan Perwakilan Rakyat RI (2003) *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sekretariat DPR RI
- Djojonegoro, W. (1996) *Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Derricott, R., Cogan, J. J. (1998) *Citizenship for the 21^d century :An International perspective on Education*, London : Kogan Page
- Djalil, A. (2004) *Memperkokoh Pendidikan Guru*, Jakarta (makalah yang tidak diterbitkan)
- Hahn, C.L. dan Torney-Purta, J. (1999) The IEA Civic Education Project: National and International Perspectives, dalam *Social Education*, 63,7:425-431.
- Hartoonian, H. M. (1992) *The Social Studies and Project 2061 :An Opportunities for Harmony*, dalam *The Social Studies*, 83; 4; 160-163
- Houston, R.W. et al (1996) *Touch the Future Teach*, New York: Macmillan Co
- Lickona, T. (1991) *Educating for Character : How our Schools can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books
- Naisbitt, J. (1996) *Megatrends Asia : Delapan Megatrend Asia yang Mengubah Dunia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- NCSS (1994) *Curriculum Standards for Social Studies: Expectation of Excellence*, Washington
- NCSS (1989) *Charting A Course : Social Studies for the 21st Century*, Washington : National Commission on Social Studies in the Schools
- NCSS (1992) *In Search of a Scope and Sequence for Social Studies* dalam *Social Education*, 48; 4; 249-264
- NCSS (1994) *Curriculum Standards for Social Studies*, Washington

- Newmann, F. M. (1977) *Building Rationales for Civic Education*, dalam *Building Rationales for Citizenship Education*, (Ed. Shaver, J. P.)
- Republik Indonesia. (2003). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.
- (2003). Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta
- (2005). Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- (2003). Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, Jakarta
- (2003). Permendiknas No. 23 Tahun 2003 Tentang Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta.
- (2003). Permendiknas No. 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, Jakarta
- Sanusi, A.(1998) *Pendidikan Alternatif: Menyentuh Azas Dasar Persoalan Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama
- Shaver, J. P. (1977) *Building Rationales for Citizenship Education*, Washington : NCSS
- _____ (1991) *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*, New York : Mac Milian Publishing Co.
- Somantri, N. (1993) *Beberapa Pokok Pikiran Tentang : Penelusuran Filsafah Ilmu Tentang Pendidikan IPS dan Kaitan Struktural-Fungsionalnya dengan Disiplin Ilmu-Ilmu Sosial*, Ujung Pandang : Panitia Forum Komunikasi IV Pimpinan FPIPS IKIP dan JIPS-FKIP Universitas
- _____ (1998) *Masalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) FPIPS- Pasca Sadana IKIP sebagai " Synthetic Discipline"*, Bandung : Lembaga Penelitian IKIP Bandung.
- Stanley, W. B. (1983) *Review of Research in Social Studies Education : 1976 — 1983*, Washington : NCSS
- Suparman, A., Wardani, IGAK, dan Winataputra, U.S.(2002)

Peningkatan Mutu Pendidikan Guru Jakarta: Lemlit UT.

Welton,D.A. dan Mallan,J.T. (1988) *Children and Their World: Strategies for Teaching Social Studies*, Boston: Houghton Mifflin Co

Winataputra,U.S., (1978) *A Pilot Study of The Implementation of The SMA PMP Curriculum in BandungArea*, Sydney: Macquarie University (MA.Thesis)

(1990b) *Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah*, Jakarta: P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MEMBANGUN EKONOMI INDONESIA: PENGEMBANGAN KARAKTER DAN PATRIOTISME

Oleh: Sri-Edi Swasono

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saudara Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Yth,
Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Yth,
Para Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi Yth,
Para Dosen dan Asisten yang saya cintai,
Para Alumni yang membanggakan,
Para Civitas Akademika yang berbahagia,
Para Hadirin yang saya muliakan,

Pertama-tama saya mengucapkan Selamat kepada Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, yang merayakan Dies Natalis-nya ke-45. Semoga Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri

Yogyakarta ini tetap Berjaya dan terus memajukan diri untuk mencetak sarjana-sarjana yang tangguh, kompeten, nasionalistik dan patriotik.

Mengenai perlunya pengembangan karakter bagi anak bangsa kita, terutama dalam kaitannya dengan upaya membentuk rasa cinta Tanah Air, memelihara kebersamaan dan semangat kekeluargaan, tentulah Ki Hajar Dewantara menjadi rujukan utama kita. Ibaratnya, siapapun yang mengenyam pendidikan Tamansiswa, maka dapatlah diharapkan ia menjadi seorang nasionalis yang mengemban budi luhur. Bila kita sepakat bahwa pendidikan (dan pengajaran) dapat membentuk karakter, maka Tamansiswa-nya Ki Hajar Dewantara adalah contoh konkrit yang membuktikan kebenaran adagium pendidikan yang demikian ini.

Namun pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan pendapat Prof. Dr. Slamet Iman Santoso, salah seorang tokoh pendidikan nasional, Ketua Komisi Pendidikan Nasional (Komisi-21) di tahun 1970-an yang menjadi kebanggaan Universitas Indonesia.

Selaras dengan Ki Hajar Dewantara, Prof. Slamet Iman Santoso menegaskan bahwa tugas utama pendidikan adalah membina watak, membangun karakter. Lebih khusus dari itu ditegaskannya bahwa tujuan pendidikan yang murni ialah menyusun harga-pribadi atau *intrinsieke waarde* yang kukuhkuat dalam jiwa pelajar. Kalau tujuan pendidikan ini tidak dipegang dengan teguh maka pendidikan itu merupakan pendidikan setengah-setengah dan dengan demikian bercacat. Pendidikan yang murni mempunyai sifat-sifat seperti membuat besi-baja yang tulen, biji besi harus dipanaskan, dituang, dipande, dipilih, yang buruk dibuang, yang baik diolah dan dipande ulang sampai diperoleh baja murni.

Nyatalah tugas guru tidaklah mudah.¹⁾

Oleh karena itulah maka “Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran” dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

Apa bentuk atau wujud karakter dan patriotisme yang harus kita bangun? Pembentukan watak atau *character building* yang bagaimana? Sebelum kita lanjutkan, perlu kita beri catatan di sini bahwa *character building* merupakan suatu tugas budaya. Oleh karena itu saatnya kita berpikir ulang bahwa perihal kebudayaan harus dikembalikan ke Kementerian Pendidikan, *back-to-basics*, artinya kembali kita memiliki lagi "Kementerian PP dan K". Adalah kekeliruan yang sangat berbahaya bahwa kebudayaan direduksi ke dalam matra kepariwisataan sebagaimana saat ini kebudayaan berada dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Orasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian, yang kelima-limanya akan saya ajukan sebagai butir-butir tuntutan implisit dan spesifik bagi pembentukan watak berdasar konsensus kita untuk melaksanakan cita-cita Kemerdekaan Nasional yang telah kita tetapkan dalam rambu nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:

¹Selanjutnya Prof. Slamet Iman Santoso mentransformasi pandangannya mengenai pendidikan nasional spesifik: (1) mengembangkan semua bakat dan kemampuan seorang, ke arah sifat-sifat perwatakan pandai dan terampil, jujur, berdisiplin, mengetahui kemampuan dan batas kemampuan pribadi serta mempunyai rasa kehormatan diri; (2) menempatkan bangsa Indonesia pada tempat terhormat dalam pergaulan antar bangsa sedunia. Sifat-sifat perwatakan yang dikemukakan Prof. Slamet Iman Santoso pada butir (1) haruslah diemban dengan watak berani (*courageous*) tanpa rendah diri (*inferiority complex*) yang tidak bebas-nilai, yang tidak terlepas dari batasan nilai-nilai moral-etikal Pancasila.

I. CITA-CITA NASIONAL SEBAGAI DASAR KARAKTER PATRIOTIK

Karakter bersumber pada "harga pribadi" atau "harga diri" baik sebagai manusia individu orang-seorang maupun transformasinya sebagai komunitas anak-bangsa. Hanya manusia atau bangsa yang mandiri ²²⁾ akan mampu mengemban harga diri. Ketiadaan harga-diri pada seseorang atau masyarakat adalah cacat dalam pendidikan. Cacat ini harus diminimalkan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan kemandirian, suatu penegasan niat nyata untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan penegasan diri untuk bangkit tegak dengan keberdikarian yang utuh. Proklamasi Kemerdekaan dengan ruh kemandirian ini menjadi "*de hoogste beslissing*" (pesan tertinggi) bagi bangsa dan negara ini.

Hanya dengan kemandirian nasional sajalah ³³⁾, maka citacita

² Saya kutibkan: "...Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan. Kemandirian adalah suatu percaya-diri dan kebanggaan-diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, suatu prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuklututan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (*servile*) dan *minderwaardig* menjadi kedigdayaan. Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan *xenophobic* atau anti-asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interdependensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain mekanisme dan wujud globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku bebas-aktif..." (Dikutib dari Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010, hlm. 126).

³ Artinya secara bersama-sama menjalin dan memadukan secara sinergis kemampuan mandiri orang-seorang dari seluruh anak bangsa.

kemerdekaan nasional dapat tercapai dan terselenggara. Cita-cita kemerdekaan nasional kita sangatlah mulia, yaitu:

"...membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..."
(Pembukaan UUD '945).

Barangkali kita semua dapat mengambil kesimpulan, bahwa pendidikan dan pengajaran yang telah kita selenggarakan belumlah berhasil dalam melahirkan pemimpin-pemimpin nasional atau pun anak bangsa yang tangguh, untuk berkemampuan melaksanakan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini. Pada tataran kenegaraan, peran negara sebagai "Negara Pengurus" yang harus melaksanakan *good governance*, masih sulit kiranya dikatakan telah berhasil.

Mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia: Segenap bangsa Indonesia masih belum terlindungi oleh negara, kemiskinan dan pengangguran masih telah menyudutkan rakyat dalam keterancaman hidup yang berkepanjangan. Rakyat kita belum cukup terlindungi dari kemiskinan dan pengangguran yang penuh nestapa, meningkatnya tindak kriminal, meluasnya penggunaan narkoba, tidak terlindungi dari petaka *human trafficking* dan dari kekejaman eksploitori dan diskriminatori serta tindak kepangrehan dan kecongkakan birokrasi yang korup.

Rakyat tidak terlindungi dari kesengsaraan, kekecewaan dan kecemburuan sosial, dari ketidaktenteraman hidup karena tidak terjaminnya kerukunan nasional yang dapat membentuk *peaceful co-existence*.

Mengenai melindungi segenap tumpah darah Indonesia:

Demikian pula, segenap tumpah darah Indonesia, Tanah Air kita, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, tidaklah cukup terlindungi pula, baik keutuhan, kesuburan maupun kualitas keaneka-ragamannya (hayati, biota dan genetika) yang memukau. Sebagian pulau, seperti Sipadan dan Ligitan, telah hilang begitu saja tanpa disesali, tanpa ada pengibaran bendera setengah tiang oleh pemerintahan negara.

Timor-Timor juga hilang begitu saja karena kedangkalan simplisme, karena diabaikannya kemampuan diplomasi yang semula telah dipersiapkan dengan matang, dan juga karena kewalahan dalam penyelenggaraan perang melawan separatisme di Timor-Timor. Provinsi Aceh menjadi provinsi eksklusif yang bertentangan dengan Konstitusi dan doktrin NKRI, dengan segala resiko di masa depan, karena TNI "diperintahkan"berhenti berperang melawan separatis GAM. "Pulau-pulau terdepan" bahkan dengan seenaknya disebut sebagai "pulaupulau luar", sebagai pantulan bawah-sadar tentang keberadaannya "di luar" keutuhan *mindset* integral. *Mindset* divergen imajiner ini harus segera diluruskan berdasar adagium besi: "*sedumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludiro sun labuhi taker pati*" (bila muka dicoreng, sejengkal tanah dirampas, pecahnya dada dan tumpahnya darah 'kan kubela, nyawa taruhannya).

Hutan kita pun terbabat sampai ke kondisi sangat kritis, sekaligus menggambarkan ketidakmampuan pemerintahan negara memberantas para pembalak hutan. Laut kita ramairamai dipakai *jag japan* orang luar, dijadikan ajang jarahan neoliberalisme mancanegara. Alat penjagaan untuk melindungi segenap tumpah

darah ini tidak cukup memperoleh perhatian *urgens* seiring lemahnya kepemimpinan nasional dalam menggariskan prioritas dan strategi pembangunan. Gedunggedung dan kompleks hunian mewah lebih memperoleh prioritas dan memperoleh posisi urgensi karena dangkalnya komitmen terhadap cita-cita mengemban tugas *good governance* ini. Tidak kurang dari dua puluh undang-undang neoliberalistik telah diterbitkan yang nyata-nyata hegemonik terhadap kedaulatan ekonomi Tanah Air, yang terang-terangan merupakan penyelewengan nyata terhadap mandat konstitusi (hal ini telah menjadi topik disertasi S3 terpuji yang berhasil dipertahankan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia baru-baru ini — *lihat hlm. 44*).

Mengenai memajukan kesejahteraan umum: Memang cita-cita dan upaya memajukan kesejahteraan umum mencapai kemajuan pada pemerintahan Orde Baru. Namun kesejahteraan umum saat ini cukup memprihatinkan, tidak saja karena kemiskinan dan pengangguran makin intensif dan tetapmasif, tetapi juga makin terbentuk kesenjangan antara aspirasi baru dengan kenyataan yang ada.

Aspirasi rakyat meningkat karena terpacu oleh iklan-iklan mewah di media massa. Iklan-iklan konsumtif hanya bisa direspon secara positif oleh mereka yang kaya, lalu diterima sebagai eforia imajiner seolah-olah semua penduduk sudah mencapai tingkatan sebagai *an affluent society*. Sementara itu Pasal 34 UUD 1945, menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" belum terlaksana. Namun berdasar pesan Konstitusi melalui Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 bahwa "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan", maka Doktrin Kesejahteraan Rakyat Indonesia lebih menekankan pada *workfare* (anti pengangguran) daripada pada *welfare* (santunan altruisme filantropis).

Memang ada kemajuan dalam upaya berupa UU, seperti UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun pelaksanaannya masih tersendat-sendat, antara lain karena ada pertentangan kepentingan yang arahnya senantiasa kurang simpatik terhadap yang lemah.

Kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk listrik, gas, pendidikan dasar, kesehatan rakyat, transportasi rakyat, perumahan rakyat, makin tidak kunjung terjangkau oleh keterbatasan tenaga-beli rakyat.

Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kehidupan yang cerdas dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu konsepsi budaya, bukan sekedar konsepsi biologis-genetika. Pendidikan bukan semata-mata untuk menghasilkan otak yang cerdas melainkan juga untuk mencapai kemajuan adab, budaya dan persatuan. Nilai-nilai dan norma-norma inilah yang oleh para Bapak Bangsa disusun dengan tulus untuk mengisi kebudayaan nasional sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara merupakan suatu mindset kecerdasan kehidupan untuk mempersatukan bangsa Indonesia ⁴⁴⁾. Membudayakan Pancasila

⁴ Lihat Meutia Hatta Swasono, "Antropologi dan Integrasi Nasional", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta 25 Maret 2006

adalah proses *character building*.

Mengenai perihal ikut melaksanakan ketertiban Dunia: Barangkali cita-cita nasional yang utuh ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita boleh mendapat acungan jempol. Peran Indonesia dalam menggalang suatu blok bebas-aktif (doktrin politik luar negeri Indonesia), yaitu dalam membentuk kerjasama dan solidaritas Asia-Afrika (1955) menuju terbentuknya Gerakan Non-Blok (1961), aktif dalam ikut membentuk Kelompok Selatan (menghadapi Kelompok Utara), sebagai pendiri dan aktivis ASEAN dan berada dalam *commanding position*, dan senantiasa aktif sebagai aktor dalam berbagai misi-misi perdamaian, baik di dalam maupun di luar PBB, sangatlah terpuji. Namun mengapa kita sekarang tiba-tiba melempem menghadapi gertakan "*wani angas*"-nya Malaysia terhadap pulau terdepan kita. Banyak jawaban menarik dapat diberikan, tetapi tentu tidak kita bicarakan pada kesempatan ini.

II. KONSTITUSI INDONESIA MENOLAK INDIVIDUALISME, LIBERALISME DAN PASAR BEBAS

Marilah kita layangkan catatan sejarah tentang karakter patriotik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, sebagai berikut:

Bung Karno "menggugat" di Pengadilan Bandung (193), *pleidooi*-nya berjudul "*Indonesie Klaagt-Aan*" ("Indonesia Menggugat"), menegaskan: "...*imperialisme* berbuah *negeri-negeri mandat, Vaerah pengaruh'... yang di dalam sifatnya `menaklukkan`negeri orang lain, membuahakan negeri jajahan... syarat yang amat penting untuk perbaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah Kemerdekaan Nasional...".*

Dua tahun sebelumnya Bung Hatta menuding Pengadilan Den Haag (1928), dalam pleidooinya berjudul "*Indonesia Vrij*" ("Indonesia Merdeka"), Bung Hatta menegaskan: "...*Lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi emblem bangsa lain...*".

Kemerdekaan Indonesia berdasar pada dua doktrin sejoli, yaitu Doktrin Kerakyatan (yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dengan demokrasinya yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan dengan mekanisme musyawarah-mufakat) dan Doktrin Kebangsaan (yang menegaskan nasionalisme dengan pengutamaan kepentingan nasional bersama, yang bertumpu pada ruh dan kekayaan batin Bhinneka Tunggal Ika).

Saya telah diminta oleh Panitia Dies Natalis untuk mengkaitkan pengembangan (atau pembangunan) karakter dan patriotisme dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Terus terang saya lebih tahu mengenai ekonomi daripada mengenai padagogie. Para penyelenggara Universitas Negeri Yogyakarta-lah para *padagoog*-nya yang bisa menjabarkan metode dan tehnik pendidikan dalam pembentukan karakter melalui kurikula dan silabi efektif, maka saya menghindarinya, saya akan mulai saja dengan keekonomian.

Meningkatkan ketangguhan ekonomi nasional baik dari segi sistem maupun dari segi kelembagaan tidak akan berhasil apabila pemerintahan negara tidak menolak neoliberalisme dan kembali ke pesan Konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sebagai rujukan imperatif utamanya.

Orasi ini terpaksa saya susun secara njelimet sedemikian rupa, sehingga dapat pula nanti menjadi acuan akademis di ruang-ruang kelas matakuliah sosial-ekonomi dan sekaligus untuk menggugah

kesadaran kita sebagai insan akademis bahwa ilmu adalah suatu jabatan mengabdikan, bahwa kita mengemban tugas untuk meneliti dan mengembangkan "ilmu amaliah" dan selanjutnya mempersembahkan "amal ilmiah" kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara. Saya tegaskan, sudah lewatlah zaman *Wertfreiheit der Wissenschaft — the neutrality of science*.

Patriotisme adalah suatu *commitment of nationalism-in action*. Untuk membangun ekonomi nasional haruslah membangun berdasar ideologi Pancasila, khususnya berdasar Pasal 33 UUD 1945 dan pasal-pasal konstitusi pendukung lainnya. Pasal 33 UUD 1945 khususnya adalah garda nasionalisme ekonomi Indonesia, bahkan garda kemandirian nasional.

Marilah meneruskan orasi ini dengan mengedepankan suatu keprihatinan nasional terlebih dahulu, dengan pertanyaan-pertanyaan: *Pertama*, mengapa pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? Akibatnya pembangunan menjadi proses dehumanisasi. *Kedua*, mengapa yang terjadi sekedar pembangunan *di* Indonesia dan bukan pembangunan *Indonesia*? Orang mancanegara yang membangun Indonesia dan menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis, sedang orang Indonesia menjadi penonton atau menjadi jongsos globalisasi. *Ketiga*, mengapa "daulat pasar" dibiarkan begitu berkuasa, sehingga menggusur "daulat rakyat". *Keempat*, bukankah seharusnya kita menjadi Tuan di Negeri Sendiri, suatu semangat patriotik untuk menjadi "*The Master in our own Homeland, not just to become the Host*", yang hanya melayani kebutuhan atau menjadi sekrup globalisasi dan kepentingan

mancanegara? Jadi mengapa kita tetap menjadi *koelie* di Negeri Sendiri, sekedar menjadi *master of ceremony*? *Kelima*, telah gagalkah kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini sehingga kita tidak mampu memahami kemuliaan makna mandiri?

Kita boleh merasa beruntung bahwa kita saat sedang menyaksikan peristiwa besar di dunia, suatu perubahan yang saya harap bukan sekedar *intermittent*, yang tidak terjadi dalam jangka panjang di masa lampau. Perubahan besar ini terjadisebagai akibat harus mulai ditinggalkannya pola-pikir lama karena munculnya tuntutan-tuntutan baru, ibarat letupan dalam skala mondial.

Peristiwa besar ini terjadi karena tidak bisa lagi dipertahankannya pakem atau paradigma lama, dengan terjadinya krisis finansial 2008, bahkan yang meledaknya di Amerika Serikat ⁵⁾, barangkali dari segi teori sosial semacam tahap baru,

⁵ Perubahan yang bukan sekedar *intermittent*, yang mungkin lebih langgeng, telah diharapkan Mohammad Hatta (1934) dan Radjiman Wediodiningrat (1943) ketika keduanya menentang pasar-bebasnya Adam Smith. Kemudian juga sudah diperkirakan dan bahkan diharapkan terjadinya oleh Polanyi sebagai *the end of market society* setelah terjadinya *the disintegration of a uniform market economy (but) without the absence of the market...ceasing altogether to be an organ of economic self-regulation*. Lihat Karl Polanyi, *The Great Transformation* (Boston: Beacon Press, 1944), hlm. 251. Kartohadiprodjo (1962) menegaskan pangkal tolak Barat berupa individualisme dan kebebasan akan membawakan krisis besar (krisis total) yang akan terus melanda Barat dan dunia yang telah terhegemoni, lihat Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa* (Jakarta: Gatra, 2010) hlm. 34o. Susan George pun telah membayangkan perubahan besar ini, saya yakin bukanlah sekedar *a wishful thinking* dan bukan pula *a self-fulfilling prophecy*, dikatakannya: *“the mood is changing, people no longer believe that the unjust world order is inevitable...”*, lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas*, terjemahan (Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwara, 2002), hlm. xxiv. Lebih awal dari apa yang dikemukakan Susan George,

post-modernitas dalam pemikiran ⁶⁶⁾.

Di Barat usia pasar telah mencapai lebih dari 250 tahun. Selama usia itu pasar memegang teguh asumsi-asumsi dasar yang ternyata saat ini tidak dapat lagi dikatakan valid atau realistik tatkala berhadapan dengan fakta-fakta empirik yang sangat kompleks dan beragam. Memang asumsi diperlukan untuk menyusun teori sebagai upaya penyederhanaan, sebagai *tools of analysis* atau alat analisa. Lalu asumsi-asumsi yang dikukuhkan secara imajiner dengan apa yang disebut sebagai kondisi *ceteris*

Thurow telah mengemukakan perihal berikut ini: “...the transition from one mode of thought to another is difficult, since it involves abandoning a beautiful sailing ship —theequilibrium price-auction model— that happens to be torn apart and sinking in a riptide. So a raft must be built to catch whatever winds may come by. That raft won’t match the beauty or mathematical elegance of the sailing ship, although it has one undeniable virtue — it floats”, lihat Lester C. Thurow, *Dangerous Currents* (New York: Random House, 1983), hlm. 237. Demikian pula dikemukakan oleh Petras dan Veltmeyer: “...it would be a failure of nerve of historic proposition to settle for anything less than a ‘new’ socialist society, the new nation as an integral whole, a new culture of participants and not spectators, a new internationalism of equals...”, lihat James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked* (London: Zed Books, 2001), hlm. 11-12. Pandanganpandangan di atas sangat berbeda dengan ilusi (istilah Huntington) yang dikemukakan Francis Fukuyama tentang *the end of history*” yang dinyatakannya sebagai *the end point of mankind’s ideological evolusion and the universasialization of Western liberal democracy as the final form of human government*, lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remarking of World Order*, (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm. 31. Bagi saya apa yang dikemukakan Fukuyama adalah suatu skenario dan jebakan pola-pikir. Apa yang ditulis oleh Josep Stiglitz dalam bukunya *Free Fall* ((New York: WW Norton, 2010) mempertegas perlunya INET (*Initiative for New Economic Theory*) untuk menegakkan “zaman baru” yang tidak terdikte oleh pasar-bebas.

⁶⁶ Lihat cara pandang post-modernitasnya Pip Jones, *Introducing Social Theory* (Cambridge: Polity Press/Blackwell), Chapter. 9.

paribus, tidak lagi masuk akal.

Di situlah masalahnya, betapapun suatu teori disusun dengan asumsi-asumsi yang valid dan solid namun kemudian bisa terbukti bahwa asumsi itu tidak realistis lagi. Apalagi apabila teori itu dikembangkan di dalam konteks suatu masyarakat tertentu, sesuai dengan tuntutan sosial-kultural tertentu, sistem nilai tertentu, ideologi tertentu, pada waktu dan tempat tertentu yang berbeda, yang secara keseluruhannya dapat saya katakan tidak lagi memenuhi tuntutan institusional-nya, maka teori yang valid berdasar asumsi pada masyarakat tertentu, menjadi tidak realistis dan sekaligus tidak relevan untuk masyarakat yang lain.

Sebelum saya melanjutkan tentang makna dan dimensi teori yang terbentuk berdasar asumsi-asumsi dasar tertentu, saya ingin menyampaikan lebih dahulu makna daripada "pasar" yang telah berusia lebih dari 250 tahun itu.

Definisi elementer mengenai pasar, sebagaimana diajarkan di ruang-ruang kias, adalah suatu tempat atau *locus* bertemunya penjual dan pembeli, bertemunya penawaran dan permintaan atau *supply* dan *demand*. Harga akan terjadi pada tingkat keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ini menjadikan pasar sebagai suatu mekanisme lelangan atau *auction mechanism*, yang berarti pula yang kuat akan menang dalam lelangan itu. Sebaliknya yang lemah, yang tidak memiliki cukup tenaga beli, akan terpaksa berada di luar pasaran, menjadi penonton, tidak ikut bertransaksi, yang bisa pula berarti tak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan, kandas mencapai aspirasi, terpaksa harus sengsara atau menderita kelaparan. Inilah mekanisme pasar, yang bagi mereka yang

tidak memiliki tenaga beli, pasar merupakan suatu mekanisme yang tidak ramah kepada yang miskin. "...Pasar adalah suatu instrument yang tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang telah makmur... pasar merupakan pelayan yang rajin bagi yang kaya, tetapi tidak memihak kepada yang miskin.... Artinya harga yang dibentuk oleh pasar adalah merupakan sekedar "keseimbangan pasar", tetapi bukan "keseimbangan masyarakat" untuk menjamin tercapainya "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat". Itulah sebabnya Lester Thurow (1983), ekonom terkemuka dari MIT, mekanisme pasar semacam ini disebut sebagai *the dangerous current* atau arus berbahaya bagi keseimbangan masyarakat. Bahkan lebih lanjut is dan Heilbroner menyebut (1994) bahwa pasar mendorong perbuatan yang tidak bermoral,⁷⁾ hal mana tidak hanya merupakan suatu kegagalan ekonomi tetapi juga merupakan suatu kegagalan moral. Dosen-dosen kita percaya pada teori *supply* dan *demand* tanpa mengkritisi dan tanpa koreksi atau renovasinya secara kreatif sesuai dengan ideology dan realism Indonesia.

Para dosen ilmu ekonomi mestinya harus senantiasa ingat bahwa mereka telah mengajarkan ilmu ekonomi berdasar buku teks induk *Economics* yang ditulis oleh Prof. Paul A. Samuelson (yang pada tahun 1970 memperoleh hadiah nobel ekonomi). Tentulah buku ini berideologi fundamentalisme pasar. Edisi pertama buku ini ditulis pada tahun 1948 dan edisi kedelapanbelas (terakhir) pada tahun 2005. Dari edisi pertama sampai edisi kedelapanbelas

⁷ Robert Heilbroner dan Lester Thurow, *Economics Explained*, Edisi Baru (New York: Simon Schuster), hlm. 255-256.

yang terakhir itu, tidak ditemukan sekalipun perkataan *cooperation* (kerjasama/gotong-royong) apalagi perkataan *cooperatives* (badan usaha koperasi).

Buku induk ini, yang kemudian diikuti dengan buku-buku teks lainnya (Dernburg & McDougall, Lipsey & Steiner, Stonier & Hague, Bilas dB) hanya memperkenalkan ilmu ekonomi di kampus-kampus kita dari segi *competition* (persaingan) saja. Ini berarti *mindset* kita "dicekok" dengan paham neoklasikal sehingga pola-pikir ekonom kita terkapsul dan dengan demikian mudah menerima dan membenarkan kapitalisme dan liberalisme (kemudian neoliberalisme).

Beberapa akademisi Indonesia juga menulis buku-buku pengantar ilmu ekonomi, seperti Sadono Sukirno, Herman Rusyidi, Prathama Rahardja & Mandala Manurung dll, pada hakikatnya masih bertitik-tolak dari paham neoklasikal yang mengajukan *competitive economics* dan fundamentalisme pasar (pasar-bebasnya *laissez-faire*), meskipun menyinggung sistem ekonomi Indonesia dan menyebut perkataan "koperasi". Apakah ini berarti bahwa buku-buku induk dan pengantar-pengantar ilmu ekonomi di atas harus ditolak? Sama sekali tidak, apalagi yang berupa hukum-hukum dasar ekonomi yang bersifat teknis dan *value-neutral*. Buku-buku tersebut harus tetap menjadi bahan ajaran di ruang-ruang kelas, namun harus secara kritis dikuliahkan dengan mengkoreksi dan memberikan inovasi, serta mengadaptasikan (bukan mengadopsikan) teori-teori neoklasikal yang bertentangan dengan ideologi nasional kita. Harus diingat bahwa secara ideologis posisi rakyat adalah "sentralsubstansial", jangan sampai tereduksi menjadi "marginal-residual". Kita

menganut paham kebersamaan (*mutualism*, berjemaah) dalam asas kekeluargaan (*brotherhood*, ber-ukhuwah) dan menentang paham liberalisme dan individualisme yang menampilkan *self-interest* yang menjadi dasar dari *competitive economics* ke arah pencapaian *maximum satisfaction principle* dan *maximum profit and gain principle* berdasar individualisme, yang tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial seluruh masyarakat. Di samping itu proses pembangunan ekonomi adalah proses humanisasi, bukan proses dehumanisasi, sehingga "daulat pasar" tidak dibenarkan sama sekali menggusur "daulat rakyat". Buku-buku induk dan buku-buku pengajaran ilmu ekonomi yang berdasar neoklasikal, tentulah (ibaratnya) dapat dengan mudah mewajarkan neoliberalisme. Namun dari segi perkakas analisa (*tools of analysis*) berisi teori dan tehnik ekonomi canggih, *substantially magnificent*. Kita harus pandai-pandai memanfaatkannya, dan mendidik para mahasiswa agar mampu mengemban *the culture of excellence*.

Neoliberalisme adalah wujud baru dari liberalisme sebagaimana neokapitalisme adalah wujud baru dari kapitalisme. Lalu apa beda liberalism dengan neoliberalisme? Neoliberalisme adalah liberalisme baru yang hidup di era globalisasi, demikian pula neokapitalisme adalah kapitalisme baru yang hidup dalam era globalisasi. Istilah neoliberalisme tidak/belum dikenal dalam buku-buku teks di awal 1990-an, sebagaimana istilah globalisasi tidak dikenal dan belum tercantum dalam kamus-kamus dan ensildopedi-ensiklopedi yang terbit pada awal 1990-an, dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada pula di buku-buku teks yang terbit pada periode sebelum awal 1990-an. Namundemikian

pemikiran bakal terjadinya globalisasi (belum menggunakan istilah globalisasi) sudah kelihatan nampak dalam bukunya kaum futuris (di luar ilmu ekonomi) seperti Alvin Toffler (*The Third Wave*, 1980). Sementara itu saya mencatat Jan Tinbergen pada tahun 1962 telah menerbitkan buku *Shaping the World Economy*, namun ia belum menggunakan istilah *globalization* kemudian Jan Tinbergen menerima Nobel Ekonomi pada tahun 1969. Tatkala saya menemui Jan Tinbergen pada tahun 1990 dan membicarakan bukunya ini, ia mengatakan buku tersebut sudah agak ketinggalan zaman, ia toh saat itu belum menggunakan istilah *globalization*.

Begitu pula dalam buku-buku induk mengenai *comparative economic systems* yang ditulis oleh dua tokoh besar mengenai bidang ini seperti Morris Bornstein (1994), Paul Gregory & Robert Stuart (1985) belum ada satu istilah pun *globalization* dan *neoliberalism* dicantumkan. (Dapat dimengerti bila beberapa akademisi senior yang juga *market fundamentalist* dengan sikap *coquettish* mengatakan "apa itu neoliberalisme, tidak ada dalam buku-buku teks"). Istilah neoliberalisme lebih predatorik sesuai brutalitas globalisasi ekonomi terhadap negara-negara lemah-ekonomi. Ada yang mencoba (*nastily*) membela neoliberalisme dari segi istilah, bahwa *neo* diartikannya sebagai *semi*⁸⁾ sehingga berarti tidak benar-benar atau hanya agak liberal. Istilah *semi* dikacaukannya dengan istilah *quasi*. Neoliberalisme adalah penjajahan baru bagi perekonomian Indonesia. Menolak neoliberalisme merupakan panggilan patriotik. Taat pada prinsip, taat pada doktrin nasional, tegas dan teguh menjunjung paham

⁸ Lihat, Martin Wolf, *Why Globalization Works* (New Haven: Yale University Press, 2004), him. 13 (mengutip Vargas Llosa).

nasionalisme akan tergantung pada keberhasilan pendidikan dan pengajaran nasional menyelenggarakan *character building*.

Namun kepada para mahasiswa, saya menjelaskan bahwa pasar tidak hanya sekedar suatu *locus* atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi pasar adalah suatu kekuatan besar yang saya sebut sebagai *the global financial tycoons* (atau *taoke-taoke* financial global), yaitu raja-raja penguasa modal global dengan kekuasaan ekonomi luar biasa yang berbentuk *Trans National Corporation* termasuk yang melembaga sebagai Bank Dunia, IMF, ADB dll (Swasono, 2004). Mereka inilah, dengan kekuatan dan *global networks-nya* mencoba menguasai dunia, menyebarkan sistem ekonomi pasarbebas memakai topeng globalisasi untuk menutupi karakter aslinya selaku kekuatan neoimperialisme dan neoliberalisme, membentuk suatu penjajahan baru terhadap negara-negara lemah-ekonomi dan lemah-politik.

Apa itu pasar-bebas? Pasar-bebas adalah pasarnya Adam Smith⁹) dengan buku terkenalnya (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* — disingkat *The Wealth of Nations*. Pasar-bebasnya Adam Smith bertitik-tolak dari paham

⁹ Kedudukan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu moral sesungguhnya justru diawali oleh Adam Smith, yang telah beramai-ramai kita nobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, sebagai “nabi” atau *patron saint-nya homo economicus*. Pada usia menjelang lima belas tahun Smith masuk University of Glasgow dan mendapat pengaruh filsafat moral dari Francis Hutcheson. Di situ ia berkenalan dengan berbagai *issues* kontemporer mengenai altruisme dan kebijakan dalam hubungan kemanusiaan sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan Bernard Mandeville, bahwa *self-interest* dan egoisme merupakan daya dorong kemajuan di dalam masyarakat. Selanjutnya *self-love*, moralitas, psikologi moral dan perdagangan telah menjadi tema-tema utama pula dalam alam pikiran Smith.

liberalisme dan individualisme (*perfect individual liberty* dengan *self-interest-nya* yang tidak menghendaki intervensi dari negara). Pasar-bebasnya Adam Smith membentuk sistem ekonomi liberalisme dan neoliberalisme, yang melahirkan pengajaran ilmu ekonomi neoklasikal berdasar fundametalisme pasar yang parsial

Karir akademis Adam Smith adalah dosen Rhetoric, guru besar Logic dan Moral Philosophy, seorang ilmuwan *moral science*, yang secara formal tidak pernah menjadi *student of economics*, namun dialah yang mencanangkan teori dan hukum dasar ekonomi yang kita kenal sebagai *the division-of-labour*, sebagai titik awal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia pula yang menegaskan peranan manusia sebagai pelaku ekonomi dengan *self-interested behaviour-nya* di dalam pasar yang ia gambarkan sebagai *self-regulating* (juga *self-correcting*) karena adanya *an invisible hand*. Ia mengutamakan *natural liberty* dan menentang *interventionism* meskipun (kemudian) ia menyatakan pentingnya "*the Sovereign*" (Negara) bertanggungjawab terhadap anggaran untuk *defence, justice, publick works & publick institutions* (ejaan asli).

Sebagai mahasiswa di Glasgow, Smith gemilang dalam pengetahuan Yunani dan Latin. Sebelum ia menerbitkan bukunya *Wealth of Nations* (lengkapnya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*) pada tahun 1776, 17 tahun sebelumnya ia menerbitkan *The Theory of Moral Sentiments* (1759), yang antara lain menggambarkan tentang empati atau kecenderungan cinta kasih manusia kepada masyarakatnya, yaitu tentang *propensities such as fellow feeling and the desire to attain the approval of his brethren ...* adanya suatu *man's disposition to,*

*and fitness for, society.** Bahkan mengawali bukunya yang lebih (tidak utuh) dan yang mengemban asumsi-asumsi dasar atau mitos-mitos kapitalisme Smithian, yaitu bahwa: (1) Kebutuhan manusia diasumsikan tidak terbatas; (2) sumber-sumber ekonomi diasumsikan relatif terbatas; dan (3) diasumsikan pula bahwa manusia mengejar pemenuhan maksimal kebutuhan individualnya (*utility maximization of self-interest*) yang relatif tak terbatas. Konsekuensi dari ketiga asumsi dasar itu berkelanjutan dengan anggapan bahwa akhlak dasar manusia adalah bertarung untuk saling berebut yang disebut dengan istilah ekonomi sebagai *free-competition* dalam kehidupan berekonomi. Berarti manusia yang rasional berebut mengejar utilitas ekonomi optimal, mencari keuntungan maksimal atau *maximum gain*, dan mencari *minimum sacrifice* atau pengorbanan minimal. Dengan demikian itu manusia menjadi aktor bebas di pasar-bebas dan berpedoman pada *laissez-faire laissez-passer*, yang meneguhkan doktrin *non-interference* berdasar *individual freedom of action*.

awal ini, Adam Smith mengemukakan: "...How *selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it...*". Memang ada perubahan pada jalan pikiran Adam Smith, posisi yang diambilnya dalam *Moral Sentiments* tidak mudah dirukunkan dengan posisi yang diambilnya dalam *Wealth of Nations* dan ini telah menimbulkan perbedaan-perbedaan penafsiran (inkonsistensi) yang dikenal sebagai *das Smith Problem* — artinya *the problem of Smith*

(Amitai Etzioni 1988). Kebanyakan kaum neoklasikal mengabaikan Adam Smith yang awal demi yang belakangan. Kaum neoklasikal cenderung mengabaikan implikasi asumtif mono-utilitas (paradigma neoldasik) dengan demikian mengabaikan kenyataan bi-utilitas yang terkandung dalam *The Theory of Moral Sentiments*. Dengan istilah Sen, ada suatu *essential and irreducible "duality"* pada konsepsi individual di dalam kalkulasi etikal. Kiranya istilah *invisible hand* telah dieksploitasi kelewat berlebihan. Lihat Sri-Edi Swasono *Ekspose Ekonomika* (Yogyakarta: Pustep UGM, 2008), hlm. 6-10.

Manusia rasional semacam ini disebut *homo economicus* atau "manusia ekonomi" yang berpedoman pada kejalangan "*homo homini lupus*. *Homo economicus* adalah lawan dari *homo ethicus*¹⁰).

¹⁰ " '*Homo economicus*' atau 'manusia ekonomi' adalah agen individual yang berada di pusat teori ekonomi neoldasik (teori utilitarian, hedonis dan menitikpusatkan pada diri-sendiri, yang rasionalis dan beretika individualis). Ia egois, rasional, berupaya untuk mencapai utilitas secara maksimum. Ia bertindak secara independen dan nonkooperatif, sebagai atom sosial yang terisolasi tanpa mempunyai naluri akan masyarakat sekitarnya, dan perilakunya dimotivasi semata-mata oleh kepentingan-diri pribadi secara sempit. *Economic man* atau "manusia ekonomi" bersifat materialistik tanpa emosi samasekali dan merupakan manusia yang membuat perhitungan dengan kepala dingin: ia seorang 'egois yang rasional'.... '*Homo economicus*' modern secara bengis bersikap rasional, ia tamak dan oportunistik; ia tak dapat dipercaya dan ia tidak mempercayai orang lain, ia tidak mampu memberi komitmen dan akan selalu berupaya untuk mendapat manfaat secara gratis; ia menganggap keegoisannya serta segala sifat dan perilakunya sebagai wajar..."

Sebaliknya: "... '*Homo ethicus*' samasekali berbeda dan bahkan merupakan kebalikan dari *homo economicus*. Ia seorang altruistik dan individu yang kooperatif, jujur dan cenderung berbicara tentang kebenaran, ia dapat dipercaya dan mempercayai orang lain. Ia memperoleh kepuasan moral dan emosional dari menghormati kewajibannya kepada orang lain, ia mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajiban dan mempunyai komitmen yang kuat atas tercapainya tujuan-tujuan sosial. Ia merupakan seorang '*team-*

Pasar bukan lagi sekedar "apa", tetapi "siapa", pasar adalah *the global financial tycoons*.

Paham ekonomi Adam Smith berdasar falsafah dan titik tolak liberalism dan individualism (*self-interest*). Mekanisme pasar-bebas atau *laissez-faire* dikatakan oleh Adam Smith dioperasikan oleh *an invisible hand* atau suatu tangan tak nampak alias "tangan ajaib" yang bisa mengatur sendiri (*self-regulating*) dan mengkoreksi segala kesalahan mekanisme ekonomi (*self-correcting*) yang serba tahu (*omniscient*) dan serba perkasa (*omnipotent*). Perkataan "*invisible-hand*" hanya disebut satu kali (pada halaman 527) dalam bukunya setebal 1200 halaman. Kiranya para ekonom Smithian yang berideologi liberalisme dan individualisme sengaja memanfaatkan perkataan "*invisible-hand*" secara berlebihan untuk kepentingan ideologi.

Ternyata selama lebih dari 250 tahun itu *the invisible hand* atau "tangan gaib"-nya Adam Smith tidak pernah muncul dan yang muncul adalah kegagalan-kegagalan pasar atau *market-failures*. Semula diharapkan yang muncul adalah Ratu Adil, ternyata Durga. Dikira tangan ajaib membawakan keadilan sosial, ternyata menggusur yang lemah dan miskin. Sehingga pada akhirnya muncul tuntutan-tuntutan agar paham pasarbebasnya Adam Smith dikoreksi secara mendasar dengan seruan *the end of laissez-faire* atau perlu diakhirinya pasar-bebas. Pasar-bebas

player' alamiah, ia dapat secara efektif mengkoordinasi tindakannya dengan tindakan orang lain dan bekerja demi manfaat bersama dengan orang lain. Ia menganggap resiprositas merupakan sesuatu yang wajar, meskipun bukan sebagai alasan penting agar ia bisa mendapat manfaat secara gratis atau berperilaku dalam suatu kepentingan kolektif ...". (M.Teresa Lunati, 1997) lihat Sri-Edi Swasono, *Ibid.*, hlm. 4.

melalui *perfectly free-competition* atau persaingan bebas hanya akan menguntungkan yang kuat dan menggusur atau mematikan yang lemah. Apa yang berlebihan atau keterlaluan dari paham ini adalah bahwa persaingan-bebas semacam itu justru dianggap akan melahirkan *efficiency* ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka yang percaya akan hal ini disebut sebagai kaum fundamentalis pasar. Sangat boleh diperkirakan pandangan kaum fundamentalis pasar ini berdasar pada peradaban kuno yang jahiliah, sangat tidak manusiawi, yang kita kenal dengan *survival of the fittest*, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, yang tersisih dan tidak selamat tidak perlu disesali.

Di ruang kelas, para dosen kita yang itu-itu juga dan yang begitu-begitu melulu, dengan kecongkakan dan kelengahan intelektualnya mengajarkan kriteria pasar persaingan sempurna (*perfectly free-competition*), antara lain berlakunya asumsi *free-entry* dan *free-exit* dengan segala ignoransinya. Tanpa mau tahu bahwa *free-entry* adalah memangsa dan mencaplok (*predatoric* dan *aquisitory*), sedangkan *free-exit* adalah tersisih dan mati gulung tikar.

Lalu apa itu neoliberalisme? Tidak mudah bagi sekelompok ekonom fundamentalis pasar melepaskan diri dari mitos tangan ajaib (*the invisible-hand*) dan pasar-bebas (*free-market*) senyawanya ini. Setiap kali dituntut berakhirnya pasar-bebas (*the end of laissez-faire*), setiap kali pula doktrin fundamentalisme pasar, sebagai cerminan paham individualisme (*self-interest*) dan liberalisme, muncul kembali.

Menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya mengakui *the end of laissez-faire*, berakhirnya fundamentalisme

pasar. *Petama* kali oleh tokoh besar John Maynard Keynes (1926); *kedua* oleh Moh. Hatta, Karl Polanyi(1934 dan 1944); *ketiga* oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960); dan *keempat* oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz, Susan George, dll (1990-2002).

Intinya adalah bahwa pasar tidaklah *self-regulating*, tidak *self-correcting*, penuh *market failures*, terutama dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Para Nobel laureates 2007 (Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson); 2008 (Paul Krugman); 2009 (Elinor Ostrom dan George Akerlof) barangkali sebagai penegas *kelima* yang mendukung *the end of laissez-faire*. Sebelum Keynes (1926) tentulah *laissez-faire* telah ditolak oleh Robert Owen, seorang reformis sosial, pendekar sosialisme, tokoh gerakan koperasi Inggris dan oleh Karl Marx dengan *the Communist Manifesto* (1848) dan dengan *Das Kapital-nya* (1867).

Peran pasar memang penting, tetapi harus dikontrol Negara. Stiglitz dan Akerlof (2009) menegaskan bahwa sistem pasar-bebas perlu diwaspadai, kegagalan pasar yang terlalu sering terjadi, telah menuntut ide-ide INET (*Initiative for New Economic Thinking*) seperti yang diajukan George Soros, Stiglitz dan Akerlof. Bagi Pasal 33 UUD 1945, sebagai INET saya, maka pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan sebaliknya negara yang harus ramah dan tunduk kepada pasar atau pun posisi rakyat direduksi dan disubordinasi oleh kepentingan pasar.

Pasal 33 UUD 1945 adalah konsepsi Hatta, bukan kiri dan bukan kanan, tetapi jalan lurus sesuai Pancasila. Hal ini konsisten benar dengan konsepsi politik luar negerinya Hatta "bebas-aktif", yang bebas diartikan sebagai tidak mengekor AS ataupun US, dan yang

aktif diartikan sebagai secara mandiri menggariskan kebijaksanaan nasionalnya secara lurus sesuai kepentingan nasional.

Globalisasi adalah tempat bersembunyiya fundamentalisme pasar sebagai penjajahan baru, hegemoni dan perampokan oleh kaum pemodal global (*the global financial tycoons*) yang melembaga di sekitar Washington terhadap Negara-negara berkembang. Kita perlu tekun membaca Meier & Stiglitz, *The Frontiers of Development Economics* (2001).

Mengapa tiap kali *the end of laissez-faire* ditegaskan, se-tiapkali is muncul kembali? Jawabnya: kapitalisme tidak bisa hidup tanpa *laissez-faire*, kapitalisme tidak bisa hidup tanpa pasar-bebas, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air. Globalisasi dan pasar-bebas neoliberalistik bawaannya, adalah topeng neokapitalisme dan neoimperialisme, yang sesuai sifat dasar bawaannya, akan tetap eksploitatif, predatori, akuisitori dan rakus.

Kebangkitan neoliberalisme merupakan suatu perang ide. Perang ide ini barangkali telah mereka "menangkan" untuk sementara, yang membentuk hegemoni akademis¹¹⁾ di kampus-kampus kita melalui pengajaran ilmu ekonomi neo Idasikal (*mainstream neoclassical economics*) dan didukung oleh sumbangan kepustakaan dari lembaga-lembaga neoliberal. Berulangkali hal ini telah saya kemukakan¹²⁾.

Susan George¹³⁾ menggambarkan pula betapa sengitnya

¹¹ Lihat Sri-Edi Swasono, "Kesadaran Geografi Kita", KOMPAS, 17 April 2006

¹² Lihat Sri-Edi Swasono, "Menolak Liberalisme", Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi, FEUI, i8 Februari, 2010.

¹³ Susan George, *op.cit.* hlm. 75-101.

perang ide itu berjuang keras menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global, yang dibiayai oleh korporasi-korporasi dan yayasan-yayasannya secara besar-besaran, memasuki dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian terhormat, "membeli" para intelektual dan editor-editor majalah terkemuka, mengadakan perdebatan-perdebatan artifisial yang direkayasa dan dimuat di *New York Times*, *Washington Post* dan *Time Magazine*, *The World Bank*, *WTO* ikut dalam perang ide ini, sebagai bagian dari pabrik ideology neoliberalisme.

Susan George menggambarkan pula bengisnya neoliberalisme di Amerika Serikat, apalagi terhadap negara-negara berkembang¹⁴, melalui korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional pendukungnya.

Catatan buku ekonomi saya yang saya kutipkan dari *The Economist*, posisi Indonesia di dunia adalah sebagai oenghasil biji-bijian terbesar nomor 6; beras terbesar nomor 1; terbesar nomor 6; kopi terbesar nomor 4; coklat nomor 3; minyak sawit nomor 2; lada putih nomor 1; lada hitam terbesar nomor 2; fuli dan pala terbesar nomor 1; karet terbesar nomor 2; karet sintesis terbesar nomor 4; kayu lapis terbesar nomor 1; ikan terbesar nomor 6 (*The Economist*). Indonesia dengan kesuburan tanah dan kekayaan

¹⁴ Selama dasawarsa 1980-an keluarga Amerika yang berada 10% di puncak pendapatannya meningkat rata-rata 16%, yang 5% di puncak meningkat rata-rata 23%, yang 1% di puncak meningkat 50% (mereka patut berterimakasih kepada Presiden Reagan), yang 80% di bawah tentu kehilangan sesuatu yang tidak sedikit. Pada tahun 1977 keluarga Amerika lapisan puncak 1% memiliki pendapatan rata-rata 65 kali lebih besar dari mereka yang berada di lapisan bawah 10%. Sepuluh tahun kemudian angka ini menjadi 115 kali lebih besar, */oc. cit.* (Catatan saya: di Indonesia angka rata-rata itu diperkirakan 350-400 kali lebih besar).

alamnya yang luar biasa itulah yang menghasilkan komoditi-komoditi strategis bagi dunia.

Di sektor minyak dan gas bumi Indonesia termasuk dalam jajaran 20 negara terbesar penghasil minyak; 10 negara terbesar penghasil gas, dan 7 negara terbesar pengekspor gas; pengekspor batubara terbesar di dunia; produsen emas terbesar nomor 6; produksi nickel terbesar nomor 3; produksi perak terbesar nomor 11; penghasil timah terbesar nomor 2 setelah Cina. Indonesia merupakan kekuatan utama dalam penyediaan energi lainnya di dunia (*ibid.*).

Tentu memalukan bagi kebanyakan ekonom kita yang menerima neoliberalisme sebagai "*given*" karena terjebak oleh teori berdasar *market-fundamentalism* di ruang kelas dan kurang peka akan paham strukturalisme yang berjiwa kebangsaan dan kerakyatan. Akan saya kutipkan pendapat berikut yang justru dikemukakan oleh seorang insinyur, Siswono Yudhohusodo, mantan Ketua HKTI, semata-mata karena ia mampu berfikir strukturalistik (*mimeo*, 2010). "...Kita telah merdeka sejak tahun 1945, namun pada waktu ini terasakan bahwa dalam banyak aspek, kita kurang berdaulat; dalam banyak hal kita terlalu mematuhi keinginan negara lain. Karena itu politik ekonomi kita terasa kurang berwawasan kebangsaan. Kita telah menjadi bangsa yang kurang percaya diri dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi, menjauh dari citacita membangun bangsa yang mandiri. Manifestasinya tampak, antara lain, sebagai negara yang telah berpengalaman lebih dari 100 tahun di bidang eksploitasi migas, dari 120 KPS (Kontraktor Profit Sharing), 90 persennya milik asing. Dari total produksi nasional sekitar 1.000.000 barrel/hari,

yang dihasilkan oleh Pertamina hanya berkisar 90.000 barrel/hari, dan Medco, swasta nasional 60.000 barrel/hari. Mayoritasnya diproduksi oleh asing, dan yang terbesar adalah Chevron, 450.000 barrel/hari.

Walaupun telah ditemukan cadangan minyak yang sangat besar antara lain di Cepu, produksi minyak kita terus menurun, Jika pada tahun 1977 produksi setiap hari 1,7 juta barrel dengan konsumsi di dalam negeri sekitar 1 juta barrel, maka kita bisa mengekspor sekitar 700.000 barrel/hari, yang menjadikan Indonesia sebagai anggota OPEC terpandang; pada waktu ini tinggal sekitar 850.000 barrel/hari dengan *cost recovery* (biaya yang ditanggung pemerintah) meningkat tinggi. Mayoritas kegiatan pertambangan, emas, perak, nikel, batubara dan lain-lain dikelola asing. Pertambangan tembaga dan emas, 100 persen dikuasai asing, diserahkan kepada Freeport dan Newmont. Selain itu, 30 persen perkebunan kelapa sawit juga telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing, padahal sebenarnya kebun-kebun sawit ini merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketergantungan pada impor pangan juga semakin besar. Pasar pangan amat besar yang kita miliki telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh produser-produser pangan di luar negara kita. Kita mengimpor sapi 650.000 ekor/tahun yang artinya merupakan 25 persen konsumsi nasional, mengimpor susu 90 persen konsumsi nasional, garam 50 persen konsumsi nasional, kedele 70 persen konsumsi nasional, bawang putih 90 persen konsumsi nasional dan gula tebu 40 persen konsumsi nasional. Padahal semua itu, kita bisa memenuhinya sendiri dengan meningkatkan

produksi yang sekaligus menyediakan lapangan kerja yang amat luas, menghemat devisa dan lebih membanggakan. Untuk mencapainya, kita memang perlu lebih percaya diri, dan memiliki semangat kemandirian yang besar. Pembangunan jembatan Surabaya-Madura yang tidak ada kendala apa pun bila dikerjakan oleh kontraktor nasional, justru dikerjakan kontraktor China.

Beberapa pemerintahan terdahulu melakukan kesalahan dengan memenuhi tekanan IMF untuk menjual BUMN dan aset swasta yang disita BPPN, kepada pihak asing. Akibatnya, banyak aset BUMN yang amat prospektif kini dikuasai asing. Indosat, VLCC, Pertamina, BCA, BII, Bank Danamon telah kita jual murah ke pihak asing. Sektor perbankan dan telekomunikasi yang sangat menguntungkan dan strategis, sudah jatuh ke tangan asing, menyusul sektor Migas yang sudah sejak dulu dikuasai asing. Tragisnya, ketika kita ingin memilikinya kembali, pihak asing menawarkan dengan harga yang berlipat....".Tentang definisi neoliberalisme, saya ingin kemukakan secara singkat untuk menjawab tuntutan politis yang marak saat ini. Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru.Neoliberalisme mendorong mekanisme pasar-bebas,menekan campurtangan negara seminimal mungkin. Di sinilah neoliberalisme mengakibatkan digugurkannya "daulat rakyat" dan diunggulkannya "daulat pasar".

III. AMBIVALENSI KAUM INTELEKTUAL DAN AKADEMISI EKONOMI

Ambivalen bukanlah karakter terpuji, sikap ambivalen adalah cacat dalam pendidikan. Cacat ini harus direduksi semaksimal mungkin.

Kongres XVII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) diadakan tanggal 30 Juli — 2 Agustus 2009. Saya secara tegas menyatakan bahaya neoliberalisme. Isu anti neoliberalisme memang sempat menjadi objek kampanye para Capres dan Cawapres. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres kesemuanya hebat karena ketiganya mengangkat isu neoliberalisme yang sedang marak dan melanggar pesan konstitusi, sekaligus ketiganya berjanji memajukan ekonomi rakyat. Apakah mereka menyebutnya "sistem ekonomi terpimpin", "sosialisme-Indonesia", "sistem ekonomi Pancasila", "sistem ekonomi konstitusi", "sistem ekonomi jalan-lurus", "sosialisme religius", ataupun mekanisme pasar terkendali, atau "sistem trilogi pembangunan dengan delapan lajur pemerataan", yang penting kita perhatikan adalah telah tibanya tuntutan riil untuk kembali ke sistem ekonomi Indonesia yang benar, dan itu hanyalah sistem ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945 dalam payung Pancasila berikut "Kaidah-Kaidah Penuntun"-nya (GBHN 1993). Orientasi utama sistem ekonomi konstitusi ini adalah pada pengutamaan kepentingan ekonomi rakyat. Perlu dicatat pula, demi sinergisme kekuatan berbangkit, wadah ekonomi rakyat¹⁵⁾ adalah koperasi.

¹⁵ Keberadaan ekonomi rakyat justru tidak boleh dilihat dari segi pemihakan semata-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis. Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi. Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi nasional. Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga

Bahwa ada beberapa ekonom senior meremehkan

rakyat lebih secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk *human investment* (bukan pemborosan atau *inefficiency*) serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis *grass-roots*.(3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (*self-empowering*), sehingga rakyat mampu meraih “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial” (nilai-tambah kemartabatan).(4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan *collective bargaining position* untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam-negeri yang tersedia (*endowment factor* Indonesia) berdasar strategi *resources-based* dan *people-centered*. (7) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih “cepat menghasilkan” (*quick-yielding*) dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam-negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan *import-components* dan meningkatkan *domestic-contents* produk-produk industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam-negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri. (ii) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan tanpa mempergunjungkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. (13) Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas bagi pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Satu dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan (*Development Strategies Reconsidered, Overseas Development Council, 1987*) dan ajakan

penyimpangan konstitusional ini dan bilang "...apa itu ekonomi rakyat, apa itu neoliberalisme, tidak ada di buku teks...", itu adalah suatu kegenitan elitis belaka, suatu *academic coquett*, sarat kemalasan dan mungkin sekadar ketertinggalan dalam membaca literatur, yang sekaligus merupakan absurditas akademis. Barangkali pula mereka itu tidak memiliki kepekaan ideologis yang tidak bisa membedakan antara "pembangunan Indonesia" dengan sekedar "pembangunan di Indonesia".

Neoliberalisme di Indonesia adalah kelanjutan dari liberalisme jaman penjajahan yang ditentang oleh Soekarno-Hatta. Liberalisme adalah sukma kapitalisme, selanjutnya neoliberalisme adalah sukma neokapitalisme-imperialistik.

yang mutakhir (*The Frontiers of Development Economics*, Meier & Striglitz, 2001) menegaskan betapa perlu ada pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai *social market economy*. (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. (16) Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari *platform* ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara. (17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. (18) Selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberi kehidupan murah (*low cost economy* dan *low cost of living*) kepada rakyat, khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi *trickle-up effect* atau mensubsidi perekonomian besar. (Proses *trickle-down effect* neoliberalistik menjadi ilusif dan delusif). (19) Dan seterusnya. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Tentu kita tidak harus berhenti pada butir 19 saja.

Indonesia Merdeka berdasar pada doktrin Kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin Kerakyatan (rakyat berdaulat). Dari sini lahirlah konsepsi politik ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi yang dipangku oleh dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia maka "kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang" (walaupun kepentingan warganegara orang-seorang tidak boleh diabaikan semena-mena). Demokrasi Ekonomi Indonesia menegaskan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" agar keselamatan dan keamanan negara serta kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat terjamin. *Subject matter*-nya adalah "dikuasai oleh Negara". Apabila tidak bisa "dikuasai" tanpa "dimiliki" (karena berlakunya *the global rule of the game* dengan ketentuan imperatifnya tentang *one share one vote* yang sangat *rigid*), maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu haruslah "dimiliki" oleh Negara. Demokrasi Ekonomi Indonesia menghendaki pula bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara" agar terjamin dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian sistem ekonomi Indonesia tegas-tegas bermatra nasionalisme. Kita tidak anti asing, investasi asing kitaterima, tetapi tidak untuk mendominasi (*overheersen*) ekonomi nasional dan menggusur ekonomi rakyat (lihat catatan kaki halaman 28-29).

Tak perlu kita repot-repot tentang definisi neoliberalisme. *Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru.*

Neoliberalisme mendorong mekanisme pasar-bebas (*laissez-faire*), menekan campur-tangan negara seminimal mungkin. Pasar-bebas adalah topeng globalisasi ekonomi predatorik. Di sinilah neoliberalisme mengakibatkan digugurkannya "daulat rakyat" dan diunggulkannya "daulat pasar".

Pandangan bahwa neoliberalisme percaya pada "tangan ajaib"-nya pasar yang tak nampak, yang bisa mengatur ekonomi sendiri merupakan paham kuno dan empirik keliru. Ketimpangan struktural, terutama kemiskinan dan pengangguran, tidak akan bisa diatasi oleh "tangan ajaib". Nasib rakyat bukan barang titipan yang bisa begitu saja diserahkan ke pasar. Kaum strukturalis sangat *concerned* dengan masalah kesejahteraan sosial atas pahamnya yang menolak ketimpangan ketimpangan struktural serta proses dehumanisasi yang inheren di dalam sistem ekonomi pasar-bebas.

Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adalah paham yang menolak ketimpangan-ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial-ekonomi. Kaum strukturalis mengungkapkan dan mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang berkaitan dengan pemusatan penguasaan dan kepemilikan aset ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi. Kepedulian akademik-ilmiah pemikir strukturalis meliputi pula masalah ketimpangan dalam kelembagaan, partisipasi dan emansipasi sosial-ekonomi, pengangguran, kemiskinan struktural dan masalah ketergantungan serta subordinasi (*dependency and subordination*) sosial-ekonomi.

Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antarpara

aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Apabila strukturalisme menolak mekanisme pasar-bebas adalah karena pasar-bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Demikian itulah maka strukturalisme banyak menggelar tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap inheren dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, dapat dipahami bahwa strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*", jelas sangat strukturalistik. Artinya perekonomian secara imperatif *harus disusun*, tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai kehendak dan perilaku para penguasa pasar. Ketimpangan-ketimpangan antara kaya dan miskin, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara pengusaha asing dan pengusaha nasional, harus direstruktur dengan campurtangan pemerintah, agar daulat-pasar tidak menggusur daulat-rakyat.

Pasar neoliberal itu kejam, tanpa emosi dan tanpa moralitas-etikal, yang ada hanyalah moralitas *the winner-takeall*, yang kuat mengambil semuanya. Negara harus aktif mengatur dan merombak ketimpangan-ketimpangan struktural, kalau tidak yang kuat menggusur yang lemah. Sementara itu telah terjadi pula penjajahan kurikulum (*academic hegemony*) terhadap fakultas-fakultas ekonomi kita. Pengajaran Ilmu Ekonomi sebatas neoklasikal yang mengemban sepenuhnya paham liberalisme/neoliberalisme dengan pasarbebas yang

menyertainya. Neoliberalisme tidak *pro-job*, tidak *pro-poor*, tidak pula *pro-economic nationalism*. Pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional digusur oleh *supermarkets*, *malls* dan *hypermarkets*, sehingga terjadi eksklusivisme bagi yang kuat dan marginalisasi terhadap yang lemah. Rakyat miskin tergusur, pembangunan rakyat akibatnya tidak *inherent* dengan pembangunan ekonomi. Bahkan pengajaran Ilmu Ekonomi di ruang-ruang kelas bisa mengalahkan pesan konstitusi, Pasal 27 ayat 2¹⁶⁾, Pasal 33¹⁷⁾ dan seterusnya diabaikan. Ini adalah hegemoni akademik, yang membelit dosen-dosen kita menjadi *academic followers*, yang mudah kagum pada *mainstream neoclassical* Barat, yang barangkali mengingkari ideologi nasional dan buta perjuangan bangsanya, lalu mewajarkan bahwa kedudukan modal lebih utama dari nasib manusia.

Posisi rakyat adalah "sentral-substansial" (bukan "marginal-residual"). Posisi rakyat ini harus dapat melahirkan prinsip "keterbawasertaan". Dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus secara otomatis terbawaserta ikut maju, atau bahkan harus didorong maju, rakyat harus kita *empowered*, agar tidak menjadi beban pembangunan, yang harus kita transformasi menjadi aset pembangunan. Itulah mengapa dapat dibenarkan bahwa Amartya Sen melihat pembangunan dari segi *human empowerment* dan

¹⁶ Pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

¹⁷ Pasal 33: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

mendefinisikan bahwa pembangunan sebagai *expansion of people's capabilities*.

Pembangunan ternyata telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Ingat, bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan (*mutualism* dan *brotherhood* alias ber-jemaah dan berukhuwah), bukan berdasar asas perorangan (*liberalisme/individualisme*) sebagaimana demokrasi Barat.

Moga-moga para ekonom kita tidak termasuk yang kaget-kaget akan bahaya neoliberalisme dengan kerakusan pasar-bebas bawaannya yang dapat melumpuhkan ekonomi nasional dan memiskinkan rakyat, artinya terkaget-kaget tiba-tiba kita "menjadi *koelie* di Negeri Sendiri", tahu-tahu kita menjadi jongsong globalisasi. Globalisasi memang membuka *opportunities* tetapi juga menghadirkan *brutal impedances* bagi pembangunan kita. Jangan seperti di Amerika Serikat, yang dijaga oleh empatpuluh pemenang Nobel Ekonomi, toh mereka terkagetkaget, tidak menyangka bakal terjadi krisis besar finansial yang kemudian mengglobal ini. Mereka mewajarkan kerakusan neoliberalisme berikut adagium *greed-is-good* yang dianutnya dengan segala asumsi *ceteris paribus-nya* yang telah lama usang atau obsolit, sehingga mereka mengabaikan bisa munculnya "*the Black Swan*", yaitu *the impact of the highly improbable cumulative process* sebagaimana *fascinatingly* dikemukakan oleh Nassim Nicholas Taleb (2007). Masyarakat Amerika sekarang dengan benar mulai meragukan dan sebagian mulai menolak ideologi pasar yang mereka anut dua setengah abad.

Setelah mendengarkan dan ikut bicara di Sesi Pertama Kongres ISEI 2009 itu, saya ingatkan: Jangan sampai ISEI menjadi organisasi pembangkang yang menolak pesan-pesan konstitusi kita.

I V . KETERDIKTEAN: PENYELEWENGAN AMANAT KONSTITUSI

Keterdiktean menjadi "Pak-Turut" atau "yes man" adalah cacat karakter, cacat dalam pendidikan. Berikut ini barangkali adalah contohnya:

Marilah lida belajar berani, gagah perkasa teguh melaksanakan semboyan patriotik "*niat ingsan*" untuk merdeka dan mandiri. Menolak keterdiktean. Saya kutipkan sebagai berikut.

"In war there is no substitute for victory", itulah semangat joang sapujagad Jenderal MacArthur.

Pada Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 semangat kita pun ampuh dengan adagium MacArthur. Kita meneriakkan tekad tanpa kompromi "*Merdeka atau Mati*".

Selama hampir 20 tahun terakhir saya banyak menulis di berbagai harian (*Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Pelita, Jawa Pos* dll) tentang perlunya kewaspadaan terhadap ideologi pasar-bebas. Terharulah merenungi mengapa kita harus terus "menari atas kendang orang lain", berikut ini contohnya:

Tahun 1812 bukan saja peristiwa besar di Eropa sebagai awal jatuhnya Napoleon Bonaparte atas kekalahan perangnya di Rusia.

Komponis Rusia Tchaikovsky memperingati peristiwa patriotik ini dengan mencipta komposisi orkestral *Overture 1812*.

Namun sebenarnya 1812 juga merupakan tahun bersejarah di Asia Selatan, yaitu matinya jutaan orang miskin di

Gujarat. Gubernur Bombay melarang bantuan pangan sebagai solidaritas sesama rakyat dikirim ke lokasi kelaparan. Sang Gubernur menuding betapa bodohnya para setiakawan itu yang tidak membaca buku Adam Smith *The Wealth of Nations* yang menjelaskan bahwa *the invisible hand* (tangan ajaib)-nya pasar pasti akan mengatasi sendiri kelaparan rakyat itu. Betullah, tangan ajaib menyelesaikannya, orang miskin berkurang, karena mati secara massal.

Ini adalah lelucon intelektual yang tidak lucu mengenai pasar-bebas Adam Smith sebagaimana dikemukakan seorang pemenang Nobel, Dr. Amartya Sen.

Demikian pula seperti saya katakan di berbagai kesempatan memang tidak mudah bagi sekelompok ekonom pasar-bebas melepaskan diri dari mitos tangan ajaib-nya Adam Smith berikut kapitalisme berdasar pasar-bebas senyawanya, suatu keterdiktean intelektual, secara paradigmatik terbenam ke dalam *follower syndrome*.

Kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai kelanjutan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) adalah derivat dari ideologi pasar-bebas. WTO memiliki 152 negara anggota. WTO mengambil prinsip dan persetujuan GATT, kemudian menggantikan GATT sejak Januari 1995.

Sebelumnya WTO menetapkan kesepakatan perdagangan yang sebenarnya dipaksakan terhadap anggota-anggotanya. Orientasi WTO adalah liberalisme ekonomi, karenanya "privatisasi" merupakan agenda "paksaan" WTO yang disertai "sanksi". WTO didominasi oleh AS, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Negara-

negara lain yang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru dapat diperkirakan akan bergabung sebagai dominator baru akan siap mengeksploitasi kelemahan negaranegara berkembang.

Itulah sebabnya sejak awal Sritua Arief mengancam ketika Menteri Perdagangan RI dengan mudahnya menandatangani kesepakatan Uruguay Round (*multilateral trade agreement*) dalam rangka pasar-bebas-nya GATT, yang menomorduakan kepentingan negara-negara berkembang. GATT diberi julukan *the rich men's club*. Desakan yang dikemukakan dalam *The Haberler Report* yang diperkuat ekonom-ekonom terkemuka yaitu Gottfried Haberler, James Meade, Jan Tinbergen dan Roberto Campos untuk menjaga kepentingan ekspor negaranegara berkembang, tidak digubris negara-negara maju (Arief 1998) dan keangkuhan GATT ini diwarisi WTO.

Keangkuhan lebih lanjut nampak dalam sidang-sidang APEC, bahwa *Asia Pacific Economic Cooperation* telah berubah dalam praktek menjadi *Asia Pacific Economic Competition*.

Dari GATT dan WTO inilah berkecamuk liberalism (dan neoliberalisme) di Indonesia. Ini yang menyeramkan dan mengagetkan. Pada 29 November 2004 di Laos ASEAN-China *Free Trade Agreement* (AC-FTA) ditandatangani, pihak Cina oleh Menteri Bo Xi-lai dan Indonesia oleh Menteri Mari Elka Pangestu. "Terperangkaplah" Indonesia oleh kekuatan ekonomi global, khususnya oleh China.

Barang-barang dari luar-negeri, terutama dari China secara luar biasa telah membanjiri Indonesia. Saat ini 17 persen impor nonmigas Indonesia datang dari China, sedang hanya 8,5 persen

ekspor nonmigas Indonesia masuk ke China. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China ini bukanlah sekadar ketimpangan hubungan dagang, tetapi proses tergesurnya industri Indonesia oleh industri China. Deindustrialisasi Indonesia mulai meluas. Sektor-sektor industri permesinan, perkebunan/pertanian, makanan dan minuman, plastik, tekstil dan produk tekstil, elektronik, besi baja, restoran, perdagangan retail mulai tergoyahkan dan kita boleh mencemasinya. Diperkirakan untuk masa mendatang arus predatorik ini akan makin besar dan membahayakan. Kasus ini hanya salah satu dari banyak hal di mana pemerintah terdikte oleh ide pasarbebas dan persaingan-bebas.

Persaingan tidaklah identik dengan gembengan tukang pande untuk meningkatkan kedigdayaan nasional. Persaingan, kata *textbooks*, menumbuhkan efisiensi dan dapat terjadinya *free entry* dan *free exit* seperti saya katakan di atas, kenyataannya *free-entry* menjadi akuisisi ganas, dan *free-exit* menjadi keterpaksaan mati gulung tikar dan PHK besar besaran. Sudah saatnya kita dengan tegas menyusun strategi nasional menuju kemandirian¹⁸⁾ dan ketahanan nasional yang tangguh. Kita pasti kalah bersaing dan jatuh tersungkur apabila tidak segera dibentuk strategi nasional secara sistematis dan jelas untuk meningkatkan daya saing, mengatasi berkecamuknya ekonomi biaya tinggi (*high cost economies*) dalam macam-macam bentuk destruktifnya. Telah lama industri kita dibiarkan jalan di tempat, bahkan makin keropos menjadi rongsokan. Betapa absurdnya pemerintah mudah

¹⁸ Lihat catatan kaki 2 hlm. 3

menggelontorkan dana ke bank bobrok, tetapi sulit menolong usaha industri yang sakratul maut.

Khususnya untuk bidang manufaktur dan agro-industri kita harus segera menyusun strategi secara eksplisit berikut tuntutan-tuntutan logistik yang menyertainya. Kita harus mendesain "*industrial and business map*" sebagai *list of industrial opportunities* beserta *input-output matrix-nya*, memperkuat pasaran dalam-negeri dengan mengolah sendiri produk-produk mentah menjadi barang jadi sebelum diekspor. Kita boleh berhutang atau mengundang investasi asing dengan tujuan tunggal: mempercepat tercapainya kemandirian dan kedigdayaan nasional.

Demi apapun, entah demi pasar-bebas, WTO, FTA, AC-FTA atau demi apa saja, tidak seharusnya kita lalu membiarkan industri dalam negeri hancur dan menganggurkan tenaga rakyat oleh persaingan tak seimbang. Kita harus senantiasa mengutamakan kepentingan nasional walaupun tetap perlu memperhatikan tanggungjawab global. Adalah infantail dan sikap "sok global" meleceh doktrin ini dengan menudingnya sebagai nasionalisme sempit.

Marilah kita belajar menjadi komandan, tidak menari atas kendang orang lain, *let us learn to fight, not to surrender*. Ada empat hal yang harus kita lakukan secara simultan: sebagai renungan akhir tahun.¹⁹*Pertama*, meningkatkan kemampuandiplomasi, meraih

¹⁹ Menarik sekali untuk kita perhatikan dialog antara Hendri Saporini dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (pada pertemuan di PBNU tanggal 16 Februari 2010). Menurut Hendri Saporini dalam rangka menghadapi AC-FTA perlu didesain suatu *national industrial policy and strategy*. Respon Menteri Perdagangan bisa diduga, katanya: "...memang ada yangberpandangan bahwa itu perlu, tetapi yang berkembang di dunia

optimal bargaining position kita, berani menolak mengorbankan kepentingan nasional, termasuk kalau perlu menunda secara parsial pelaksanaan berlakunya FTA. Kehancuran ekonomi Indonesia toh akan tidak menguntungkan para mitra dagang luar negeri.

sekarang, tidak diperlukan... saya berpandangan bahwa para pengusaha jauh lebih tahu...”.

Betapa ketinggalannya Menteri Perdagangan kita dalam *development economics* dan munculnya *INET (Initiative for New Economic Theory)*. Ia mengira yang berkembang di dunia sekarang adalah ekonomi yang masih berdasar *free-market*, artinya neoliberalisme dan neokapitalisme yang mulai ditentang seluruh dunia terutama negara-negara berkembang, yang sejak krisis 2008 di AS, ideologi ekonomi yang telah 250 tahun dianut oleh masyarakat AS ini sekarang mulai diragukan oleh para pemikir ekonomi di AS sendiri, bahkan mengusurkan Presiden AS. Jelas Menteri Perdagangan telah secara ortodoks menyerahkan nasib industri kita kepada pasar, kepada selera pengusaha, ia belum bisa percaya akan perlunya perencanaan dan regulasi, tidak percaya bahwa kegagalan-kegagalan pasar atau *market-failures* lebih sering terjadi dalam upaya membangun industri nasional yang tangguh, ia masih saja lebih percaya pada liberalisasi dan privatisasi, jadi apakah Menteri Perdagangan kita adalah seorang penganut Washington Consensus (deregulasi, liberalisasi dan privatisasi) belaka? Bagi Menteri Perdagangan nasib Negara dan nasib Rakyat cukup diserahkan kepada mekanisme pasar dan inklinasi para pemodal. Jelas ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menteri Perdagangan pun kalah dalam diplomasi dengan Menteri Perdagangan China, tidak sungguh-sungguh berjoang memenangkan diplomasi, *she learned to surrender* untuk mengecualikan serentetan 218 items untuk dikecualikan (ditanggihkan) dalam pelaksanaan *free-trade* tahun 2010 ini. Sampai Rizal Ramli mengatakan (pada acara Peluncuran buku Sri-Edi Swasono, 26 Maret 2010 yang baru lalu di BAPPENAS). kegelisahannya: “...apakah Menteri Perdagangan Marie Pangestu itu Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau Menteri Perdagangan Republik China...”.

Sementara itu Hendri Saparini menegaskan kepada Menteri Perdagangan: “...inilah beda saya dengan Menteri Perdagangan, saya dan kawankawan justru memandang mendesain suatu *industrial policy and strategy* hukumnya wajib sebagai referensi bagi pengembangan industri nasional...”.

Tentu Hendri Saparini benar sekali.

Kedua, FTA tidak boleh mengorbankan kehidupan rakyat kita. Pelaksanaan FTA yang dipaksakan akan berubah menjadi proses pemiskinan rakyat, hal ini bertentangan dengan butir-butir MDGs, antara lain *eradication of extreme poverty*. *Ketiga*, menggugah kesadaran nasional secara luas untuk bersama-sama tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi dan tertelan oleh monster perdagangan bebas.

Khususnya kita gugah kesadaran para importir Indonesia agar tidak sekadar mengimpor demi mencari untung dengan akibat hancurnya industri dalam-negeri, agar para importir mengemban nasionalisme, tidak semata-mata menjadi komprador dan kepanjangan tangan eksportir luar-negeri sahabatsahabat mereka. Menteri Perdagangan harus bisa mengendalikan dan menegur para importir yang tidak nasionalistik.

Keempat, meningkatkan penggunaan *domestic resources* dan sekaligus meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri, baik dalam artian konsumsi, maupun produksi. Mengonsumsi makanan (kuliner) dalam-negeri adalah tindak ideologis yang patriotic. *Kelima*, Rupiah kita yang terlalu mahal (*over valued*) harus didevaluasi untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor. Untuk impor barang baku bagi industri nasional harus ada perlakuan sendiri, a.l. keringanan kredit impor. Memang akibatnya hutang luar-negeri akan menjadi beban ekstra bagi perekonomian nasional dan perlu penanganan sendiri, seperti moratorium, diplomasi dll.

Itulah sebabnya setelah AC-FTA awal tahun ini mulai dan efektif menyerang industri nasional, produk-produk asing khususnya dari

Tiongkok membanjiri dan menyingkirkan produk-produk nasional. Deindustrialisasi menjadi-jadi dan mencemaskan. Namun, toh tidak melihat, misalnya, Menteri Perdagangan demi penyelamatan perekonomian jangka pendek mengadakan rapat-rapat darurat ataupun rapat-rapat koordinasi dengan para pengusaha secara nasional (KADIN, DEKO-PIN, HIPMI, HIPPI, Asosiasi-asosiasi dll) sebagai usaha-usaha kontinjensi penyelamatan taktis-strategis. Bank-bank tidak pulanampak dimobilisasi oleh Menteri Perdagangan agar berperan sebagai *agent of development in contingency* bagi sektor Industri yang terancam *free-trade*, tidak pula merasa perlu memerintahkan pemberian fasilitas kepada importir-importir yang mengimpor barang-barang yang mematikan produk-produk dalam-negeri dihentikan dst dst. Tidak kedengaran pula bahwa Menteri Perdagangan melakukan himbauan kepada para importir agar tidak asal mengimpor dan asal untung, tetapi juga menampilkan etika nasionalisme ekonominya. Lebih celaka lagi, ketika baru seminggu menjadi Menteri, pada 29 November 2004 di Laos ia menandatangani kesepakatan AC-FTA dengan Menteri Bo Xi-Lai, tetapi selama 5 tahun menjadi Menteri ia tidak secara fundamental mempersiapkan industri nasional Indonesia menghadapi malapetaka AC-FTA. Jelas ini sikap pro-pasar, bukan pro-rakyat dan mengabaikan nasionalisme ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

Apa yang dikemukakan oleh Hendri Saparini sebenarnya selaras dengan apa yang saya usulkan sejak lama agar Pemerintah, dunia bisnis dan perbankan secepatnya mendesain "*industrial and business map*" berupa *list of industrial and business opportunities* beserta *input-output matrix*-nya, sehingga kita tahu memilih apa

yang harus kita bangun, mana yang hanya memerlukan modal kecil, mana yang padat-karya, mana yang *resources-based* untuk mengurangi *idleness* SDA ataupun SDM. Keunggulan komparatif pun bisa kita rencanakan. Arahnya untuk memperkokoh pasaran dalam-negeri, memanfaatkan *local-specifics* dengan mengolah sendiri produk-produk mentah unggulan menjadi barang jadi sebelum diekspor. Ibarat kita memegang peta, maka kita tahu ke mana kita harus pergi dan memilih jalan dan kendaraannya. Dari sinilah *policy and strategy of industrial development* kita susun dan kita laksanakan tanpa pemborosan dan meningkatkan daya-saing.

Tidak ada ruginya dituduh siapapun kita berwawasan nasionalisme sempit dan tidak ada hebatnya disanjung berwawasan nasionalisme modern.

Secara khusus pimpinan UBK meminta saya agar orasi ini bertema "bangkit lebih kokoh lagi dalam membangun semangat kepeloporan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas kehidupannya, sejahtera, adil dan beradab".

Nah, apa artinya adalah bangkit membangun semangat kepeloporan? Artinya bangkit menjaga *sovereignty* dan *territorial integrity*, menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika secara nyata, tidak hanya retorika. Cintailah Tanah Air kalian dan cintailah produk-produk dalam-negeri buah-tangan anak bangsa sendiri, karena hanya dengan demikian maka ekonomi dan pasaran dalam-negeri bisa berkembang. Bangunlah ekonomi rakyat agar berakar dan berkembang dengan kukuh, sehingga menjamin kesejahteraan rakyat, menjauhkan *impoverishment* dan *disempowerment* terhadap rakyat. Susunlah

kurikulum nasional kita dengan muatan-muatan nilai-nilai Pancasila, jangan biarkan terjadi hegemoni akademis yang hanya menelan teori dan polapikir yang tidak sesuai dengan kedudukan rakyat, yang saya katakan sebagai sentral-substansial dan jangan sekali-kali menempatkan posisi rakyat sebagai marginal-residual. Bagi saya mengabaikan kemuliaan rakyat adalah mengabaikan keberadaban.

Di depan sudah saya kutipkan semangat joang Jenderal MacArthur: "*In war there is no substitute for victory*". Ini patut menjadi semangat joang kita pula. Soekarno-Hatta selalu mendidik kita agar menjadi bangsa mandiri, keduanya senantiasa meneriakkan *onafhankelijkheid* (kemandirian), menolak *afhankelijkheid* (ketergantungan). Keduanya tidak anti investasi asing, namun keduanya menolak bila investasi asing *beheersen* (mempredominasi) apalagi *overheersen* (mendominasi) ekonomi nasional. Soekarno-Hatta menolak kita sekedar menjadikuli di negeri sendiri, dan saya menggaris bawahi, jangan sampai bangsa ini menjadi jongs globalisasi.

Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa membiarkan dan mewajarkan negara ini termakan neoliberalisme predatorik dan menjadi derivat serta obyek pasaran luar-negeri, ini ibarat anak tanggung yang "jaim" bersemboyan "biar bodo asal sombong".

Sebagai penutup, dapat saya sampaikan munculnya getaran batin baru untuk mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan bahwa MPR nanti harus menyusun GarisGaris Besar Haluan Negara. Tahun yang lalu ada Kongres Pancasila pertama di UGM, tahun ini ada Kongres Pancasila kedua di Udayana Bali. Kemaren tanggal 30 Juni saya menjadi Ko-Promotor disertai

S3 Fakultas Hukum UI yang judulnya adalah "*Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan Mandat Konstitusi*" para Guru Besar Penguji meluluskan Promovenda. Inilah pertanda hidup kembalinya perjanjian suci antara *Kawula lan Gusti*? Sebenarnya inilah aksioma Hatta tentang Kerakyatan dan Kedaulatan Rakyat, istilah yang diciptakannya sendiri dan paham yang menjadi doktrin advokasinya sehingga Hatta digelari sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat pada acara Satu Abad Bung Hatta, 2002. Peristiwa yang menarik adalah ketika ditanyakan kepada Nitisoemantri, Penyelenggara dan Ketua Panitia Kongres Koperasi Pertama (1947) oleh Wangsawidjaja, mengapa' Hatta diberi gelar Bapak Koperasi? Dijawab oleh Nitisoemantri "karena Hatta adalah Bapak Kedaulatan Rakyat". Inilah yang ditegaskan dan ditulis oleh Hatta:

"...Bagi kita, raYat itoe jang oetama, rajat oemoem jang mempoenjai kedaoelatan, kekoesaan (sovereiniteit). Karena ra'jat itoe jantoeng-hati Bangsa. Dan raYat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendah deradjat kita. Dengan raYat itoe kita akan naik dan dengan raja kita akan toeroen. Hidoep ataoe matinja Indonesia Merdeka,semoeanja itoe bergantoeng kepada semangat ra'jat. Pengandjoer-pengandjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalaoe dibelakangnja ada ra'jat jang sadar dan insjaf akan kedaoelatan dirinja..." (Mohammad Hatta, Daulat Ra'jat, 20 September 1931).

Sesuai apa yang dikatakan Mohammad Hatta di atas, jelaslah bahwa "Tahta adalah milik Rakyat". Dengan demikian jelaslah posisi rakyat adalah "sentral-substansial" dalam alampikir Indonesia Merdeka, yang tidak boleh direduksi menjadi "marginal-residual".

Posisi rakyat yang "sentral-substansial" terakomodasi oleh apa yang dengan tepat dikemukakan oleh Rajni Kotari empatpuluh lima tahun kemudian, sebagai berikut ini:

Dalam pembangunan nasional kita harus dapat mendesain strategi nasional "...which not only produces for the mass of the people, but in which the mass of the people are also producers" — tidak hanya memproduksi buat massa rakyat, tetapi massa rakyat itu adalah juga yang memproduksinya sendiri...(Kotari, 1976).

V. PENUTUP

Perlu kita catat bahwa setelah UUD 1945 diamandemen empat kali, dari segi interpretasi historis dan otentik, *Penjelasan* untuk Pasal 33 UUD 1945, tetap berlaku. Prof. Maria Farida Indrati Soeprpto (sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi) juga telah menegaskan: "...*khusus untuk Penjelasan Pasal demi Pasal, memang dengan perubahan pasal-pasal dalam UndangUndang Dasar 1945 maka Penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)...*"²⁰.

Dengan tetap berlakunya *Penjelasan* Pasal 33 UUD 1945 itu, maka tetap berlaku pula ketentuan bahwa: "...Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-orang". Privatisasi Indosat, PLN, Garuda, Pertamina,

²⁰ Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH-UGM, No. 49/II/2005.

Angkasa Pura, Pelindo dll adalah pengkhianatan konstitusional oleh negara. Omongan ringan seperti: "Cina dan India pun sekarang giat melakukan privatisasi" adalah suatu celoteh penjerumusan, sebab apa yang semula merupakan perusahaan negara di Cina dan India, di Indonesia sejak awal (sudah) merupakan bidang kegiatan swasta. Cina dan India meskipun melakukan privatisasi masif, tetapi tetap menguasai dan memiliki penuh cabang-cabang produksi strategisnya, tidak akan diswastanisasi.

Sebagai penutup perlu saya sampaikan, bahwa adalah suatu kebetulan, bahwa penulisan Orasi ini masih terkesan oleh satu Ujian Terbuka mahasiswa Pascasarjana Elli Ruslina guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 14 Juli 2010 yang lalu. Judul disertasi Promovenda adalah "*Pasal 33 UUD '945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi*". Enam Guru Besar ahli hukum dari Fakultas Hukum UI dan satu Doktor ahli hukum dari Fakultas Hukum UI, dan satu Guru Besar ahli hukum dari Unpad dan satu Guru Besar ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI (Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, PhD/Dekan FHUI/Ketua Sidang/Penguji; Prof. Dr. Agus Sardjono, SH, MH/Promotor/Penguji; Prof. Sri-Edi Swasono, SE, MPIA, PhD/Ko-Promotor/Penguji; Dr. Jufrina Rizal, SH, MA/Ko-Promotor/Penguji; Prof. Erman Rajagukguk, SH, LLM, PhD/Penguji; Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD/Penguji; Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU/Penguji; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH/Penguji; Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH/Penguji), telah meluluskan Promovenda ini dan memutuskan ia berhak menyandang gelar Doktor dalam Ilmu

Hukum. Penyimpangan terhadap mandat konstitusi memang benar-benar terjadi dan memperoleh pembenaran dari para penguji dengan segala integritas yang mereka sandang sebagai ilmuwan dan akademisi.

Demikianlah, tuntutan budaya kita untuk membangun karakter dan patriotisme sangatlah kompleks, meliputi tuntutan untuk memahami pesan konstitusi dan cita-cita Kemerdekaan Nasional kita, berikut substansi ekonomi konstitusi kita dalam menghadapi globalisasi. Nasionalisme dan patriotisme harus kita pegang teguh. Nasionalisme dan patriotisme bukan barang usang,²¹⁾ yang terus menerus didistorsi oleh paham neo-liberalisme dan imperialism global yang predatorik, dengan skenario dongeng-dongeng fiktif yang menjerumuskan tentang *the end of nation states* dan *the borderless world*, serta tentang *the end of history* (menangnya kapitalisme terhadap sosialisme).

Tanpa patriotisme, tanpa pimpinan Negara yang berkarakter

²¹ Saya kutipkan tentang paham nasionalisme yang tetap relevan dan tidak usang sebagai berikut: Dart Joan Robinson (1962): “...*The very nature of economics is rooted in nationalism...The aspirations of the developing countries are more for national independence and national self-respect than just for bread to eat...*”

Dart Leah Greenfeld (2001): “...*Today, it is claimed, we live in the period of late capitalism, and possibly in the postindustrial society, yet nationalism ...is not gone, nor does it show any signs of being gone soon...Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there...the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained, it is stimulated and sustained by nationalism...*”. Dart Ian Lustic (2002): “...*It has been a commonplace to view nationalism as the greatest, the most powerful single force in the modern world. It is indeed remarkable to consider how resilient nationalist movements are and how capable they have been in sustaining loyalties, eliciting sacrifice, and surviving prolonged failure...*”.

sebagai negarawan, mustahil Indonesia bisa membangun ekonomi nasionalnya sesuai dengan pesan-pesan Konstitusi di mana rakyat diposisikan sebagai sentral-substansial itu. Tahta adalah milik rakyat.

Sekianlah, sekali lagi saya ucapkan Selamat ber-Dies Natalis ke-45.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Lampiran

BAGAN SES DEMOKRASI

(Volkssouvereiniteit/ Kedaulatan Rakyat)

Paham Barat	Paham Indonesia (Paham Asia umumnya)
Dasar: Paham liberalism dan individualism (<i>perfect individual liberty</i>)	Dasar: paham kebersamaan dalam asa kekeluargaan (<i>mutualism dan brotherhood</i>)
Kepentingan individu adalah utama (kepentingan masyarakat tidak diabaikan-solaidaritas altruism filantropis)	Kepentingan masyarakat yang utama, bukan kepentingan orang-seorang
Negara terbentuk melalui kontrak sosial (Vertrag) dari individu bebas	Masyarakat ada sebagai <i>given</i> (manusia adalah makhluk sosial, <i>homo-socius</i>). Masyarakat membentuk konsesus sosial antara anggota-anggotanya. <i>Privacy is a societal license</i> .
Perwakilan: semua dipilih	Perwakilan: semua diwakili (utusan golongan/utusan daerah) Decision making: musyawarah mufakat (demokrasi Pancasila/ <i>consociational democracy</i>)

<p>Dalam kehidupan ekonomi: "Daulat Pasar" Competitivism. Berdasar paham liberalism/ neoliberalisme, kapitalisme/ neokapitalisme, fundamentalisme pasar Smithian (<i>laissez-faire, invisible hand, Hobbesian homo-economicus</i>). Peran modal adalah sentral-subsansial, <i>one share-one vote</i>. Hak milik: bersifat absolute (eigendom) Demokratisasi = nprivatisasi, liberalisasi</p>	<p>Dalam kehidupan ekonomi: "Daulat Pasar" <i>Cooperativism, concours, coopetition</i>, Berdasar paham demokrasi ekonomi (produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dst), <i>homo-socius, homo-ethicus</i>. Peran rakyat adalah sentral-sibstansial (bukan marginal-residual) Hak milik: berfungsi sosial (meskipun hak warganegara orang-seorang dihormati, tidak diabaikan secara semena-mena). Demokratisasi: perluasan distribusi asset, srukturalisme, triple-co (co-ownership, co-determination, co-responsibility)</p>
<p>Adagium: Globalisasi kompetitif (Fiksi) <i>the end of nation states, the borderless world, the end of history</i>.</p>	<p>Adagium: Globalisasi adil terkendali, utamakan kepentingan nasional tanpa abaikan tanggungjawab global, jalan lurus Pancasila (ekonomi konstitusi)</p>



PENGUATAN JATI DIRI DAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF

Prof. Drs. Purwo Santoso, MA., Ph.D.

Yang terhormat;

Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Rokhmat Wahab, MA.

Bapak Dekan (Bapak Sardiman AM, M.Pd) berikut jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE UNY);

Pimpinan dan anggota Senat FISE UNY;

Para Ketua dan Sekretaris Jurusan di Lingkungan FISE, UNY;

Civitas Academica FISE UNY,

Hadirin, tamu undangan yang saya muliakan;

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakatuhu!

Salam sejahtera buat kita semua !

Segala puji dan ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, marikita panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini, memperingati hari jadi FISE UNY. Hanya dengan petunjukNya pula kita bisa menekuni dunia keilmuan; khususnya dunia pendidikan tinggi.

Dalam kesempatan ini, pertama-tama ijinilah saya menyampaikan selamat ulang tahun FISE yang ke-46 kepada pimpininan dan *civitas academica* FISE UNY. Semoga semakin berjaya dan semakin kontributif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya perlu saya sampaikan kepada pimpinan FISE UNY, yang memberikan kesempatan kepada diri saya untuk berdiri di mimbar yang prestisius ini, dalam forum yang sangat penting ini. Semoga melalui perbincangan kita kali ini, FISE UNY berhasil memancarkan tonggak kemajuan dan pengembangan dirinya.

MERESPON PERMASALAHAN BERBASIS JATI DIRI

Hadirin yang saya muliakan;

Topik yang diamanatkan untuk kita perbincangkan sepertinya (maaf-maaf) agak *klise*: yakni 'jati diri bangsa' dan 'karakter bangsa'. Telah terlalu sering, bahkan dengan nada *sok*, kita membahas persoalan ini. Ironisnya, kemajuan atau perubahan yang kita capai ya begitu-begitu juga. Tidaklah pada tempatnya kalau peringatan *dies natalis* FISE UNY ini kita gunakan untuk,

dalam bahasa pasaran, *sok-sok-an*. Yang kiranya justru menarik untuk dibahas adalah kecenderungan untuk *sok-sok-an*; tepatnya *sok* nasionalistik.

Ketika suatu universitas, dimintai kontribusinya dalam penanganan masalah bangsa atau kebangsaan, yang biasa disodorkan adalah serangkaian gagasan. Kemasan gagasan itu bisa bermacam-macam, makalah seminar, naskah akademik, konsep kebijakan, *grand design* dan sebagainya. Materi pidato, jangan lupa adalah salah satu kemasan yang bisa disodorkan. Agar tidak ikut *sok-sok-an*, pidato ini tidak bermaksud untuk menawarkan resep khusus untuk mengatasi masalah jatidiri dan karakter bangsa tersebut. Kalau kedua hal ini nantinya dibahas, pembahasannya tidak dari awal diniati untuk secara khusus menjawab persoalan khusus itu.

Konsep-konsep yang ditawarkan oleh universitas tidak jarang juga dilecehkan publik. Celoteh ejekan itu misalnya: "Teorinya *sih* begitu, tapi prakteknya *kan* lain." Terhadap ejekan yang ada ini, para konseptor dari kampus banyak yang tidak berkulit. Cukup alasan bagi kita untuk mawas diri, karena jangan-jangan secara keilmuan kita inipun sedang terbelit masalah serius. Oleh karena itu, tidak perlulah kita *sok* hebat, seolah apa yang kita katakan rekomendasikan tidak problematik.

Kesempatan memperingati *dies natalis* FISE UNY kali ini hendak saya manfaatkan untuk melakukan refleksi tentang yang selama ini terjadi sehingga kapasitas kita mengawal perubahan nasib bangsa begitu terbatasnya. Yang hendak kita refleksikan secara kritis adalah aktualisasi jatidiri kita, yakni universitas (khususnya fakultas) sebagai lembaga pendidikan dan universitas

sebagai lembaga keilmuan. Ada dua hal yang menjadi *core business* universitas: (1) pendidikan, dan (2) pengembangan ilmu.

Tanpa kesediaan untuk melakukan refleksi kritis terhadap kedua hal ini, keterlibatan kita dalam menangani masalah jati diri dan karakter bangsa niscaya akan selalu terjebak dalam pola yang selama ini, yakni menawarkan jawaban *klise*. Kalaulah pada gilirannya nanti kita punya usulan tentang penguatan jati diri dan karakter bangsa, itu dilakukan demi aktualisasinya sebagai lembaga pendidikan dan keilmuan, bukan karena ambisi untuk tampil hebat sebagai pejuang kebangsaan.

Buru-buru perlu ditegaskan bahwa, dalam pidato ini sama sekali tidak ada niatan untuk mengingkari kronisnya masalah kebangsaan. *Point* yang hendak dikedepankan di sini adalah bahwa kalaulah universitas, dalam hal ini FISE UNY, hendak berkontribusi terhadap bangsanya, bentuk kontribusi yang paling utama adalah yang berangkat dari jati diri dan karakternya sendiri. Dalam keyakinan saya, kontribusi yang diada-adakan tidak akan berumur panjang. Padahal persoalan jati diri dan karakter bangsa mengharuskan wawasan lintas generasi. *Point* pentingnya adalah bahwa, jati diri bangsa terbentuk ketika kita sebagai warga bangsa ini, sama-sama bersungguh-sungguh dalam merumuskan dan menegakkan jati diri kita masing-masing. Kalau perilaku kita *sok-sok-an*, kiranya mustahil kita bisa menegakkan jati diri dan karakter bangsa.

Ada dua pertanyaan, yang untuk jawabannya, universitas perlu merefleksif jati dirinya. *Pertama*, sebagai lembaga pendidikan, sejauhmana universitas ambil bagian dari perubahan sosial. *Kedua*, sebagai lembaga keilmuan corak keilmuan macam yang

dikembangkan sehingga perannya dalam perubahan sosial melekat dalam kesehariannya.

Kalau dalam kesehariannya universitas memang terlibat jauh dan efektif dalam mengarungi perubahan sosial, maka kontribusinya bagi penyelesaian masalah kebangsaan tidaklah harus "diada-adakan" misalnya dengan membentuk panitia seminar, panitia pidato ilmiah atau panitia apapun. Idealnya, kontribusinya ya melalui kiprahnya sehari-hari. Kalau corak keilmuan yang dikembangkan adalah yang berwatak transformatif, maka aktivitas pengembangan ilmu yang dilakukan dalam kesehariannya akan berkontribusi bagi penanganan masalah bangsa dan kebangsaan.

Setelah mendudukan persoalan seperti ini, saya baru berani menyebutkan bahwa, judul dari pidato ini adalah **Penguatan Jati Diri dan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu Sosial Transformatif**. Yang terlebih dahulu harus didudukan urgensinya adalah pendidikan ilmu sosial transformatif. Apakah itu? Mengapa harus begitu? Bagaimana mewujudkannya? Kalau semua pertanyaan ini telah terjawab, maka persoalan jati diri dan karakter bangsa hanyalah sebagian kecil dari hal yang bisa dilakukan.

ILMU SOSIAL TRANSFORMATIF.

Hadirin yang saya muliakan !

Buru-buru harus saya sampaikan bahwa, ide tentang ilmu sosial transformatif berikut urgensi pengembangannya di universitas-universitas di negeri ini, ini sudah saya sampaikan dalam pidato pengukuhan diri saya sebagai guru besar di UGM bulan Juni 2011 lalu. Ada keperluan bagi saya untuk mengemukakan sejumlah hal.

Mohon maaf kalau ternyata saya mengulang-ulang terlalu banyak. Penyampaian ulang ini saya lakukan semata-mata agar alur argumentasi dapat dimengerti kebulatannya.

Gagasan tentang ilmu sosial transformatif saya usulnya setelah memperhatikan bahwa pendidikan yang kita selenggarakan selama ini, sepertinyalebih banyak menghasilkan orang-orang pandai mendiskripsikan permasalahan dan kesalahan, dari pada orang-orang yang efektif mengarahkan dan dan ambil bagian dalam mengusung perubahan sosial.Kalaulah perubahan sosial kita kaji, biasanya kita memperlakukannya sebagai perubahan sosial 'mereka', buka perubahan 'kita'sebagai kolektivitas. Kita memposisikan didi di luar realita yang kita bahas, demi memastikan kajian kita obyektif.

Ijinkan saya menggunakan ilustrasi di tempat saya mengabdikan diri, tepatnya di Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM. Di sana, kami memberi nilai mata kuliah 'demokrasi' bukan dari 'perilakunya dalam berdemokrasi' atau dari 'kontribusinya dalam demokratisasi di negeri ini. Nilai 'A', 'B', 'C' atau 'D" kita berikan dari setelah mengukur kemampuan mengerjakan teka-teki (asah otak), mengerjakan soal-soal ujian.Demokrasi kami analisis sebagai realita pemerintahan "di luar sana", dan kami (baik dosen maupun mahasiswa)menyikapinya secara netral. Demokrasi kami perlakukan sebagai hajat 'orang lain' bukan 'hajat kita bersama'.

Mereka yang dalam transkrip ijazahnya kami beri nilai-nilai 'A'adalah yang begitu fasih menelanjangi praktek demokrasi di negeri ini.Mereka tidak kita uji dari ketahanannya untuk tidak larut dalam pragmatisme, dari kesanggupannya bersikap demokratis dalam situasi yang tidak ideal. Sejauh ini kami belum

berhasil membawa mahasiswa ke dalam situasi riil yang sarat dengan dilema, dan belum sanggup kami membekali mereka agar *survive* berdemokrasi dalam situasi-situasi dilema dilematis yang senantiasa menghadang proses demokratisasi. Karena itulah, kami tidak secara emosional tidak boleh mengeluh kalau demokratisasi tidak segera terwujud, karena secara keilmuan kita tidak menggagendakannya. Proses keilmuan yang berlangsung tidak bersangkut paut dengan proses demokratisasi itu sendiri.

Setelah merefleksi apa yang sehari-hari kita lakukan ini, kami sadar akan adanya hal yang kita sudah *taken for granted*, namun sepertinya tidak masuk akal. Kalau kita tidak pernah "masuk" ke dalam realita yang kita bahas, atas dasar apa kita bisa mengusulkan perubahan? Kegiatan pendidikan dan keilmuan harus transformatif.

Agar ilmu politik berwatak transformatif, kami sebagai bagian dari komunitas ilmuwan politik dituntut untuk membangun sistem pendidikan yang *buid-in* dengan proses transformasi sosial. Kami tidak lagi boleh berfikir bahwa pendidikan adalah satu hal, dan transformasi sosial adalah hal lain. Mengapa? Kalau demikian halnya maka ilmu sosial sebetulnya tidak memiliki peran langsung dalam memfasilitasi perubahan sosial, termasuk memfasilitasi penguatan jati diri dan karakter bangsa. Tidak ada basis moral bagi ilmuwan sosial untuk mengaku-aku sebagai agen perubahan sosial.

Dalam kasus perkuliahan tentang demokrasi tersebut di atas, watak transformatif ilmunya terlihat dari kesadaran bahwa kehidupan politik yang senyatanya tidak demokratis. Justru adanya masalah ketidakdemokratisan itulah yang menjadi titik awali

bagi proses pendidikan dan pengembangan ilmu. Akibatnya, pembelajaran demokrasi tidaklah sebatas mencari tahu 'apa itu' demokrasi, melainkan pergulatan nyata dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, materi pembelajaran yang paling penting adalah dilema-dilema yang mengedepan dalam setiap proses demokratisasi, dan acuan-acuan praktis yang masuk akal untuk memastikan demokrasi manifest dalam perilaku kolektif.

Pendidikan dalam konteks ini adalah proses reproduksi nilai (demokrasi), bukan sekedar reproduksi pengetahuan. Kalaulah pendidikan didedikasikan pada akumulasi pengetahuan, pengetahuan tersebut haruslah menjadi milik bersama. Mengapa demikian? Demokrasi hanya bisa diwujudkan dalam kebersamaan fihak-fihak yang terkait.

Dalam bingkai pemikitan ilmu sosial transformatif, tidak terlalu urgen bagi para ilmuwan untuk merumuskan secara sepihak apakah nilai-nilai yang harus direproduksi. Justru nilai-nilai tersebut harus digali dari kebersamaan, dari relasi sosial dimana ilmuwan terlibat. Yang diperlukan bukan asa spesifikasi nilai, melainkan konsensus dan komitmen tentang nilai. Ilmu sosial transformatif mengharuskan ilmuwan bekerja dan berfikir secara emansipatoris. Ilmuwan ikut membakukan nilai-nilai apa saja yang direproduksi.

Ilmu sosial perlu dihayati sebagai ilmu 'tentang kita', dan produksi pengetahuan melalui kegiatan keilmuan haruslah menambah pengetahuan kita. *Sense* ke-kita-an haruslah manifest dalam kegiatan keilmuan. Ketika meneliti Indonesia, yang harus dilakukan adalah melakukan refleksi kolektif tentang kita sebagai

warga bangsa. Agar bersifat transformatif, ilmu sosial perlu memprioritaskan pengkajian tentang 'kita' dari pada mereka. Olah rasa kekitaan itulah yang memungkinkan ilmu sosial ambil bagian dalam proses perubahan sosial dan penanganan masalah kebangsaan.

Tanpa komitmen untuk ambil bagian dalam proses perubahan sosial, ilmu yang kita kembangkan hanya akan mengungkapapa yang seharusnya (*das sollen*). Oleh karena itu, sejauh ini sangat sedikit prestasi kita dalam mewujudkannya keberpihakan pada nilai ini ke dalam dunia nyata. Kita mendudukan pendidikan sebagai proses yang apolitis. Apalagi yang dituntut untuk dihasilkan para ilmuwan adalah 'penjelasan ilmiah', bukan 'realita baru' yang didambakan.

Ketiadaan motif untuk melakukan transformasi menjadikan ilmuwan berwatak mendua. Di satu sisi, mereka menekuni dunia pendidikan dan berfikir seakan-akan dapat diisolasi sebagai persoalan teknikalitas pembelajaran. Di sisi lain, dirinya tampil optimis, seakan-akan teknikalitas pembelajaran ini akan bermuara pada perubahan sosial politik.

Ilmu yang kita kembangkan adalah ilmu yang informatif, namun tidak transformatif. Ilmuwan sudah merasa cukup dengan memberi informasi berbasis kajian ilmiahnya, namun tidak berkewajiban untuk menghasilkan perubahan. Lebih dari itu, metodologi keilmuan yang kita berlakukan mengekang kita untuk ambil bagian dalam menghasilkan perubahan. Pengekangan itu kita lakukan demi obyektifitas ataupun kenetralan kajian.

Gagasan tentang pendidikan sebagai reproduksi nilai, sudah lama dikenal dan sudah banyak diperjuangkan. Kealpaan kita

selama ini sebetulnya hanya pada level operasionalisasi atau penjabaran. Tidak banyak lembaga pendidikan semacam FISE UNY ini, yang dengan seksama dan komprehensif menjabarkannya. Belum cukup seksama kita menjabarkan gagasan sederhana tersebut ke dalam praktek pengelolaan universitas, praktek pengembangan kurikulum, praktek pembelajaran di kelas, praktek ekstra kurikuler maupun ko-kurikuler. Sederetan - agenda reorientasi masih diperlukan jika suatu universitas betul-betul hendak menjadi katalisator, kalau bukan faktor penentu, perubahan sosial.

Untuk menunjukkan proses dan arah reorientasi secara sederhana, man kita renungkan rutinitas kita dalam produksi karya ilmiah mandiri yang disebut skripsi (untuk S-1), thesis (untuk S-2) dan desertasi (untuk S-3). Seberapa jauh penulisan skripsi, thesis dan desertasi telah kita kaitkan dengan penanganan permasalahan-permasalahan bangsa?

Apasih permasalahan yang dikaji: masalah keilmuan (masalah keilmuan) ataukah masalah sosial (masalah yang membebani masyarakat). Sepanjang yang saya ketahui, sebagian besar masalah yang dicanangkan dalam rumusan masalah skripsi/thesis/desertasi adalah masalahnya ilmuwan. Kalaulah masalah ilmuwan tersebut terjawab, tidak dengan serta-merta masalahnya masyarakat tidak terjawab. Penulisan ketiga jenis karya ilmiah yang menandai derajat keserjaan insan akademis ini tidak didasari pada obsesi untuk unjuk kemampuan menghasilkan realitas baru, melainkan "sekedar" menawarkan penjelasan baru. Penilaian baik-buruknya karya ilmiah inipun bukan didasarkan pada kokoh-lemahnya komitmen pada nilai tertentu, melainkan pada masuk

akal tidaknya penjelasan yang diberikan. Sangat jarang skripsi, thesis dan disertasi tersebut yang menginformasikan keberhasilan insan akademik dalam mewujudkan realitas sosial baru yang kita dambakan.

Point yang hendak dikedepankan di sini adalah bahwa, kalau dari cara kerna universitas memang tidak pernah mencanangkan perannya sebagai pencipta realitas sosial baru maka tidaklah semestinya dia berpretensi, apalagi berjanji untuk itu. Pretensi kita untuk dapat meneguhkan jati diri dan karakter bangsa, harus kita waspadai sendiri.

.... kalau dari cara kerjanya universitas memang tidak pernah mencanangkan perannya sebagai pencipta realitas sosial baru maka tidaklah semestinya dia berpretensi, apalagi berjanji untuk itu. Pretensi kita untuk dapat meneguhkan jati did dan karakter bangsa, harus kita waspadai sendiri

Praktek yang sebaliknya, justru semakin tidak bisa ditutup-tutupi. Banyak program studi berikut dosen-dosennya tidak sanggup mengawal mahasiswanya untuk menyusun karya ilmiah mandiri (baik skripsi, thesis maupun disertasi) yang secara benar. Dalam kondisi seperti ini, kontribusi karya-karya tersebut bagi pengembangan ilmu dan penanganan masalah sosial kiranya sangat terbatas. Dalam banyak kasus, penulisan skripsi, thesis dan disertasi hanyalah basa-basi akademis. Tidak tertutup kemungkinan, karya ilmiah yang dihasilkan para dosennya pun diselipi berisi-basa basi. Yang menarik karya-karya bernuansa "basa-basi" ini banyak yang lobos sensor dan mendapatkan imbalan yang menggiurkan berkat skema sertifikasi dosen.

Karena penulisan karya-karya ilmiah mandiri ini

didudukkan sebagai kewajiban (syarat untuk memperoleh gelar akademik), maka maraklah pasar gelap penulisan skripsi, thesis dan disertasi. Saya tidak menyetujui pasar gelap tersebut, namun adanya pasar gelap itu sendiri adalah pertanda gagalnyakita menegakkan kaidah keilmuan: mandiri dan jujur dalam menghasilkan karya. Kegagalan menegakkan etika penulisan skripsi, thesis dan disertasi ini harus dibaca sebagai bentuk kontribusi negatif kalangan universitas dalam menguatkan jati diri dan karakter bangsa. Kontribusi negatif universitas ini harus dihitung secara seksama karena karena efeknya begitu signifikan, menyusup ke lapis elit yang secara sistemik, mempengaruhi nasib bangsa secara keseluruhan. Kalau menghasilkan lulusan yang jujur secara keilmuan saja kedodoran, atas dasar apa universitas bisa menjadi sandaran bangsa ini dalam meneguhkan jati diri dan karakter kolektif kita sebagai bangsa?

Pertanyaannya sekarang, apakah FISE UNY tertarik dengan gagasan pendidikan dan corak pengembangan ilmu yang transformatif ?

Tidaklah mungkin saya memaksakan gagasan yang, sejauh ini belum lazim. Apalagi saat ini universitas lebih memilih untuk memposisikan diri sebagai pelaku industri, menyelenggarakan pendidikan sekedar untuk menyediakan sumber daya manusia yang dipesan kalangan industri. Kalau universitas memposisikan diri sebagai *supplier* tenaga kerja, maka tawaran saya tentulah tidak menarik. Hanya saja, kita sebagai insan akademik tidak memiliki basis untuk mengatakan siap untuk ambil bagian dalam megususung perubahan sosial, menjadikan Indonesia sebagai

bangsa yang teguh dengan jati dirinya, dan percaya diri dengan karakternya dan sebagainya. Artinya, apa yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini, pada dasarnya adalah basa-basi juga !

Jika FISE UNY benar-benar mengembangkan pendidikan yang transformatif, dan ilmu sosial yang digeluti semakin hari semakin transformatif, maka ada begitu banyak masalah kolektif (kebangsaan) yang langsung atau tidak langsung akan ikut ditanggulangi. Untuk itu, FISE UNY harus memiliki politik keilmuan. FISE UNY tidak hanya mengembangkan *citra*(*branding*) sebagai lembaga pendidikan dan keilmuan yang transformatif, namun juga memiliki haluan yang jelas dalam menyikapi berbagai perubahan sosial yang terjadi. Artinya, (1) harus ada nilai-nilai tertentu yang disepakati untuk diproduksi, dan (2) ukuran keberhasilan pendidikan di FISE UNY adalah tereproduksi nilai-nilai tersebut dalam kiprah sehari-harinya. Senat akademik, kiranya adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk merumuskan komitmen politik untuk mereproduksi nilai-nilai ini. Jajaran pimpinan Fakultas, dalam konteks ini adalah eksekutor bertanggung jawab untuk menjabarkan rumusan tersebut ke dalam langkah-langkah managerial.

STRATEGI KEBUDAYAAN

Hadirin yang cendekia !

Telah saya sebutkan di atas bahwa pendidikan, dalam bingkai pemikiran ilmu sosial transformatif, adalah proses reproduksi nilai-nilai. Lebih dari itu, nilai kebangsaan adalah hal yang niscaya dijunjung tinggi, mengingat kebangsaan adalah salah satu ekspresi kebersamaan (ke-kita-an) yang niscaya berlangsung. Komitmen

untuk mengembangkan ilmu sosial transformatif, akan bermuara padapengembangan kebersamaan dalam berbangsa. Dengan cara ini, sekali lagi, keterlibatan kita dalam pengembangan rasa kebangsaan bukanlah sekedar karena tuntutan politik yang ditujukan kepada diri kita, melainkan karena tuntutan kelembagaan kita sebagai *civitas academics* yang bertekad untuk transformatif secara keilmuan.

Dengan pernyataan tersebut di atas, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu secara khusus merumuskan kebijakan pendidikan karakter. Saya pun sangat setuju dengan gagasan tim Kementerian Pendidikan Nasional untuk perumusangrand *design* pendidikan karakter, bahwa pendidikan karakter pada dasarnya adalah persoalan pembudayaan dan pemberdayaan. Proses pendidikan untuk itu melibatkan berbagai bentuk intervensi dan habituasi. Hanya saja, saya perlu ingatkan bahwa *grand design* itu tidak akan berjalan dengan sendirinya. Manakala proses pendidikan tidak berwatak transformatif, maka masih tersisa teka-teki sederhana namun vital: Bagaimana konsepnya para pakar bertansformasi menjadi proses perubahan yang membudaya. Dalam implementasi *disain* itu, tersisa pertanyaan: siapa *men-disain* siapa ! Siapa menciptakan kebiasaan buat siapa !

Sebelum mengomentari tentang isi atau materi pendidikan karakter yang dimuat dalam dari *grand design*, saya tergelitik untuk mengomentari popuparitas konsep *grand design* itu sendiri. Terminologi *grand design*, menurut hemat saya, mengisyaratkan optimisme yang berlebihan, kalau bukan watak *sok*. Ada dua fihak yang sulit menyadari potensi dirinya untuk *sok*. Pertama, para

ahli atau konseptor. Dalam kenaiifannya, mereka begitu gagah berani menjanjikan perubahan sesuai dengan spesifikasi langkah yang dirumuskannya. Mereka berani mempertaruhkan nama besarnya untuk menghasilkan resep perubahan yang menjanjikan. Kedua, pemerintah atau pemegang otoritas pendidikan. Dengan kenaiifannya mereka begitu optimis bahwa penggunaan otoritas yang dimiliki akan dipatuhi dan menjamin tercapainya perubahan yang dirumuskan oleh para pakar tadi.

Pengembangan jati diri dan karakter bangsa mensyaratkan adanya strategi kebudayaan—apalagi seperti telah saya singgung tadi—proses perubahan untuk itu dimaknai sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan. Saya bisa mengikuti jalan fikiran dari para konseptor *grand design*, bahwa intervensi pemerintah dalam proses pembelajaran akan menghasilkan perubahan mikro di tingkat sekolah. Perubahan dalam Skala kecil dibayangkan akan terjadi di setiap sekolah, dan implementasi *design* yang dirumuskan akan memiliki efek berantai dan meluas. Melalui efek berantai dan meluas itulah perumus *grand design* pendidikan bermaksud mentransformasi jati diri dan karakter kita sebagai bangsa. Penggunaan konsep *grand design* justru membuat kita lengah bahwa setiap inisiatif untuk berubah akan dijinakkan oleh *status quo*. Optimisme yang ditaburkan bertolak belakang dengan studi-studi yang telah dilakukan, yang menyimpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari *soft-state* (negara lembek), kalau bukan *weak-state*, karena ketidakmampuannya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya sendiri.

Saya setuju sekali dengan agenda pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan belajar

dan mengajar di setiap mata pelajaran di kelas. Saya setuju dengan target atau ambisinya bahwa setiap sekolah adalah wahana untuk menempa jati diri dan karakter.

Yang jelas, untuk mewujudkan hal itu perlu adanya ketekunan dalam merajut perubahan sosial (*social crafting*). Yang diperlukan dalam *crafting* bukan hanya pemahaman akan disain yang dirumuskan oleh para ahli, melainkan juga pemahaman yang mendalam dan akurat akan situasi spesifik di setiap kelas. Dalam kaitan ini, saya tidak yakin para ahli akan cukup tekun untuk melakukannya. Saya juga tidak yakin, para birokrat pendidikan akan cukup seksama memastikan setiap sekolah menjadi ajang yang bisa diandalkan untuk menempaan jati diri dan karakter bangsa. Point tersebut di atas saya perlu saya utarakan sama sekali bukan untuk menggembosi kebijakan pemerintah. Justru sebaliknya ! Saya mengajak untuk mengantisipasi kondisi tersulit justru karena khawatir akan gagal dalam mengawal perubahan budaya.

Mari kita renungkan *point* teoritik berikut ini. Sesuatu disebut sebagai kebudayaan ketika sesuatu itu tidak mudah diubah. Kekuatan budaya ada pada kekedapannya terhadap perubahan. Sesuatu yang telah membudaya, adalah sesuatu yang sulit berubah, dan yang menjadikannya sulit berubah adalah karena para pelaku yang terkait tidak lagi mempersoalkan nilai-nilai yang menjadi acuan perilaku kolektifnya. Ini berarti bahwa untuk melansir perubahan budaya, perlu ada provokator yang dari waktu ke waktu mengusik ketidaksadaran yang merutin. Saya tidak yakin para guru kelas maupun para kepala sekolah memiliki kesiapan untuk berperan sebagai provokator, yang meskipun tidak secara linier keterlibatannya secara riil dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan sangatlah penting.

Dalam kesempatan ini, ijin saya untuk berandai-andai. Beban para perumus *grand disain* dan pemerintah kiranya tidak akan terlampau berat sekiranya pendidikan transformatif telah membudaya, telah menjadi reek kita dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu. Berdasar pengandaian ini ijin saya mengusulkan langkah antara. Pengembangan jati diri dan karakter bangsa kita jadikan sebagai eksperimen untuk pengembangan pendidikan yang berwatak transformatif, dan pada saat yang sama, cara kita menggeluti persoalan kebangsaan ini dengan mengadopsi perspektif ilmu sosial transformatif.

Pertama, sebagai proses reproduksi nilai, pendidikan harus bermuara pada **lahirnya pemimpin baru**. Pemimpin yang dimaksudkan adalah yang, sedikit banyak, menjadi personifikasi nilai yang dijunjung tinggi. Jelasnya, nilai-nilai yang secara generik dirumuskan oleh para pakar, hanya bisa ditegakkan di lapangan dalam "bahasa" lapangan. Para pemimpin inilah yang diharapkan menjadi sandaran untuk menegakkan nilai-nilai dalam bahasa orang lapangan yang dimengerti betul oleh para pemimpin. Efek berantai dan meluas yang didambakan oleh para perumus *grand design* tadi tidak akan berlangsung secara mulus, dan para pemimpin yang dibesarkan kondisi lapangan inilah yang bisa diharapkan menjadi pengawalnya.

Sekali lagi, kesungguhan kita dalam mereproduksi nilai-nilai bisa dan perlu ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Manakala nilai-nilai yang kita usung tidak atau kurang populer, maim sangatlah diperlukan adalah personifikasi nilai-nilai tersebut. Merekalah yang bisa diandalkan untuk mengadvokasikannya.

Personifikasi nilai-nilai hadir dalam kiprah dan dorongan pemimpin. Dengan kata lain, agar pendidikan berlangsung secara transformatif, proses pendidikan ini ditantang untuk melahirkan para pemimpin (produk dari proses pendidikan tersebut) yang gigih mengusung nilai-nilai yang bersangkutan. Keberhasilan proses pendidikan yang berwatak transformatif ditandai oleh lahirnya para pemimpin yang menjadi pembela mati-matian dari nilai-nilai tadi.

Bagaimana merancang pendidikan tinggi yang transformatif? Ini adalah pertanyaan besar, yang tidak mungkin saya usulkan rumusnya secara tuntas dalam kesempatan ini.

Yang jelas, proses pembelajaran yang ditempuh tidak mungkin hanya mengandalkan kegiatan kurikuler. Proses pendidikan justru harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada sinergi yang optimal antara kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstra-kurikuler. Asah dan penempatan kepemimpinan mahasiswa haruslah menjadi visi pembelajaran di universitas. Adanya mata kuliah yang secara eksplisit berjudul kepemimpinan, saya kira, tidak menjadi keharusan. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah adanya komunitas keilmuan yang dipertemukan oleh nilai-nilai tertentu. Orang FISE UNY, saya yakin benar, lebih faham persoalan ini dari pada saya.

Kalaulah ada keharusan untuk menyebut nilai, ada satu yang perlu saya tegaskan:

yakni kejujuran. Pilar dari dunia keilmuan adalah kebenaran'. Apapun isi karya ilmiah kita, yang kita pertaruhkan adalah kebenarannya. Apalah artinya karya ilmiah dan perubahan sosial yang kita hasilkan kalau tidak dibangun di atas kejujuran. Apalah

artinya kita mengajarkan jati diri dan karakter kalau yang kita tunjukkan kepada orang lain adalah edisi palsu. Kemampuan untuk memerangkan perang terhadap plagiarisme indikasi minimal bagi keberhasilan mereproduksi.

Kedua, pendidikan transformatif -tidak terbayangkan untuk berkembang midset-pengelolaan universitas sebagai kegiatan industri. Yang kita harapkan, pendidikan transformatif mengandaikan universitas adalah medium-aktivisme politik. Mahasiswa yang diidealkan adalah yang aktif secara politik. Pendidikan transformatif tidak mudah ditumbuhkan jika cara kita membayangkan pengelolaan perguruan tinggi terjebak dalam nalar industrial, mengelola input menjadi *output* dan bermuara pada *outcome*. Pendekatan khas industrial yang linear untuk menghasilkan *outcome* ini, menurut hemat saya, tidak kondusif untuk melahirkan orang-orang yang digerakkan nilai-nilai kebangsaan.

Jelasnya, pendidikan transformatif menghendaki perguruan tinggi tetap diposisikan sebagai wadah aktualisasi kebangsaan. Proses pembelajaran resmi, justru diharapkan menyerap spirit gerakan ke dalam kegiatan kurikuler.

Evolusi sekolah anti korupsi di UGM, mungkin bisa menjadi ilustrasi. Para aktivis mahasiswa yang geram dengan maraknya praktek korupsi mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan serangkaian training. Paket training ini mereka sebut Sekolah Anti Korupsi. Inisiatif yang tadinya diambil di tingkat universitas akhirnya terproduksi menjadi kegiatan di tingkat fakultas. Lebih dari itu, sejumlah mata kuliah justru menjadikan paket-pelatihan ini sebagai pembelajaran di kelas. Hal ini bisa terjadi ketika aktivisme

mahasiswa terpancang dalam gelombang dan frekuensi yang sama dengan kegelisahan sejumlah dosen. Kakunya manajemen pendidikan yang terpasung oleh logika industri bisa menjadi ancaman bagi aktualisasi kampus sebagai medium gerakan kebangsaan: gerakan anti korupsi. Ketersediaan para aktifis anti korupsi ini pada gilirannya akan memaksa para pengelola universitas untuk lebih berhati-hati, lebih jauh terhindar dari gogaan korupsi. Untuk itu, kreativitas birokrat pendidikan menjadi taruhan.

Ketiga, pembelajaran transformative mengharuskan kita mengekspose mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan sosial. *Civitas academica* justru belajar bersama untuk mengalami permasalahan riil, dan dengan berbekal teori dan metode melibatkan diri untuk ambil bagian dalam *problem solving*. Melalui melibatkan diri (*engagement*) inilah *transformative learning* dikelola.

PENUTUP

Hadirin yang berbahagia !

Ilmu-ilmu sosial yang selama ini dikembangkan di universitas, sangat sedikit yang disiapkan untuk menghasilkan realitas baru. Muara dari pengembangan ilmu sosial bukanlah realitas sosial baru, melainkan sekedar penjelasan yang teruji kebenarannya. Ilmuwan sosial, karena alasan metodologis, justru dilarang untuk bersimpati dengan realitas tertentu. Simpati dan keberpihakannya pada realitas tertentu, menjadikan kajiannya tidak memenuhi standar ilmiah: tidak obyektif. Ketika ilmu-ilmu sosial merasa selesai dengan memberikan penjelasan, dan paling banter

adalah prediksi, maka ilmu sosial yang bersangkutan sebetulnya belum sampai pada penciptaan realitas baru. Dalam konteks ini, universitas niscaya canggung dalam menawarkan solusi bagi permasalahan bangsanya. Universitas yang memaksakan diri, berpotensi menghasilkan solusi yang *klise* atau *sok*.

Gagasan tentang ilmu sosial transformatif yang telah saya sampaikan, insyaAllah berpotensi untuk mengatasi persoalan tersebut. Repotnya, ada prasyarat yang tidak sedikit dan pelaksanaan *yangnjlimet*. Betapa bahagianya diri saya jika, sebagian, kalaulah tidak keseluruhan, ide yang saya kemukakan dapat menjadi inspirasi dalam pengembangan universitas sebagai lembaga pendidikan dan lembaga keilmuan. Dalam kesempatan ini saya memberanikan diri untuk menjanjikan *iming-iming* bahwa dengan mengembangkan pembelajaran dan Ilmu sosial transformative ada banyak masalah kebangsaan yang bisa kita atasi melalui kiprah sehari-hari. Peneguh jati diri dan karakter bangsa, 'hanyalah' salah satu efek samping yang bisa diwujudkan.

Semoga FISE UNY tetap jaya. Semoga FISE UNY semakin transformatif demi Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas berbagai khilaf dalam penyampaian gagasan ini.

Wassalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh !

Catatan:

¹Purwo Santoso, "Ilmu Sosial Transformatif", pidato pengukuhan Guru Besar, Universitas Gadjah Mada, 19 Juni 2011.



PEMANTAPAN JATI DIRI IPS MENGANTISIPASI PERUBAHAN KURIKULUM PERSEKOLAHAN

oleh

Sardiman AM., M.Pd

*"Politics is more difficult than physic and the world is more likely to die from bad politics than from bad physic" (Albert Einstein)***

PENGANTAR

Menyoal kembali tentang pendidikan IPS di Indonesia sebenarnya cukup melelahkan tetapi juga menantang.Pasalnya

**Dikutip dari Zamroni (2011), "Transformasi Pembelajaran IPS Guna Memantapkan Peran Nilai-nilainya dalam Pembangunan Karakter Bangsa", *Makalah*, disampaikan di UHAMKA pada Kongres HISPISI XIII, 7-9 Oktober 2011

sejak IPS ini menjadi mata pelajaran di sekolah dari kelahirannya sampai sekarang ini masih menghadapi berbagai permasalahan, termasuk permasalahan jati diri. Tetapi menjadi menantang kalau posisi pendidikan IPS dikaitkan dengan hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan IPS sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (perhatikan pernyataan Albert Einstein di atas).

Secara historik konon kabarnya pelajaran *social studies* dapat menjadi instrumen politik untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebagai contoh di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Pertama kali *social studies* ini diperkenalkan di kota Rugby, Inggris sekitar tahun 1827. Oleh Thomas Arnold *social studies* ini kemudian dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang dipimpinnya. *Social studies* ini dimaksudkan sebagai pelajaran untuk memperbaiki kehidupan remaja dan masyarakat yang sedang kacau seperti diskriminasi, degradasi moral, anarkisme dan kekerasan dari si kaya kepada si papa dan miskin.

Kehidupan ini terjadi setelah sekitar setengah abad terjadinya revolusi industri. Di benak Thomas Arnold *social studies* merupakan salah satu instrumen penting untuk mengatasi kebobrokan kehidupan masyarakat di Inggris. Dengan *social studies* ini Thomas Arnold ingin melakukan rehumanisasi anak-anak yang fisik dan jiwanya masih lentur. Secara bertahap eksperimen Thomas Arnold ini membuahkan hasil. (Esterlita Pratiwi, 2011). Dimulai dari perbaikan perilaku para peserta didik dengan lingkungannya kemudian ditiru oleh sekolah-sekolah dan guru-guru yang lain. Terjadi proses normalisasi kehidupan bermasyarakat di Inggris.

Sementara di Amerika Serikat muncul permasalahan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa setelah terjadi Perang Saudara (1861-1865) (lih.NCSS.1994). Masyarakat menjadi trauma dan bersifat pasif, tidak partisipatif.Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi negara yang sangat menghidup-hidupkan demokrasi.Kondisi multi ras juga menjadi permasalahan penting dalam rangka memajukan Amerika yang satu.Permalahan ini menjadi perhatian para pendidik untuk meningkatkan motivasi dan semangat, menciptakan kehidupan yang lebih harmoni, penuh motivasi, toleransi, transparan, dan meningkatkan kebersamaan untuk membangun kehidupan yang lebih mantap dan bertanggung jawab dalam kondisi yang memang begitu majemuk. Dirintislah oleh sekolah-sekolah di negara bagian Wisconsin yang membelajarkan *social studies* sejak tahun 1892 (Pargito,2010). Kemudian pada tahun 1916 Panitia Nasional Pendidikan Menengah menyetujui untuk memasukkan *social studies* ke dalam kurikulum sekolah.Secara umum Amerika Serikat berhasil mengembangkan pembelajaran *social studies* di sekolah. Hal ini semakin mantap setelah terbentuknya *National Council for The Social Studies* (NCSS). NCSS kemudian merumuskan konsep *social studies* sebagaimana dirintis Edgar Bruce Wesley dengan cara melakukan seleksi, penyederhanaan, adaptasi, yang kemudian merumuskan serta memadukan aspek-aspek dari cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pada akhir tahun 1960 secara eksplisit sudah ada pemisahan dalam konteks kajian akademik antara substansi kajian *social sciences* dengan *social studies*. *Social studies* semakin memantapkan diri dengan ciri terpadu dan interdisipliner.

Selama kurun waktu 1937-1970-an pembelajaran *social studies* dinilai berhasil membantu memecahkan berbagai problem sosial kebangsaan di Amerika Serikat.

Melihat pengalaman sejarah pembelajaran *social studies* di dua negara tersebut, menunjukkan bahwa mata pelajaran *social studies* merupakan instrumen penting dalam mengatasi permasalahan sosio kebangsaan di suatu negara. Dengan pengalaman itu Indonesia ingin mengembangkan pembelajaran *social studies* di persekolahan. Hal ini dilakukan karena di Indonesia juga muncul problem-problem sosio kebangsaan pasca era Demokrasi Terpimpin dan G 30 S/PKI. Di Indonesia istilah *social studies* ini diterjemahkan dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sejak tahun 1975 secara resmi IPS menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Namun pelaksanaan pembelajaran IPS di Indonesia tidak dapat berlangsung dan berhasil seperti negeri asalnya. Periode tahun 1975-1984-an istilah IPS sebagai mata pelajaran di sekolah memang sangat populer. Bahkan LPTK yang bertanggung jawab mencetak guru menyelenggarakan berbagai pelatihan termasuk mengirim para dosennya untuk mengikuti pelatihan P3G sampai berbulan-bulan, termasuk untuk bidang IPS. Tetapi pada saat diterapkannya Kurikulum 1984 untuk sekolah, kajian IPS mulai meredup apalagi pada saat diberlakukannya Kurikulum 1994. Substansi IPS sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan perpaduan berbagai cabang Ilmu-ilmu Sosial dan humaniora belum pernah terjadi sinkronisasi dan kemantapan konseptual bila dikaitkan dengan filosofi, harapan dan tujuan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Begitu juga pada kurikulum sekolah yang dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sekarang ini rumusan

tentang konsep, tujuan, materi ajar dan penerapannya untuk menunjuk jati diri IPS belum pernah tuntas. Para pembambil kebijakan dan praktisi pembelajaran IPS belum ada kesepahaman secara nasional. Artinya sampai sekarang persoalan mata pelajaran IPS ini dalam operasionalisasi baik dalam konteks isi maupun pelaksanaannya di lapangan belum seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya FIS UNY dalam Diesnya yang ke-47 tahun 2012 ini mengangkat tema : "Pematapan Jati Diri IPS Mengantisipasi Perubahan Kurikulum Persekolahan" Mungkin saja paparan ini tidak menjawab tema tersebut secara langsung. Sebab dalam perubahan atau perbaikan kurikulum sekolah di Indonesia cenderung tambal sulam, belum ada inovasi yang signifikan dikaitkan tantangan yang ada. Oleh karena itu, yang lebih penting bagaimana memantapkan konsep yang sekiranya dapat mengatasi problem-problem sosial yang ada.

PROBLEMATIKA DALAM PEMBELAJARAN IPS

Telah dijelaskan bahwa pembelajaran IPS di sekolah sampai sekarang masih menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan yang utama adalah soal pemahamandan kesepakatan tentang konsep dasar terutama yang menyangkut substansi kajian dengan pendekatan yang digunakan untk mengembangkan dan mengorganisasikan standar isi mata pelajaran IPS di sekolah, *sparated* atau *integrated*. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah masalah kebermaknaan mata pelajaran IPS dalam kehidupan manusia.

Mengenai substansi kajian IPS yang kemudian diwujudkan dalam bentuk standar isi sampai sekarang masih *debatable*. Subtansi kajian IPS yang merupakan perpaduan aspek-aspek dari

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora sudah dirintis sejak tahun 1968 dengan merumuskan konsep IPS dari cabang-cabang ilmu-ilmu sosial terutama dari bidang geografi, sejarah dan ekonomi. Tahun 1972/1973 IPS menjadi salah satu mata pelajaran pada Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Kemudian pada tahun 1975 IPS secara resmi menjadi salah satu mata pelajaran pada kurikulum sekolah di Indonesia. Tahun-tahun itu mata pelajaran IPS cukup terkenal. Namun mata pelajaran IPS pada Kurikulum Tahun 1975 itu ternyata kalau dilihat dari rumusan/organisasi substansi kajiannya juga masih ngambang, belum mantap. Selanjutnya seperti sudah disinggung pada pengantar di depan bahwa sejak diterapkannya Kurikulum 1984 *greget* pendidikan IPS mulai melemah, apalagi dengan dilaksanakan Kurikulum 1994 yang nampak menekankan pada disiplin keilmuan masing-masing bidang. Posisi dan jati diri mata pelajaran IPS boleh dikatakan tinggal nama.

Wacana untuk membangun kembali hakikat IPS sebagai mata pelajaran yang utuh dan bergengsi di sekolah secara serius mulai didiskusikan dan dirumuskan pada tahun 1999/2000, seiring dengan penyusunan draf rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ini dalam perkembangannya disebut dengan Kurikulum 2004. Draft Kurikulum 2004 ini sudah disosialisasikan secara luas dan bahkan sudah dilakukan piloting, tetapi sebelum kurikulum ini dilaksanakan tiba-tiba kandas oleh kebijakan pemerintah untuk segera mengganti draft kurikulum ini dengan rancangan kurikulum yang baru. Sekalipun sebenarnya kebijakan penggantian itu sangat kental dengan muatan politis. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai realisasi

amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan PP. No. 19 Tahun 2005 bagaikan "Bandung Bandawasa" segera merumuskan standar isi. Lahirlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2006. Di dalam kurikulum ini sudah barang tentu termasuk standar isi untuk mata pelajaran IPS. Di tingkat pendidikan dasar, SD/MI dan SMP/MTs diharapkan terpadu, sementara di SMA/MA *sparated* sesuai disiplin bidang ilmu masing-masing. Hasil rumusannya, untuk mata pelajaran IPS di SD/MI relatif sudah terpadu, tetapi di SMP/MTs belum terpadu. Di SMP/MTs namanya memang mata pelajaran IPS, tetapi baru semacam rangkaian kereta api, lokonya bernama IPS tetapi isinya masih gerbong-gerbong, ada gerbong geografi, gerbong sejarah, gerbong ekonomi, dan gerbong sosiologi, dengan kata lain masih terpisah-pisah. Harus diakui bahwa dalam proses perumusan standar isi IPS itu masih terjadi tarik ulur dan "perebutan kapling" serta arogansi keilmuan dari masing-masing pelaku disiplin keilmuan yang terkait. Rumusan standar isi IPS di SMP/MTs yang masih terpisah-pisah itu sangat memberatkan dan membingungkan guru, sementara peserta didik dibebani materi yang begitu banyak dengan jam pertemuan yang terbatas.. Dengan demikian pengembangan konsep IPS sebagai pembelajaran ilmu-ilmu sosial dan humaniora secara utuh, terpadu dan interdisipliner serta relevan dengan kehidupan masyarakat sulit terwujud.

Mengapa tim pengembang di BSNP juga belum berhasil merumuskan konsep dan substansi IPS atau standar isi yang menggambarkan satu mata pelajaran yang bulat, utuh, terpadu, dan interdisipliner sebagaimana yang sudah lama diharapkan ? Di samping masih terasa ada arogansi keilmuan, ternyata juga

terkait dengan alasan-alasan teknis. Apabila IPS itu merupakan satu mata pelajaran yang bulat, utuh dan terpadu, waktu itu akan menghadapi kesulitan di lapangan, karena guru yang mengajar IPS di SD dan utamanya di SMP/MTs belum ada lulusan/sarjana (S 1) dari Program Studi Pendidikan IPS. Kemudian pemerintah dan juga pelaku di lapangan sering mudah menyerah karena soal teknis ketimbang mencari solusi yang lebih konseptual substantif untuk mengatasi problem yang lebih strategis. Problem ini sebenarnya bisa segera diatasi dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tataran pendidikan dasar dan menengah dengan pihak pendidikan tinggi, plus para pihak atau institusi yang terkait serta person-person yang dipandang ahli di bidang IPS, semuanya dengan niatan tulus semata-mata untuk kepentingan anak bangsa, bukan demi ilmunya apalagi kepentingan pribadi, maka permasalahan tersebut akan dapat akan diatasi.

Di tengah-tengah kondisi ketidakmantapan substansi dan teknik pembelajaran IPS di lapangan, masyarakat orang tua/wali bahkan peserta didik sendiri banyak yang tidak menyenangi dan tidak tertarik dengan mata pelajaran IPS.

Banyak diantara mereka memandang bahwa pelajaran IPS itu tidak penting, apalagi tidak di-UN-kan. Mata pelajaran IPS dipandang tidak banyak gunanya dalam konteks kehidupan baik dalam konteks kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa. Akibatnya orang tua dan peserta didik kurang *respect* dengan mata pelajaran IPS, sehingga tidak jarang saat anaknya duduk di bangku SMA, sewaktu akan penjurusan diarahkan agar anaknya masuk ke jurusan IPA, bukan ke IPS. Pendidikan IPS yang

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menganalisis terhadap kondisi dan realitas sosial kemasyarakatan sehingga mendapatkan pelajaran untuk ikut memecahkan masalah sosial dan berperan serta dalam menciptakan kehidupan yang harmoni di masyarakat, tetapi ternyata belum berhasil. Kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan kita masih memprihatinkan. Pendidikan IPS pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya belum berhasil mengemban amanah UU. No.20 Tahun 2003 untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Berbagai masalah sosio kebangsaan masih sering terjadi. Misalnya, maraknya kenakalan remaja, perkelahian antarpelajar, perilaku semau gue dan tidak disiplin, anarkhisme, luntarnya kesantunan dan budi pekerti luhur, korupsi yang masih menggurita, lemahnya kemandirian dan jati diri bangsa.

Problem-problem tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa-masa sebelumnya. Perlu kiranya direnungkan bahwa sejak tahun 1978 saat pemerintah Orde Baru berhasil memantapkan paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan bidang ekonomi dan fisik, maka kemakmuran masyarakat secara ekonomis, fisik dan materiil mengalami peningkatan yang signifikan. Pembangunan sarana parasarana juga semakin lengkap, sekalipun ada problem pada aspek pemerataan. Namun di balik keberhasilan itu, paradigma pembangunan yang lebih menekankan bidang ekonomi dan kebendaan telah memberi peluang semakin mekarnya paham materialisme dan melahirkan celah tempat "nylonongnya" sekularisme. Keberhasilan pembangunan ekonomi di era Orde Baru telah menimbulkan pola

dan gaya hidup modern yang cenderung materialistik. Dunia dan materi telah menjadi faktor dominan untuk membangun manusia Indonesia. Akibatnya hal-hal, dan aktivitas yang tidak bersentuhan langsung dengan persoalan ekonomi, persoalan materi dan uang menjadi tidak *marketable*. Pembangunan yang bertumpu pada *economic margin or gain* (Soemarno Soedarsono, 2009) juga telah membawa perubahan pandangan dan perilaku masyarakat. Masyarakat cenderung pragmatis dan tidak jarang yang harus mengorbankan idealisme sebagai warga bangsa untuk sebuah keuntungan materi. Pemenuhan jangka dekat lebih diutamakan.

Timbullah pola berpikir praktis-formalistik, instan, berorientasi pada target kuantitatif dan kadang melupakan kualitas. Pragmatisme dengan prinsip praktis dan formalistik kemudian bersinggungan dengan positivisme secara tidak langsung juga telah ikut berimbas pada penyelenggaraan pendidikan. Sekalipun sering bias tujuan, prinsip mudah dilaksanakan, dapat diukur dan memenuhi persyaratan telah menjadi bingkai penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Prinsip ini kemudian menjadi sangat "cocok" untuk melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang penyusunannya menggunakan paradigma esensialisme. Rumusan standar isinya sangat kental dengan *content oriented* (Wayan Lasmawan, 2009). Proses pembelajaran yang berlangsung akan menitikberatkan pada kegiatan penguasaan materi ajar yang berbasis keilmuan dan proses tagihannya juga lebih mudah dilaksanakan. Dengan demikian pendidikan di sekolah cenderung intelektualistik. Pendidikan yang bersifat intelektualistik, pendidikan yang mengutamakan penguasaan materi seperti selama ini terjadi cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan pengembangan kepribadian.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan kuatnya pengaruh aliran pragmatisme dan positivisme, maka pengembangan pendidikan kita lebih berorientasi pada inovasi dan eksperimentasi yang bersifat teknologis, tetapi kurang membangun perspektif tujuan dan kebutuhan asasi. Kemajuan dan kualitas masyarakat lebih diartikan sebagai perubahan dalam penggunaan alat-alat teknologi ketimbang kemajuan dan kualitas dalam arti tujuan kehidupan yang sejati (Sodiq A. Kuntoro, 2008). Pendidikan di sekolah lebih berorientasi pada kekinian dalam arti segera memberikan hasil/kepuasan tetapi sesaat.

Bagi masyarakat sebagai orang tua/wali dan juga peserta didik, pendidikan di sekolah itu yang penting dapat mengerjakan soal-soal ulangan untuk mendapatkan nilai rapor yang baik dan naik, kemudian dapat mengerjakan soal-soal UN untuk mendapatkan NEM yang baik dan lulus. Pemahaman ini jelas telah mereduksi proses pendidikan yang sesungguhnya sebagai proses pendidikan karakter, proses pembentukan watak dan pengembangan kepribadian peserta didik sebagai generasi muda bangsa. Kegiatan pendidikan dimaknai sebagai belajar untuk menghafal materi, mengumpulkan informasi dan mengakumulasi fakta. Mata pelajaran yang paling rentan dan mudah terjebak pada kegiatan menghafal adalah IPS. Dengan demikian pendidikan IPS yang berbasis materi dan masih *sparated* serta cenderung hafalan akan sangat melelahkan, tidak menarik dan tidak bermakna dalam kehidupan keseharian.

MENEGUHKAN KEMBALI JATI DIRI IPS

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran IPS selama ini masih menghadapi berbagai problem antara lain

menyangkut jati diri termasuk konsep dan rumusan standar isi pada KTSP. Artinya posisi dan jati diri pendidikan IPS di sekolah itu sampai sekarang belum mantap. Dalam rangka memantapkan jati diri IPS itu maka perlu kembali ditegaskan tentang pengertian, tujuan dan ruang lingkup serta pendekatan yang digunakan untuk merumuskan standar isi yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan pendidikan IPS di sekolah, terutama di jenjang pendidikan dasar.

Sebutan IPS di Indonesia adalah sebuah kesepakatan untuk menunjuk istilah lain dari *social studies*. Mata pelajaran IPS merupakan bahan kajian yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang diorganisasikan dengan satu pendekatan interdisipliner. IPS dapat dikatakan sebagai mata pelajaran yang bahan kajiannya diambil dan diseleksi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora kemudian diadaptasi untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan (menurut istilah Wesley ilmu-ilmu sosial yang sederhanakan). Sebutan *social studies* atau IPS itu juga untuk menunjuk sifat keterpaduan dari ilmu-ilmu sosial (*integrated social sciences*) (lih. Zamroni, 2010). Jadi sifat keterpaduan itu mestinya menjadi ciri pokok mata pelajaran IPS di sekolah. Oleh karena itu, S. Hamid Hasan (2010) menegaskan bahwa IPS adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya. Dalam rumusan yang lain, IPS merupakan kajian yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan beserta lingkungannya untuk kepentingan pendidikan dalam rangka melahirkan para pelaku sosial. Selanjutnya dalam UU Sisdiknas, dijelaskan bahwa IPS merupakan bahan kajian yang wajib

dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat (penjelasan pasal 37).

Sementara itu pihak *National Council for Social Studies* (NCCS) telah lama mempopulerkan makna *social studies* sebagai studi integratif tentang ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Bidangbidang atau ilmu-ilmu yang diintegrasikan yakni misalnya: antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan juga matematika dan ilmu-ilmu kealaman. Maksud dan tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang baik, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (lih.NCCS:1994). Konsep *social studies* dari NCCS ini telah banyak mengilhami para ahli di Indonesia untuk merumuskan pengertian IPS. Bahkan relevan dengan pengertian itu ahli senior dari Indonesia M. Numan Soemantri (2001) menegaskan bahwa program pendidikan IPS merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dari ilmu-ilmu kealaman dan teknologi.

Dengan pengertian itu berarti IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif yang dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun peserta didik insan Indonesia yang berkarakter, peserta didik yang mengembangkan rasa empati serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia, sesuai dengan kadar kemampuan dan tingkat perkembangan anak didik. Berangkat dari uraian itu, maka

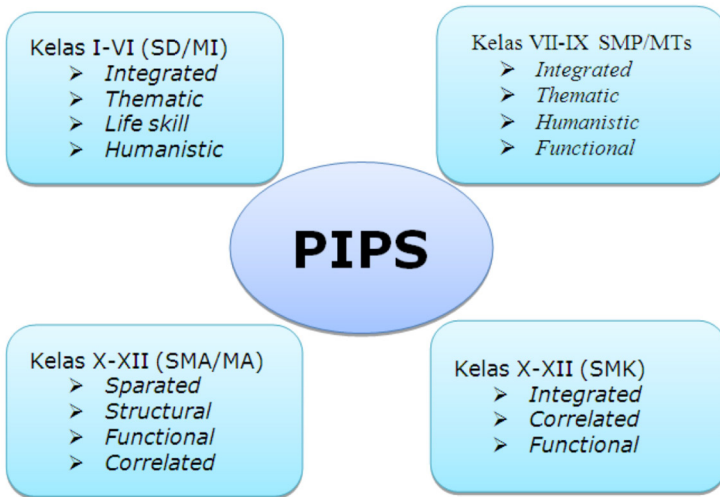
secara rinci dapat dirumuskan tujuan pembelajaran IPS, antara lain mengantarkan, membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar: (1) memahami kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek dan lingkungannya, (2) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri (*learning skills*), empati, memiliki kesadaran dan keterampilan sosial untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah sosio kebangsaan, memiliki kesadaran dan keterampilan sosial (*social skills*) dalam kehidupan bermasyarakat, (3) memiliki kesadaran dan membangun komitmen terhadap nilai-nilai sosial-budaya, kebangsaan, dan kemanusiaan untuk mengembangkan kepribadian yang lebih dewasa, (4) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global (lih, Hamid Hasan, 2010). Dalam rumusan yang lain, dikatakan bahwa melalui pendidikan IPS diharapkan mampu membentuk warga negara dan warga dunia yang demokratis, bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai (Anonim, 2008).

Mencermati pengertian dan rumusan tujuan pendidikan IPS di atas sebetulnya sudah sangat umum dan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan IPS sudah sepakat dan tidak ada perbedaan persepsi, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata timbul berbagai versi dan pandangan yang kecenderungannya tidak kontekstual, kurang sinkron dengan maksud dan tujuan pendidikan IPS. Oleh karena itu, untuk meneguhkan kembali jati diri IPS penulis ingin menegaskan beberapa hal. **Pertama**, IPS merupakan salah satu pelajaran dasar di jenjang pendidikan persekolahan. **Kedua**, pendidikan IPS di sekolah merupakan *integrated social sciences*,

merupakan studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya dalam konteks sosio kebangsaan. Dengan demikian agar lebih bermakna pendekatan yang digunakan dalam merumuskan standar isi adalah *integrated* untuk pendidikan dasar dan *sparated* dan *corelated* untuk SMA/MA, serta *corelated* dan *integrated* untuk SMK. Pendekatan *integrated* ini untuk menambah bobot kebermaknaan dalam konteks kehidupan konkret di masyarakat. Masyarakat itu sebuah sistem yang masing-masing unsur saling mendukung, dan terpadu untuk meraih tujuan.

Oleh karena itu pendekatan terpadu sangat cocok untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada dewasa ini. Untuk membina peserta didik, untuk memecahkan masalah sosial kebangsaan yang ada tidak cukup hanya dengan sejarah saja, dengan ekonomi saja, dengan geografi saja, dengan sosiologi saja, dengan matematika saja, dengan fisika saja dan seterusnya. Meminjam pendapat Von Laue (lih. I Gde Widja, 1991) pembelajaran secara terpadu ini sangat cocok di era globalisasi. Sementara untuk SMA/MA menggunakan pendekatan *sparated* untuk membekali dasar keilmuan para peserta didik yang akan memasuki jenjang perguruan tinggi sesuai dengan keilmuan dan program studi yang dipilihnya. Pendekatan *correlated* untuk memperluas pemahaman peserta didik tentang pengembangan ilmu dan realitas kehidupan. Berikut ini digambarkan aspek-aspek pendekatan untuk mengemas standar isi IPS di sekolah (Diinspirasi, dan bandingkan, Udin S. Winataputra, 2010).

Pendekatan dalam PIPS



Ketiga. Seiring dengan pendekatan *integrated* yang kemudian dilaksanakan pembelajaran yang tematis maka unsur-unsur atau bidang-bidang keilmuan yang dipadukan dalam mata pelajaran IPS dapat lebih banyak, tidak hanya geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi tetapi cabang-cabang ilmu sosial lain, humaniora, bahkan juga ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. Pembelajaran IPS secara tematis dan terpadu memiliki banyak keuntungan. Di samping lebih efektif dan efisien dan lebih kontekstual, juga dapat meningkatkan motivasi belajar, pengalaman belajar peserta didik semakin kaya, luas dan berkembang (Trianto, 2007). Meminjam prinsip pembelajaran terpadu dari Fogarty (1991) pembelajaran IPS secara terpadu juga akan mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasikan; juga mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. **Keempat,** dalam hal tujuan di samping beberapa tujuan yang

telah dirumuskan di atas, perlu ada kerja sama dan pembagian tugas dengan PKn. Kalau PKn tujuan utamanya membentuk warga negara yang baik, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memperkuat rasa kebangsaan, sementara IPS membentuk warga negara yang mampu memahami dan menganalisis masalah-masalah sosio kebangsaan untuk ikut berperan dalam memecahkan masalah-masalah tersebut dan secara kultural dapat berperan dalam memperkuat jati diri bangsa. Secara akademik hal ini didukung oleh tiga tradisi pedagogis dalam mengembangkan kajian IPS yang dipopulerkan oleh Barr dkk (1978) yang kemudian populer tahun 1980-an (lih Udin S. Winataputra, 2010). Yang terkait dengan masalah sosial, terutama tradisi kedua, *Social Studies Taught as Social Science* yang terkait dengan pembentukan warga negara yang baik yang ditandai dengan kemampuan dalam melihat dan mengatasi masalah-masalah sosial dan personal dengan menggunakan cara kerja ilmuwan sosial, dan tradisi ketiga: *Social Studies Taught as Reflective Inquiry*, merupakan tradisi yang ditandai dengan pembentukan warganegara yang baik dengan kemampuan mengambil keputusan dalam upaya mencari nilai tambah dan memecahkan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang populer yang sedang marak terjadi di berbagai negara dan juga menjadi masalah sosial di Indonesia antara lain yang terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan dan kekerasan sosial seperti penyimpangan seksual, narkoba, penculikan, pembunuhan, berbagai tindak kriminal; yang terkait dengan masalah diskriminasi dan ketidakadilan sosial seperti banyaknya kemiskinan di antara si kaya, masalah SARA, masalah gender, kekerasan terhadap anak dan perempuan, masalah penyakit fisik dan mental; terkait dengan

perubahan sosial dan problem-problem besar seperti masalah dalam rumah tangga, urbanisasi dan masalah kependudukan, masalah pendidikan, krisis lingkungan, isu terorisme (James M. Henslin, Lori Ann Fowler, 2010), di samping itu sudah barang tentu masalah korupsi, lunturnya budi pekerti luhur, lemahnya kemandirian dan jati diri bangsa. **Kelima**, terkait dengan standar isi IPS pada KTSP yang berbasis materi keilmuan sehingga melahirkan pembelajaran yang intelektualistik, perlu dilakukan revitalisasi bahkan restrukturisasi dengan menggunakan teori rekonstruksi sosial berbasis karakter (lih. Wayan Lasmawan, 2009). **Keenam**, untuk memantapkan jati diri IPS perlu ada praktik IPS dan Lab. IPS. **Ketujuh**, perlu kita sadari bahwa FIS adalah salah satu fakultas dari LPTK. Oleh karena itu, sebagai *core* bisnisnya ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di sekolah (ilmu-ilmu sosial kependidikan) kemudian diberi *sparing partner* ilmu-ilmu sosial yang non-kependidikan. Oleh karena itu, mestinya FIS terus melakukan kajian-kajian termasuk ikut memecahkan problematika embelajaran IPS secara akademis, bukan sekedar teknis.

IPS DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Untuk memantapkan posisi dan jati diri IPS sebagai mata pelajaran di sekolah, perlu kiranya dikembangkan perspektif pendidikan karakter. Bahkan kalau kita lihat dari maksud dan tujuan IPS seperti diuraikan di atas, nampak jelas bahwa IPS itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter atau pendidikan nilai (Darmiyati Zuchdi, 2008, Samsuri, 2009). Bahkan, Gross (Hamid Darmadi, 2007) menegaskan bahwa pendidikan nilai itu merupakan pendidikan IPS dalam konteks sama-sama untuk mewujudkan warga negara yang baik, warga negara yang

demokratis, bertanggung jawab, ber peradaban tinggi, memiliki rasa kebangsaan (dan jati diri) yang kokoh.

Dijelaskan bahwa pendidikan IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi warga negara dan warga dunia yang baik, demokratis, bertanggung jawab serta warga dunia yang cinta damai. Demokratis diantaranya ditandai oleh sikap menghargai dan menjunjung tinggi hukum dan menghormati perbedaan pendapat. Tanggung jawab ditandai dengan kemampuan dan kemauan untuk selalu membangun komitmen, kosekuen dan istiqomah, bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama dan lingkungannya, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan cinta damai ditandai antara lain mengedepankan kebersamaan, membangun sikap arif dan bijaksana, mudah memberikan maaf, menghargai pandangan orang lain, menghilangkan sikap egoisme dan paradigma berpikir diagnostik serta negatif yang cenderung menjadi sumber konflik. Dengan tujuan ini diharapkan tercipta warga negara yang beriman dan bertakwa, cerdas dan kritis, arif dan bijaksana, demokratis dan tanggung jawab, mampu berkomunikasi dan berkompetisi, mandiri dan berjiwa kebangsaan di tengah-tengah pergaulan dunia global.

Dalam konteks keindonesiaan, pendidikan karakter merupakan proses menyaturasikan sistem nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sardiman AM, 2010). Pendidikan karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan transformasi nilai-nilai keindonesiaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa contoh nilai-nilai kemanusiaan itu antara lain: kejujuran, kasih

sayang, pengendalian diri, saling menghargai dan menghormati sesama, kerja sama dan tanggung jawab (lih. Lickona, 2000). Dalam kaitan ini karakter bangsa dapat dikatakan sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung perekat kultural bagi setiap warga negara. Karakter bangsa Indonesia senantiasa menyangkut perilaku yang mengandung *core values* dan nilai-nilai keindonesiaan yang berakar pada filosofi Pancasila, dan simbol-simbol negara seperti Sang Saka Merah Putih, semboyan Bhineka Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (ALPTKI, 2009). Nilai-nilai keindonesiaan itu harus menjadi bagian penting dari proses pendidikan karakter dan hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan IPS.

Persoalannya adalah pendidikan IPS yang bagaimana yang dapat mengembangkan karakter bagi peserta didik. Sudah barang tentu pendidikan yang bersifat intelektualistik, pendidikan yang hanya menekankan penguasaan materi keilmuan semata, tidak dapat menjalankan misi pendidikan karakter yang ingin menuju warga bangsa unggul dan bermartabat dalam arti bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, peduli dan bertanggung jawab serta memiliki jati diri keindonesiaan yang kuat. Pembelajaran IPS yang berbasis materi dan cenderung hafalan tidak mungkin dapat menjalankan misi tersebut. Perpaduan aliran positivisme dan pragmatisme yang berintervensi ke dunia pendidikan perlu diwaspadai secara kritis agar tidak menimbulkan akumulasi kekecewaan di kemudian hari. Target-target jumlah dalam bentuk angka dan kuantifikasi kemanusiaan dan hal-hal yang fundamental dalam kehidupan manusia perlu mendapat perhatian khusus.

Di Indonesia memasang angka standar kelulusan UN 5,5 kemudian untuk menerima tunjangan profesi guru harus mengajar tatap muka 24 jam dengan persyaratan administrasi yang sekian macam, ternyata menimbulkan berbagai perilaku menyimpang seperti tidak jujur, perjokian, bahkan telah menodai profesionalisme seseorang. Kita sudah terlalu lama mendidik dengan mata rasio tetapi jarang mendidik dengan mata hati seperti dipesankan oleh tokoh pendidikan A. Dahlan dan juga Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, pendidikan pada umumnya dan pendidikan IPS pada khususnya harus dikembangkan sebagai proses transaksi dan transformasi kultural. Dalam mendesain standar isi termasuk pelaksanaan pembelajarannya harus berbasis pada hakikat dan karakter peserta didik, bukan berorientasi materi semata. Pendekatan esensialisme sudah saatnya direstrukturisasi dengan teori rekonstruksi sosial yang mengacu pada teori pendidikan interaksional (lih. Nana Syaodih Sukmadinata, 1996) Agar lebih kontekstual, mudah, dan menyenangkan, serta dapat mencapai tujuan, maka harus dikembangkan pembelajaran IPS secara tematis dan terpadu (untuk pendidikan dasar). Dengan tematis dan terpadu akan lebih menarik dan kontekstual, di samping efektif dan efisien. Untuk mengakhiri uraian ini, kami ingin memberi gambaran perbandingan antara pokok bahasan yang berbasis keilmuan dan tema dalam IPS (yang terpadu) di SMP/MTs, dalam rangka memperkuat jati diri keindonesiaan.

Pokok Bahasan IPS Kl. VII/Sm 1 (KTSP)		Tema IPS K1.VII Sm. 1 (Terpadu)
1	Bentuk-bentuk Kulit Bumi	Indonesia Zamrut Khatulistiwa
	(bentuk relief, proses pembentukan relief Muka Bumi, klasifikasi batuan Penyusun Kerak Bumi, Gempa Bumi, Tenaga Eksogen, Tenaga Endogen)	<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan alam di Nusantara yang indah • dan permai Kekayaan alam di Nusantara yang melimpah, karena kemurahan Tuhan
2	Kehidupan pada Masa PraAksara (jenis manusia praaksara, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pra aksara, hasil kebudayaan masa pra aksara, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • Nenek moyangku seorang Pelaut • Budaya nenek moyang yang religious • Barter melatih kejujuran • Gotong royong membangun kebersamaan
3	Interaksi Sosial (Bentuk-bentuk interaksi Sosial, Proses interaksi Sosial)	
4	Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi	
	(Pengertian Manusia Ekonomi, manusia sebagai makhluk ekonomi yg bermoral, perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya)	

Penutup

Demikian orasi ilmiah ini kami sampaikan. Terkait dengan penguatan jati diri IPS kami tidak secara langsung menghubungkan dengan gemuruhnya kerja teman-teman di Jakarta yang sedang melakukan perbaikan (kurikulum dan) standar isi IPS. Dikaitkan dengan jiwa dan pesan di balik peraturan perundang-undangan yang ada dan kemauan para pejabat kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta HISPISI sebagai organisasi profesi yang relevan, konsep dan pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan IPS di sekolah sebenarnya sudah jelas. Di SD/MI *integrated*, di SMP/MTs juga *integrated*, kalau memang masih bingung ya *correlated*, sedang di SMA/MA *sparated*, syukur dilengkapi dengan *correlated*. Bagi FIS dan FE dalam lingkup LPTK mestinya tidak bercerai dengan jati diri IPS. FIS dan FE di samping mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang ada di fakultas, seharusnya terus memberikan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran IPS di sekolah, kecuali kalau kita ingin lepas dari pesan *wider mandate*. Ini memang sebuah tantangan sekaligus memerlukan keberanian. **Terima Kasih !!!**

DAFTAR PUSTAKA

- ALPTKI (2009). "Pemikiran tentang Pendidikan Karakter dalam Bingkai Utuh Sistem Pendidikan Nasional", *Makalah*, Asosiasi LPTK Indonesia
- Anonim, (2008). "Pendidikan IPS sebagai Upaya untuk Membangun Jati Diri Bangsa", hasil diskusi Dewan Pakar HISPISI, 9 Agustus 2008.
- Barr, R.D., Barth, J.L.Shermis, S.S. (1978). *The Nature of the Social*

Studies, Palm Spring: An ETS Publication

- Darmiyati Zuchdi (2008). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Esterlita Pratiwi, (2012) dalam <http://esterlitapратиwi.blogspot.com/2011>, diunduh 9 September 2012
- Fogarty, Robin, 1991. *The Mindful School: How to Integrated the Curricula*, Palatine, Illinois: Skylight Publishing, Inc.
- Hamid Darmadi. (2007). *Konsep Dasar Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta.
- Hassan, S. Hamid, (2010), "Pendidikan IPS (Definisi, Tujuan, SKL, Konten, Proses dan Asesmen)" *Panduan*, Yogyakarta: HISPISI
- Henslin, James M., Fowler, Lori Ann, (2010). *Social Probles: A Down-to-Earth Approach*, Boston: Pearson.
- Lickona, Thomas. (2000). "Talks About Character Education", wawancara oleh Early Childhood Today, *ProQuest Education Journal*, April, 2000, <http://webcache.googleusercontent.com>., diunduh, 20 April 2010.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (1996), "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam Era Globalisasi" Makalah disampaikan pada seminar tentang Pengembangan Kurikulum oleh Pusbangkurandik, Balitbangdikbud, Jakarta.
- NCSS., (¹994). *Curriculum Standars for the Social Studies*. Washington D.C.: National Council for the Social Studies.
- Pargito (2010) dalam http://haslindafadilah.blog_spot.com/2o.10, diunduh pada 10 September 2012
- Samsuri, (2009), "Mengapa Perlu Pendidikan Karakter?", Makalah, disajikan pada *workshop* tentang Pendidikan Karakter, FISE UNY,
- Sardiman AM, (2010). "Revitalisasi Peran Pembelajaran IPS dalam Pembentukan Karakter Bangsa", *Cakrawala Pendidikan*, Edisi Khusus Dies Natalis UNY, Th XXIX, Mei 2010.
- Soemarno Soedarsono, H. (2009). *Karakter Mengantarkan Bangsa*

dari Gelap Menuju Terang. Jakarta: Kompas Gramedia.

Somantri, M. Numan (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: Rosda Karya.

Trianto, (2007). *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Udin. S. Winataputra. (2010). "Peran Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa", *Makalah*, disampaikan pada acara Seminar Internasional oleh HISPISI dan UNM di UNM Makasar, 13-14 Juli.

Widja, I Gde, 1991." Pendidikan Sejarah dan Tantangan Masa Depan," *Makalah Orasi Ilmiah*, Disampaikan pada pengukuhan Guru Besar Tetap pada Ilmu Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Udayana, 19 Januari 1991.

Zamroni, (2010), "Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Karakter Bangsa", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Internasional oleh HISPISI dan UNM di UNM Makasar, 13-14 Juli 2010.

_____(2011). "Transformasi Pembelajaran IPS Guna Memantapkan Peran Nilai-nilainya dalam Pembangunan Karakter Bangsa", *Makalah*, disampaikan di UHAMKA pada Kongres HISPISI XIII, 7-9 Oktober 2011



PENDEKATAN ILMIAH DALAM PEMBELAJARAN ILMU-ILMU SOSIAL

Oleh:

Prof. Dr. Abdul Gafur D., M.Sc

I. PENDAHULUAN

Bidang studi ilmu-ilmu sosial mencakup berbagai disiplin seperti sejarah, geografi, politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, dsb. Pemilihan dan pengorganisasian materi dalam kurikulum ilmu-ilmu sosial serta kegiatan pembelajaran yang tepat diharapkan dapat membuat siswa memiliki kemampuan mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap masyarakat di mana mereka berada.

Kegiatan pembelajaran menyangkut kegiatan mengajar di pihak guru, dan belajar di pihak siswa. Di pihak guru, kegiatan

mengajar (*instruction*) berarti "*providing the arrangement of environment to facilitate learning*". Di pihak siswa, "*learning is the development of new knowledge, skills, or attitudes as individual interacts with information and environment*" (Heinich, 1996:8). Lingkungan yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya menyangkut soal tempat di mana kegiatan belajar berlangsung, tetapi juga meliputi metode, media, dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaikan pelajaran dan memberikan petunjuk belajar siswa.

Lingkungan tersebut disediakan dalam rangka "*facilitating learning...means helping people to learn to improve performance as the primary and essential purpose of educational technology*" (Januszkeski & Molenda, 2008:15).

Pemilihan pendekatan atau strategi pembelajaran yang digunakan sangat menentukan lingkungan (metode, media, peralatan dan fasilitas) dan cara materi pembelajaran disampaikan kepada siswa. Pendekatan tersebut menentukan pula terhadap *performance* siswa. Oleh karena itu ketepatan pemilihan pendekatan atau strategi pembelajaran merupakan hal penting.

Mengapa perlu pendekatan ilmiah dalam pembelajaran dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial? Seperti diketahui, banyak anggapan bahwa hanya sains atau fisika saja yang diakui strateginya dapat bersifat ilmiah. Ilmu-ilmu non sains dan non fisika seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik dianggap tidak ilmiah karena sifatnya. Tetapi perlu diingat bahwa pembelajaran ilmu-ilmu sosial pun dapat bersifat ilmiah seperti halnya sains dan fisika.

Bidang studi ilmu-ilmu sosial memiliki misi dan tanggungjawab "*to create human values, namely freedom, trust, mutual respect,*

respect for diversity, etc.” (Kumar, 2006 : 5). Sehubungan dengan itu, maka pembelajaran ilmu-ilmu sosial perlu diupayakan agar dapat membantu menanamkan kepada peserta didik kekuatan mental atau moral sedemikian rupa sehinggamereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial dapat mencapai tujuan ini dengan jalan meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif, mengkritisi isu-isu sosial yang dihadapi baik yang yang menyangkut individu, masyarakat lokal maupun masyarakat global. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial perlu direvitalisasi agar mampu membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat. *”The teaching of social sciences must adopt methods that promote creativity, aesthetics, and critical perspectives, and enable children to draw relationships between past and present, to understand change take place in the society”* (Kumar, 2006 : 8).

Berdasar pokok-pokok pikiran tersebut maka beralasan untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis ilmiah dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial. Sajian berikut akan membahas konsep dan prinsip pendekatan pembelajaran ilmiah untuk dapat diaplikasikan dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial.

II. KONSEP PENDEKATAN PEMBELAJARAN ILMIAH

Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebenarnya semula banyak diterapkan dalam pembelajaran sains.. *”Scientific teaching is a pedagogical approach used in undergraduate science classroom whereby teaching and learning is approach with same rigor as science itself”*(wikipedia.org/wiki/scientific_teaching).

Para pendidik sepakat bahwa penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah membuat pembelajaran aktif, pembelajaran berpuast pada siswa, memungkinkan penilaian autentik, dan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual siswa.

Penerapan pendekatan ilmiah (*scientific approach to teaching*) menyangkut dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Pertama menyangkut dimensi pembelajaran, dan kedua menyangkut dimensi materi pembelajarannya.

Pada dimensi pembelajaran, pendekatan ilmiah menghendaki agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran didasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah. Pada dimensi materi pembelajaran, pendekatan ilmiah menghendaki agar fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang diajarkan atau pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diajarkan kepada siswa benar-benar merupakan suatu pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*), mengandung kebenaran ilmiah karena diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah.

1. Pendekatan ilmiah pada dimensi pembelajaran

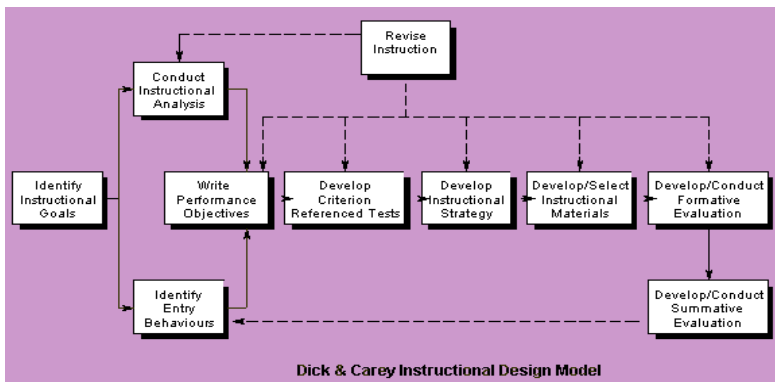
Agar pembelajaran bersifat ilmiah, maka pembelajaran harus dikembangkan secara ilmiah pula. Tanpa pengembangan pembelajaran secara ilmiah, akan sulit diperoleh hasil pembelajaran yang ilmiah. Aspek pembelajaran di sini menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Pendekatan ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran ilmiah ditandai dengan diterapkannya konsep sistem (*system's approach*) dan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving approach*). Konsep sistem memandang pembelajaran sebagai suatu sistem. Pada sistem pembelajaran dapat diidentifikasi komponen sistem pembelajaran yang satu sama lain saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi masalah, tujuan, atau kebutuhan. Berdasar kebutuhan atau tujuan yang telah diidentifikasi, dicari alternatif-alternatif strategi, alat, dan media dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Aplikasi konsep sistem dan pendekatan pemecahan masalah dalam perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari adanya berbagai model pengembangann pembelajaran, seperti model Dick & Carey ASSURE, ADDIE, BANATHY, dsb.

Menurut model Dick misalnya, langkah-langkah ilmiah dalam mengembangkan pembelajaran dapat dilihat pada Bagan 1 berikut ini.



(Sumber Dic & Carey, 2009: 2-3)

Berdasar bagan tersebut, menurut Model Dick & Carey, langkah-langkah pengembangan pembelajaran terdiri dari 10 langkah atau komponen. Ada perbedaan istilah yang digunakan antara Model Dick & Carey 1978 dengan model yang terdapat dalam bukunya terbitan tahun 2009. Komponen tersebut meliputi

1. Identifikasi kebutuhan atau tujuan umum pembelajaran
2. Melaksanakan analisis pembelajaran
3. Identifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa
4. Menuliskan tujuan pembelajaran khusus
5. Mengembangkan tes acuan kriteria
6. Mengembangkan strategi pembelajaran
7. Mengembangkan/memilih paket pembelajaran
8. Mngembangkan /melaksanakan evaluasi formatif
9. Mengadakan revisi/perbaikan pembelajaran
10. Mengembangkan/melaksanakan evaluasi sumatif.

b. Pelaksanaan pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun secara sistematis.

Tidak kalah penting, dalam tahapan ini, prinsip-prinsip ilmiah perlu diterapkan. Setiap kegiatan perlu didasarkan atas teori-teori ilmiah yang telah teruji kebenarannya atau berdasar hasil penelitian yang yang valid, bukan atas dasar intuisi dan tradisi.

c. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran perlu didasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah. Hal ini dapat dicapai dengan jalan menerapkan perinsip-prinsip ilmiah dalam merancang, melakanakan, dan mengolah serta melaporkan hasil evaluasi.

Indikator bahwa evaluasi dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah antara lain instrumen evaluasi yang digunakan sah (*valid*) dan handal (*reliable*) karena dikembangkan sesuai prosedur ilmiah yaitu melalui uji validitas dan reliabilitas. Prosedur evaluasi pun standar, begitupun cara menilai, dan melaporkan didasarkan atas fakta ilmiah hasil evaluasi.

d. Sumber

Buku-buku bacaan atau buku teks yang digunakan hendaknya mengandung kebenaran ilmiah, ditulis dan disusun menurut kaidah-kaidah ilmiah, relevan dengan materi yang dipelajari, dan *up to date*.

2. Pendekatan ilmiah dalam penentuan materi pembelajaran

a. Materi faktual

Dalam hal materi yang diajarkan berupa fakta atau peristiwa sejarah, maka fakta-fakta tersebut hendaknya mengandung kebenaran ilmiah. Fakta yang diajarkan diperoleh melalui langkah-langkah penelitian ilmiah.

b. Materi konsep

Dalam hal materi pelajaran yang diajarkan berupa konsep, definisi, atau proposisi, kesemuanya harus mengandung kebenaran ilmiah yang tidak terbantahkan.

c. Materi prinsip

Dalam hal materi yang diajarkan berupa prinsip, dalil, rumus, undang-undang, atau hukum, kesemuanya harus benar baik rumusan, bunyi, isi, maupun sumber hukum yang diajarkan.

d. Materi prosedur

Dalam hal materi yang diajarkan berupa prosedur, PROTAP, SOP, langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, maka prosedur yang diajarkan harus benar, misalnya prosedur mengadili perkara pidana, perkara perdata, prosedur pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

e. Sikap

Dalam hal materi yang diajarkan berupa nilai, norma (yaitu apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan), karakter, sikap, maka semua nilai tersebut harus benar dan sesuai dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat atau bangsa kita.

III. STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PENDEKATAN ILMIAH

Untuk pembelajaran ilmu-ilmu sosial, tersedia banyak pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Banyak di antaranya yang karena sifatnya telah dapat dikategorikan sebagai strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah. Beberapa contoh pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah antara lain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem dan langkah-langkah pemecahan masalah, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan penelitian, dan pembelajaran inkuiri.

1. Penerapan Pendekatan sistem dan langkah-langkah pemecahan masalah

Penerapan konsep sistem dalam pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi berpikir runtut, analitik, sistemik dan sistematis.

Peserta didik dilatih melihat fenomena dalam kehidupan sosial sebagai suatu sistem, yaitu sebagai suatu kesatuan yang memiliki visi, misi, tujuan, fungsi, serta tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa dalam suatu sistem terdapat bagian-bagian atau komponen yang masing-masing memiliki tugas atau fungsi. Bahwa bagian-bagian atau komponen-komponen tersebut satu sama lain saling bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan sistem.

Aplikasi konsep sistem antara lain berupa pendekatan sistem (*systems approach*). Dalam merencanakan suatu program atau memecahkan suatu masalah, pendekatan ini mengikuti langkah-langkah sistematis. Salah satu contoh adalah perencanaan sistem menurut Model Kaufman. Menurut Kaufman, perencanaan sistem dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan. Berdasar masalah tersebut diidentifikasi syarat dan alternatif pemecahan masalah. Alternatif-alternatif pemecahan masalah tersebut kemudian dikaji efektifitasnya dengan menggunakan analisis untung rugi, analisis efisiensi, dan analisis keberhasilan (*cost benefit analysis, cost efeciency analysis, cost effectiveness analysis*). Setelah dikaji keunggulan dan kelemahan masing-masing, kemudian dipilih alternatif untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan alternatif, ditentukan jadwal, pembagian tugas dan tanggungjawab, sarana dan prasarana serta biaya yang diperlukan. Setelah dilaksanakan diadakan evaluasi apakah alternatif yang telah dipilih dan dilaksanakan tadi dapat memenuhi kebutuhan atau dapat memecahkan masalah atau kebutuhan yang telah diidentifikasi. Jika masalah belum terpecahkan dan kebutuhan belum terpenuhi, langkah terakhir adalah mengadakan revisi.

Revisi dilakukan terhadap semua tahapan perencanaan, mulai dari identifikasi masalah sampai evaluasi.

Dengan menerapkan strategi sejalan dengan aplikasi teori atau konsep sistem dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial tersebut diharapkan siswa akan memiliki ketrampilan memecahkan masalah secara sistematis, berpikir kritis, analitis, runtut, dan teratur. Kesemuanya merupakan tanda orang yang memiliki ketrampilan berpikir ilmiah.

2. Pendekatan sistem (*Systems Approach*), pendekatan pemecahan masalah (*Problem solving approach*), dan perencanaan secara sistematis (*systematic planning*)

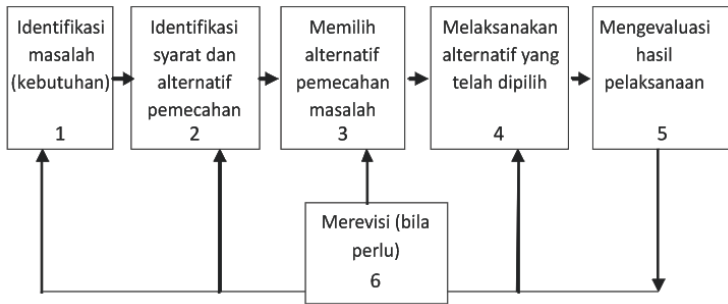
Pendekatan sistem adalah suatu pendekatan yang memandang segala sesuatu sebagai suatu sistem, yaitu sesuatu yang mempunyai tujuan, terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling bekerjasama berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sistem.

Pendekatan pemecahan masalah adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, mengidentifikasi syarat-syarat pemecahan masalah, memilih alternatif pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan merevisi bilamana diperlukan.

Aplikasi konsep dan pendekatan sistem dalam perencanaan melahirkan suatu model perencanaan yang sistematis. Suatu perencanaan secara sistematis pada hakekatnya sama dengan proses pemecahan masalah secara umum (*a general problem solving process*).

Model perencanaan sistematis menurut Kaufman (2000 :10) terdiri dari 6 langkah seperti nampak pada bagan berikut:

Bagan 2:
Model Perencanaan menurut Kaufman



Sesuai dengan model tersebut, dalam melaksanakan pembelajaran siswa dilatih untuk mengikuti langkah-langkah sistematis tersebut pada saat merencanakan suatu kegiatan atau pada saat harus memecahkan suatu masalah. Secara rinci langkah-langkah suatu perencanaan yang sistematis sesuai bagan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan. Masalah atau kebutuhan adalah kesenjangan (*gap*) antara yang diinginkan dengan keadaan sekarang. Misalnya seharusnya tingkat kelulusan 98 %, namun tingkat kelulusan sekarang baru mencapai 88%. Jadi terdapat kesenjangan 10%. Masalah atau kebutuhan yang harus dipenuhi adalah bagaimana meniadakan kesenjangan 10% tersebut agar tercapai tingkat kelulusan 98%.
2. Menentukan alternatif pemecahan
Alternatif pemecahan adalah pilihan-pilihan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah. Dalam contoh di atas misalnya alternatif yang diajukan: dalam proses pembelajaran digunakan multi metode, multi media, memperbanyak buku teks, memberikan les tambahan.

3. Memilih strategi pemecahan
Dari beberapa alternatif yang telah diidentifikasi kemudian alternatif yang dinilai layak untuk dipilih. Pemilihan alternatif didasarkan atas analisis tepat guna dan analisis hasil guna, analisis untung rugi, dan analisis efisiensi.
4. Melaksanakan strategi yang telah dipilih untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Untuk melaksanakan alternatif yang dipilih perlu ditentukan jadwal, pembagian tugas, sarana dan prasarana yang diperlukan.
5. Mengadakan evaluasi untuk menentukan efektifitas hasil pemecahan masalah.
Data atau informasi perlu dikumpulkan untuk memberikan penilaian apakah hasil pelaksanaan alternatif yang dipilih dapat mencapai tujuan atau kebutuhan yang telah ditetapkan.
6. Mengadakan revisi bila perlu pada setiap langkah dari proses tersebut.
Revisi atau perbaikan perlu dilakukan jika hasil pelaksanaan alternative yang telah dipilih ternyata tidak berhasil mencapai tujuan. Revisi perlu diadakan pada setiap tahapan yang dipandang menyebabkan tidak tercapainya tujuan.

3. Pembelajaran berbasis riset (*Research based teaching*)

Kurikulum 2013 menekankan diterapkannya dimensi paedagogik moderen dalam pembelajaran dengan jalan menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pelaksanaan pembelajaran diwujudkan dengan dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada semua matapelajaran.

Agar pendekatan ilmiah dalam pembelajaran lebih nyata dan formal, ada baiknya diterapkan secara eksplisit langkah-langkah penelitian secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah penelitian ilmiah. Dengan menerapkan langkah-langkah penelitian ilmiah, maka diharapkan dapat diperoleh teori baru, pemantapan terhadap teori yang telah ada, atau menegasi teori lama. Dengan menerapkan langkah-langkah penelitian ilmiah, maka akan diperoleh pengetahuan baru yang *valid* dan handal.

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dapat dilaksanakan dengan jalan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah penelitian ilmiah. Tergantung dari tujuan dan materi ilmu sosial yang akan diajarkan, kita dapat memilih jenis penelitian yang relevan.

Seperti diketahui, sesuai dengan tujuannya, kita dapat mengelompokkan jenis-jenis penelitian itu menjadi penelitian: *Historical, Decriptive, Developmental, Case or field study, Correlational, Causal comparative, True experimental, Quasi-experimental, Action research.* (Isaac and Michael, 2003 : 41).

Masing-masing jenis-jenis penelitian tersebut dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pokok masing jenis-jenis penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian historis (*Historical*)

Jenis penelitian historis dapat diterapkan dalam pembelajaran jika dikehendaki agar siswa dapat merekonstruksi secara obyektif dan akurat peristiwa-peristiwa masa lalu berdasar data yang ada. Metode ini cocok untuk pembelajaran sejarah.

b. Penelitian deskriptif (*Decriptive research*)

Penelitian deskriptif tepat diterapkan sebagai strategi atau metode pembelajaran jika siswa dikehendaki dapat mendeskripsikan secara sistematis suatu situasi atau keadaan yang menjadi pokok kajian secara faktual dan akurat. Sebagai contoh, siswa diminta mendeskripsikan struktur organisasi dan tatalaksana pemerintahan adat desa di Bali.

- c. Penelitian pengembangan (*Developmental reesearch*)
Jenis penelitian pengembangan (perkembangan), tepat digunakan jika siswa dikehendaki agar dapat menemukan pola-pola perubahan, atau perkembangan suatu obyek yang disebabkan oleh faktor waktu. Dalam pelajaran geografi misalnya, siswa diminta untuk mengamati perkembangan abrasi di pantai dari waktu ke waktu..
- d. Studi kasus (*Case or field study*)
Metode penelitian studi kasus tepat digunakan jika siswa dikehendaki dapat mengkaji secara intensif latar belakang, status sosial, interaksi lingkungan suatu unit sosial yang terdiri dari individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.
- e. Penelitian korelatif (*Correlational research*)
Jenis penelitian korelatif tepat digunakan sebagai strategi pembelajaran jika siswa dikehendaki agar dapat melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih suatu fenomena.
- f. Penelitian evaluatif (*Expost-facto or Causal comparative*)
Penelitian evaluatif dapat diterapkan sebagai strategi pembelajaran jika siswa dikehendaki agar dapat mencari ada tidaknya hubungan sebab akibat dari kondisi yang ada sekarang kemudian melacak ke belakang mencari faktor-faktor penyebabnya.

g. Ekseperimental (*True experimental*)

Jenis penelitian eksperimen dapat digunakan jika dalam pembelajaran siswa dikehendaki agar dapat menemukan ada tidaknya perbedaan pengaruh dari satu atau lebih perlakuan (*treatment*).

h. Penelitian eksperimen kuasi (*Quasi-experimental*)

Jenis kuasi eksperimen dapat digunakan dalam pembelajaran jika siswa dikehendaki agar dapat menemukan ada tidaknya perbedaan pengaruh suatu perlakuan, namun peneliti tidak sepenuhnya dapat mengendalikan atau mengontrol objek yang diteliti.

i. Penelitian tindakan (*Action research*)

Jenis penelitian tindakan dapat diterapkan dalam pembelajaran jika dikehendaki agar siswa dapat menemukan teknik pemecahan masalah di saat program sedang berjalan.

4. Strategi inquiri (*Inquiry*)

Strategi pembelajaran yang relevan dengan pendekatan ilmiah lainnya adalah strategi inkuiri. Strategi inkuiri termasuk kelompok atau rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi. Tujuan umum strategi inkuiri adalah *"to help students develop intellectual discipline and skills necessary to raise questions and search out answer stemming from their curiosity"* (Joyce an Weil, 2000 : 62). Jadi, dalam pembelajaran ilmu sosial, strategi atau metode pembelajaran inkuiri merupakan proses bertanya dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial. Siswa mengembangkan pertanyaan, mengumpulkan dan mengorganisasikan data yang relevan dengan permasalahan yang diajukan, analisis data, dan mengambil kesimpulan berdasar data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan tadi. Langkah-langkah

ini merupakan "*scientific methods*" yang diaplikasikan di bidang ilmu sosial, dan di banyak kasus merupakan cerminan bagaimana ilmuwan ilmu sosial seperti ahli ekonomi, sejarah, geografi, politik melaksanakan penelitian. Kunci pokok strategi inkuiri adalah aktifitas belajar terletak pada siswa (*student centered learning*). Guru berperan sebagai fasilitator.

Banyak keunggulan yang dapat diperoleh dari penerapan strategi inkuiri. Beberapa di antaranya:

- a. Siswa membangun dan mendapatkan sendiri pengetahuan yang dipelajari (hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivisme);
- b. Jawaban atas pertanyaan ditemukan sendiri oleh siswa, dengan demikian lebih mudah diingat oleh siswa;
- c. Siswa dilatih dan didorong untuk berpikir kritis dan kreatif;
- d. Keterampilan berpikir tingkat tinggi diupayakan berkembang (analisis, sintesis, evaluasi);
- d. Diperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bulat dan terpadu (siswa mampu menganalisis dan menyajikan hasilnya dalam bentuk bagan grafik, dsb.)

Banyak variasi langkah-langkah sistematis penerapan strategi inkuiri, satu di antaranya adalah 5 langkah berikut ini (Wilén and Phillips, 2005 : 6):

1. Identifikasi dan klarifikasi pertanyaan, isu atau masalah
Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siswa atas bantuan guru
2. Pengajuan alternatif pemecahan
Mengajukan saran pemecahan, penjelasan, atau jawaban sementara atas permasalahan. Pengembangan hipotesis ini akan memberikan petunjuk bagi siswa dalam melaksanakan penelitian.

3. Mengumpulkan dan mengorganisaikan data atau bukti-bukti
Mencari dan mengumpulkan data merupakan kegiatan pokok penelitian. Tahapan ini akan memungkinkan siswa mampu mengembangkan ketrampilan sosial. Kemampuan dimaksud antara lain berhubungan dengan masyarakat atau orang lain dalam rangka mencari data. Ketrampilan lain yang diperoleh adalah membedakan data yang relevan dan yang tidak relevan, menilai data primer atau data sekunder, menyusun dan menafsirkan informasi, mengklasifikasi, mengkategorisasi, dan menyajikan informasi.
4. Menilai, menganalisis, dan menafsirkan data
Berdasar bukti-bukti berupa data yang telah dikumpulkan, mengajukan pemecahan masalah atau memberikan penjelasan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.
5. Menyimpulkan, dan membuat generalisasi
Menyimpulkan apakah hipotesis terbukti atau tidak terbukti? Bagaimana jawaban atas pertanyaan penelitian? Kesimpulan atau generalalisasi apa yang dapat dikemukakan?

IV. PENUTUP

Bidang studi ilmu-ilmu sosial mencakup berbagai disiplin seperti sejarah, geografi, politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, dsb. Pemilihan dan pengorganisasin materi dalam kurikulum ilmu-ilmu sosial serta kegiatan pembelajaran yang tepat diharapkan dapat membuat siswa memiliki kemampuan mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap masyarakat di mana mereka berada.

Kegiatan pembelajaran menyangkut kegiatan mengajar di pihak guru, dan belajar dipihak siswa. Pemilihan pendekatan

atau strategi pembelajaran yang digunakan sangat menentukan lingkungan (metode, media, peralatan dan fasilitas) dan cara materi pembelajaran disampaikan kepada siswa. Pendekatan tersebut menentukan pula terhadap *performance* siswa. Oleh karena itu ketepatan pemilihan pendekatan atau strategi pembelajaran merupakan hal penting termasuk pemilihan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial.

Pembelajaran ilmu-ilmu sosial perlu diupayakan agar dapat membantu menanamkan kepada peserta didik kekuatan mental atau moral sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial dapat mencapai tujuan ini dengan jalan meningkatkan kemampuan siswa utk berinisiatif, mengkritisi isu-isu sosial yang dihadapi baik yang yang menyangkut individu, masyarakat lokal maupun masyarakat global. Pembelajaran ilmu-ilmu sosial perlu direvitalisasi agar mampu membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat.

Berdasar pokok-pokok pikiran tersebut maka beralasan untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis ilmiah dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial.

Penerapan pendekatan ilmiah atau saintifik (*scientific approach to teaching*) menyangkut dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Pertama menyangkut dimensi pembelajaran, dan kedua menyangkut dimensi materi pembelajarannya. Pada dimensi pembelajaran, pendekatan ilmiah menghendaki agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi didasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah. Pada dimensi materi pembelajaran, pendekatan

ilmiah menghendaki agar fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang diajarkan atau pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diajarkan kepada siswa benar-benar merupakan suatu pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*), mengandung kebenaran ilmiah karena diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah.

Penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran ilm-ilmu sosial dapat dilaksanakan melalui dua cara pokok. Pertama dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluai proses dan hasil pembelajaran menggunakan pendekatan sistem. Perwujudan kongkritnya adalah dengan menerapkan berbagai model pengembangan pembelajaran. Berbagai model seperti model Dic & Carey dan Model ADDIE memberikan petunjuk langkah-langkah sistematis ilmiah dalam mengembangkan pembelajaran. Landasan teoritik yang dipakai adalah teori sistem, pendekatan sistem, dan pendekatan pemecahan masalah.

Kedua dengan memilih berbagai strategi yang nyata-nyata menerapkan konsep dan prinsip langkah-langkah ilmiah. Beberapa strategi pembelajaran yang secara eksplisit sejalan dan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah misalnya: strategi pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistem, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan penelitian, dan inkuiri.

BAHAN RUJUKAN

- Abdul Gafur (2001) *Pengembangan materi pembelajaran PPKn aspek keterampilan intelektual, posisi diri, dan partisipasi*. Jakarta: Direktorat SLTP-Dirjendikdasmen.
- Abdul Gafur (2001). *Instructional strategies for teaching tolerance and humanrights*. Paper presented in the Seminar of Civics Education conducted by CICED in Yogyakarta, August, 2001.

- Abdul Gafur (2012) *Desain pembelajaran: Konsep, model, dan aplikasinya dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Dick, Walter; Carey, Lou; and Carey James O.(2009) *The Systematic Design of Instruction*. New York:Addison-Wesley Educational Publications Inc.
- Gredler, Margaret E. (2009). *Learning and instruction*. London: Pearson Education Ltd.
- Heiman Marcia & Slomianko Joshua. 2007. *Thinking skills instruction: Concepts and techniques*. Washing ton DC: National Education Association.
- Heinich, R., Molenda, M., Russel,J. & Smaldino, S.E. (1996). *Instructional technology and media for learning*. Englewood Cliffts N.J.: A Simon & Schuster Company.
- Isaac, Stephen and Michael William. (2003). *Handbook in research and evaluation*.San Diego: Edits Publ.
- Joice Bruce and Weil Marsha. 1980. *Models of teaching*. Engle Wood Cliffs: Printice –Hall, Inc.
- Januszewski, A. & Molenda, M. (Eds.) (2008). *Educational technology: A definition with commentary*. New York: Routledge.
- Kaufman R (2000). *Mega planning*. Thousand Oaks. CA:Sage Publications.
- Kemendikbud. 2013. *Konsep pendekatan scientific*. Jakarta: Kemendikbud
- Kruse, Kevin & Moss, K.. "Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model." E-Learning. 2001. April, 5, 2009. http://www.e-com/articles/art2_1.htm
- Kumar, Raja. (2006). *Teaching of social sciences*. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
- Moore, Keneth D. (2005). *Effective instructional strategies: From theory to practice*. London: Sage Publications.
- Morrison, Gary R., Steven Ross, and Jerrold Kemp (2007). *Designing Effective Instruction*, 5th Edition. New Jersey:

John Wiley & Sons, Inc.

Norton, Pricilia & Sprague Debra. 2001. *Technology for teaching*. London: Allyin and

Piskurich, George M., Beckschi, P & Hall, Brandon (2000). *The ASTD handbook of training and delivery*. London: McGraw-Hill.

Smaldino, Sharon E, Lowther Deborah L., Russel James D. (2008). *Instructional Technology and Media for Learning* (9th Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Thousan JS., Villa, RA., and Nevin A.I. 2007. *Differentiating instruction: Collaborative planning and teaching for universally designed learning*. London: Sage Publications.

Wikipedia.org/wiki/scientific_teaching

Wilén, W.W, and J.A. Phillips. 2005. Teaching critical thinking. *Socoal Education* 59 (3) 135 – 138.

Refleksi Pendidikan Indonesia

Mendayung Antara Ke-Indonesiaan dan Instrumen Neo-Liberalisasi

Pendidikan dan moral adalah dua pilar yang sangat penting bagi teguh dan kokohnya suatu bangsa. Dua pilar ini menuntut untuk dicerna dan dicermati dengan arif oleh segenap anak bangsa. Dalam suatu negara yang sedang berusaha lepas dari badai krisis, sangatlah tepat apabila kita mencoba untuk melihat kembali posisi dan interrelasi dua pilar ini bagi bangsa Indonesia.

Uraian berikut akan mencoba menelusuri posisi pendidikan dan moral dalam bingkai kehidupan kebangsaan kita. Dengan menempatkannya pada posisi yang tepat, diharapkan bisa mengantarkan kita untuk menemukan jalan yang lurus, shirat al-mustaqim. Jalan yang akan dapat membuka mata hati dan kesadaran kemanusiaan kita sebagai anak-anak bangsa. Sehingga krisis yang hampir saja menghempaskan kita ke jurang kebangkrutan dan kehancuran, dengan segera dapat dilalui dan cepat berlalu.




PENERBIT OMBAK

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

www.penerbitombak.com  Penerbit Ombak Dua

ISBN 123456789-X

